

# LAPORAN KEUANGAN

*Audited*

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



2023

Periode yang berakhir:  
31 Desember 2023



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

**BAGIAN ANGGARAN 088  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Audited)**

**JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR  
TELP. (021) 8093008**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024

Pjt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Surat Pernyataan Manajemen	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	52
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	89
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	100
F. Pengungkapan Penting Lainnya	108
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran A1 Daftar Rekening Bendahara Satker BKN	
B. Lampiran A2 Tabel Informasi Belanja Dibayar Dimuka	
C. Lampiran A3 Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
D. Lampiran A4 Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
E. Lampiran A5 Tabel Informasi Pendapatan Diterima Dimuka	
F. Lampiran A6 Daftar Hibah Langsung berupa Barang/Jasa	
G. Lampiran A7 Daftar Realisasi RPATA 2023 dengan Dokumen Pembayaran TA 2024	

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	16
Tabel 1.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 1.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 1.4	Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19	19
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023	21
Tabel 2.2	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	21
Tabel 2.3	Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	22
Tabel 2.4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPNBP	22
Tabel 2.5	Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker	25
Tabel 2.6	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	26
Tabel 2.7	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	27
Tabel 2.8	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	27
Tabel 2.9	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPNBP	28
Tabel 2.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	28
Tabel 2.11	Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program	29
Tabel 2.12	Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	29
Tabel 2.13	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	30
Tabel 2.14	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker	30
Tabel 2.15	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	31
Tabel 2.16	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker	31
Tabel 2.17	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	32
Tabel 2.18	Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker	32
Tabel 2.19	Perbandingan Realisasi Belanja Lembur	33
Tabel 2.20	Rincian Belanja Lembur per Satker	33
Tabel 2.21	Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	34

Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	34
Tabel 2.23	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	35
Tabel 2.24	Rincian Belanja Barang per Satker	35
Tabel 2.25	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional	36
Tabel 2.26	Rincian Belanja Barang Operasional per Satker	36
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	37
Tabel 2.28	Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker	37
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan	38
Tabel 2.30	Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker	38
Tabel 2.31	Perbandingan Realisasi Belanja Jasa	39
Tabel 2.32	Rincian Belanja Jasa per Satker	39
Tabel 2.33	Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan	40
Tabel 2.34	Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker	40
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41
Tabel 2.36	Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker	41
Tabel 2.37	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	42
Tabel 2.38	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	42
Tabel 2.39	Rincian Belanja Modal per Satker	43
Tabel 2.40	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah	43
Tabel 2.41	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per Satker	43
Tabel 2.42	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44
Tabel 2.43	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	44
Tabel 2.44	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker	45
Tabel 2.45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45
Tabel 2.46	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	45
Tabel 2.47	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	46
Tabel 2.48	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46
Tabel 2.49	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	47
Tabel 2.50	Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker	47

Tabel 2.51	Rincian Capaian Output Prioritas Nasional	48
Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	51
Tabel 3.2	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	52
Tabel 3.3	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker	52
Tabel 3.4	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka	53
Tabel 3.5	Rincian Belanja Dibayar Di Muka per Satker	53
Tabel 3.6	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	53
Tabel 3.7	Rincian Piutang Lainnya per Satker	54
Tabel 3.8	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54
Tabel 3.9	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Satker	55
Tabel 3.10	Rincian Persediaan	56
Tabel 3.11	Rincian Persediaan per Satker	56
Tabel 3.12	Rincian Persediaan Usang per Satker	57
Tabel 3.13	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2023	57
Tabel 3.14	Rincian Tanah Per Satker	58
Tabel 3.15	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	61
Tabel 3.16	Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin	61
Tabel 3.17	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62
Tabel 3.18	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	62
Tabel 3.19	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	64
Tabel 3.20	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker	64
Tabel 3.21	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	65
Tabel 3.22	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	66
Tabel 3.23	Rincian Hibah (Masuk) Gedung dan Bangunan	66
Tabel 3.24	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67
Tabel 3.25	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	67
Tabel 3.26	Rincian Koreksi Nilai Berkurang per Satker	68
Tabel 3.27	Rincian Gedung dan Bangunan per Satker	69
Tabel 3.28	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023	69

Tabel 3.29	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker	70
Tabel 3.30	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	71
Tabel 3.31	Rincian Koreksi Pencatatan per Satker	72
Tabel 3.32	Rincian Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang per Satker	72
Tabel 3.33	Rincian Aset Tetap Lainnya	72
Tabel 3.34	Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker	74
Tabel 3.35	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	75
Tabel 3.36	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	76
Tabel 3.37	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	76
Tabel 3.38	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan	77
Tabel 3.39	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker	77
Tabel 3.40	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	77
Tabel 3.41	Rincian Aset Tak Berwujud per Satker	78
Tabel 3.42	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker	78
Tabel 3.43	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	81
Tabel 3.44	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	81
Tabel 3.45	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	82
Tabel 3.46	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan	82
Tabel 3.47	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker	83
Tabel 3.48	Rincian Aset Lain-Lain per Satker	83
Tabel 3.49	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	84
Tabel 3.50	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	84
Tabel 3.51	Rincian Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar per Satker	85
Tabel 3.52	Rincian Belanja Barang yang masih Harus Dibayar per Satker	85
Tabel 3.53	Rincian SPP atas Pembayaran Dana RPATA per Satker	86
Tabel 3.54	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker	86
Tabel 3.55	Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka	87
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNBPN	88
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Operasional per Satker	89
Tabel 4.3	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	89

Tabel 4.4	Rincian Beban Pegawai per Satker	90
Tabel 4.5	Perbandingan Rincian Beban Persediaan	91
Tabel 4.6	Rincian Beban Persediaan per Satker	91
Tabel 4.7	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	92
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker	92
Tabel 4.9	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	93
Tabel 4.10	Rincian Beban Pemeliharaan per Satker	93
Tabel 4.11	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas	94
Tabel 4.12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker	94
Tabel 4.13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	95
Tabel 4.14	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	95
Tabel 4.15	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	96
Tabel 4.16	Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker	96
Tabel 4.17	Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker	97
Tabel 4.18	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker	97
Tabel 4.19	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	97
Tabel 4.20	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	98
Tabel 4.21	Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang per Satker	98
Tabel 5.1	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	99
Tabel 5.2	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	101
Tabel 5.3	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker	102
Tabel 5.4	Rincian Nilai Koreksi Lain-Lain	102
Tabel 5.5	Rincian Nilai Koreksi Lain-Lain per Satker	103
Tabel 5.6	Rincian Transaksi Antar Entitas	103
Tabel 5.7	Rincian Transfer Keluar per Satker	104
Tabel 5.8	Rincian Transfer Masuk per Satker	104
Tabel 6.1	Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015	108
Tabel 6.2	Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2023	110
Tabel 6.3	Perbandingan Rincian Pencatatan Aset dengan Dokumen Sumber dan Cek Fisik di Lapangan	111



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

Nomor : 3363/B-KU.04/SD/K/2024 Jakarta, Mei 2024  
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Representasi Tertulis Laporan  
Keuangan Badan Kepegawaian Negara  
Tahun 2023

**Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Gatot Subroto Kav.31, Jakarta 10210**

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Badan Kepegawaian Negara memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Badan Kepegawaian Negara telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 *Audited* sebagai asersi final Badan Kepegawaian Negara.

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryono Dwi Putranto

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA' at the top and 'REPUBLIC INDONESIA' at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Haryomo Dwi Putranto

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26.260.135.552,00 atau mencapai 135,39 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp19.396.526.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.028.677.308.609,00 atau mencapai 95,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.079.227.170.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.229.275.189.188,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.975.618.933,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.196.392.171.203,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp22.907.399.052,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp20.725.322.831,00 dan Rp3.208.549.866.357,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.670.868.321,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.000.011.651.965,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp976.340.783.644,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.235.842.916,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp975.104.940.728,00.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.173.325.597.443,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp975.104.940.728,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp3.488.126.484,00) dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp1.013.817.336.126,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.208.549.866.357,00.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
<b>I Pendapatan Perpajakan</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
1. Pajak Dalam Negeri		-	-	0.00	-
2. Pajak Perdagangan Internasional		-	-	0.00	-
<b>II Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>B.1</b>	<b>19,396,526,000.00</b>	<b>26,260,135,552.00</b>	<b>135.39</b>	<b>21,880,244,350.00</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-	0.00	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		-	-	0.00	-
3. Pendapatan BLU		-	-	0.00	-
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	19,396,526,000.00	26,260,135,552.00	135.39	21,880,244,350.00
<b>III Pendapatan Hibah</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		<b>19,396,526,000.00</b>	<b>26,260,135,552.00</b>	<b>135.39</b>	<b>21,880,244,350.00</b>
<b>B BELANJA NEGARA</b>					
<b>I Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>B.2</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>1,028,677,308,609.00</b>	<b>95.32</b>	<b>628,062,099,547.00</b>
1. Belanja Pegawai	B.3	356,489,232,000.00	346,866,997,060.00	97.30	325,007,563,078.00
2. Belanja Barang	B.4	619,400,961,000.00	578,789,169,324.00	93.44	241,799,619,534.00
3. Belanja Modal	B.5	103,336,977,000.00	103,021,142,225.00	99.69	61,254,916,935.00
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		-	-	0.00	-
5. Belanja Subsidi		-	-	0.00	-
6. Belanja Hibah		-	-	0.00	-
7. Belanja Bantuan Sosial		-	-	0.00	-
8. Belanja Lain-lain		-	-	0.00	-
<b>II Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
<b>1. Transfer ke Daerah</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
<b>a. Dana Perimbangan</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
<b>1. Dana Transfer Umum</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
a. Dana Bagi Hasil		-	-	0.00	-
b. Dana Alokasi Umum		-	-	0.00	-
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		-	-	0.00	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		-	-	0.00	-

URAIAN	CAT	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
b. Dana Insentif Daerah		-	-	0.00	-
c. Dana Keistimewaan DIY		-	-	0.00	-
d. Dana Otonomi Khusus		-	-	0.00	-
2. Dana Desa		-	-	0.00	-
3. Hibah Kepada Daerah		-	-	0.00	-
<b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>		<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>1,028,677,308,609.00</b>	<b>95.32</b>	<b>628,062,099,547.00</b>
C PEMBIAYAAN		-	-	0.00	-

Jakarta, Mei 2024

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## II. NERACA


**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	1.00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	4,587,816.00	823,727,649.00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.4	131,199,742.00	63,196,307.00
Piutang Bukan Pajak	C.5	2,747,393,181.00	8,102,750.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(13,736,966.00)	(33,755.00)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8		
Persediaan	C.9	7,106,175,160.00	7,837,731,684.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>9,975,618,933.00</b>	<b>8,732,724,636.00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.10	2,330,666,524,668.00	2,322,022,352,128.00
Peralatan dan Mesin	C.11	704,398,035,892.00	644,039,889,022.00
Gedung dan Bangunan	C.12	868,849,348,970.00	859,028,655,212.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	24,716,999,940.00	24,589,544,940.00
Aset Tetap Lainnya	C.14	13,874,987,099.00	19,850,308,423.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	168,877,064.00	160,452,975.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(746,282,602,430.00)	(703,556,040,854.00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>3,196,392,171,203.00</b>	<b>3,166,135,161,846.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.17	125,741,319,487.00	142,021,610,016.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.18	21,071,862,270.00	-
Aset Lain-Lain	C.19	21,362,783,827.00	12,659,761,686.00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20	(145,268,566,532.00)	(151,280,443,054.00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>22,907,399,052.00</b>	<b>3,400,928,648.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3,229,275,189,188.00</b>	<b>3,178,268,815,130.00</b>

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	19,629,558,217.00	4,023,347,005.00
Pendapatan Diterima di Muka	C.22	1,091,528,298.00	914,314,432.00
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	1.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	4,236,316.00	5,556,249.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>20,725,322,831.00</b>	<b>4,943,217,687.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>20,725,322,831.00</b>	<b>4,943,217,687.00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.25	3,208,549,866,357.00	3,173,325,597,443.00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>3,208,549,866,357.00</b>	<b>3,173,325,597,443.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3,229,275,189,188.00</b>	<b>3,178,268,815,130.00</b>

Jakarta, Mei 2024  
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Harvomo Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

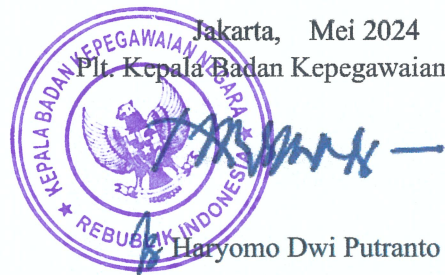
#### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	23,670,868,321.00	18,717,242,822.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>23,670,868,321.00</b>	<b>18,717,242,822.00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	345,122,172,386.00	325,097,041,001.00
Beban Persediaan	D.3	7,953,984,101.00	11,376,993,028.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	436,964,717,186.00	136,707,875,959.00
Beban Pemeliharaan	D.5	27,841,739,788.00	25,634,007,494.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	104,054,816,105.00	67,929,757,287.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	78,060,519,188.00	73,379,526,292.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	13,703,211.00	33,755.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1,000,011,651,965.00</b>	<b>640,125,234,816.00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(976,340,783,644.00)</b>	<b>(621,407,991,994.00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.9	547,206,678.00	496,024,925.00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		688,636,238.00	4,292,772,156.00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>1,235,842,916.00</b>	<b>4,788,797,081.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(975,104,940,728.00)</b>	<b>(616,619,194,913.00)</b>

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(975,104,940,728.00)</b>	<b>(616,619,194,913.00)</b>

Jakarta, Mei 2024  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto


Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
EKUITAS AWAL	E.1	3,173,325,597,443.00	3,166,883,637,818.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(975,104,940,728.00)	(616,619,194,913.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.4	(3,488,126,484.00)	(1,751,032,969.00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	433,260.00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(4,209,626,661.00)	(469,216,910.00)
Lain-Lain	E.4.6	721,500,177.00	(1,282,249,319.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1,013,817,336,126.00	624,812,187,507.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		35,224,268,914.00	6,441,959,625.00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>3,208,549,866,357.00</b>	<b>3,173,325,597,443.00</b>

Jakarta, Mei 2024  
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
  
 Haryono Dwi Putranto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BKN berkomitmen dengan visi “**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, BKN memiliki 5 (lima) pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 47 menyebutkan BKN memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun.
3. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Sedangkan dalam lingkup tugas, BKN bertugas:

1. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN.
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah.
3. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian.
4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.

5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN.
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN.
7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN dalam bentuk:
  - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
  - b. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dalam bentuk:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dalam bentuk Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN dalam bentuk Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi (SI) ASN.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti.
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam bentuk:
  - a. Indeks Profesionalitas ASN BKN,
  - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKN,
  - c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN,
  - d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan
  - e. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada (SI) ASN.
2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.
3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.
5. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional.
6. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Pakaian Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
7. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
8. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Logo Badan Kepegawaian Negara.
9. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.
11. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Bidang Kepegawaian.
12. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Soal Seleksi Kompetensi Teknis Bagi Calon ASN serta Pengintegrasian ke dalam Sistem CAT BKN.
13. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN.
14. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) berfungsi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang menginformasikan terkait data aset dan persediaan. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan BKN Tahun Anggaran 2023 ini memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar sebesar Rp1.079.227.170.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp763.458.322.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp315.768.848.000,00.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbangpeg ASN).

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada SAP serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BKN adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

#### **1. Pendapatan- LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

## 2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

## 3. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

## 4. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

## 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

### a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas/umur

piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pada akhir tahun periode pelaporan nilai persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang

secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 3) Dana yang dibatasi penggunaannya, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan dan disajikan sebesar dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan pada batas akhir pengajuan tagihan.

**Kewajiban**

**6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

*Pengungkapan Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19*

**A.6. Pengungkapan Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19**

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, BKN yang memiliki anggaran sebesar Rp1.079.227.170.000,00 mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.015.532.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp21.400.000,00;
2. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp994.132.000,00.

Adapun rincian atas alokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19*

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat BKN	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	21.400.000,00
		Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	370.095.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	49.580.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	78.942.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	98.721.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	36.915.000,00

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	85.754.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	34.588.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	81.060.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	24.783.000,00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	47.639.000,00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	10.184.000,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	66.162.000,00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	5.130.000,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	4.579.000,00
<b>Total</b>			<b>1.015.532.000,00</b>

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023 dan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, BKN sudah tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Triwulan III Tahun 2023.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, BKN telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>			
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,015,590,000.00	19,396,526,000.00	4,380,936,000.00
Penerimaan Hibah	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>15,015,590,000.00</b>	<b>19,396,526,000.00</b>	<b>4,380,936,000.00</b>
<b>BELANJA NEGARA</b>			
Belanja Pemerintah Pusat	608,372,344,000.00	1,079,227,170,000.00	470,854,826,000.00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>	<b>608,372,344,000.00</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>470,854,826,000.00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu Belanja Barang sebesar Rp420.783.728.000,00 terdiri atas kenaikan pada anggaran Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas. Kenaikan atas Belanja Pemerintah Pusat tersebut dikarenakan adanya penambahan pagu untuk Pengadaan Seleksi CASN. Penambahan pagu Belanja Modal sebesar Rp60.983.264.000,00 terdiri atas kenaikan pada anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	
Belanja Pegawai	367,401,398,000.00	356,489,232,000.00	(10,912,166,000.00)
Belanja Barang	198,617,233,000.00	619,400,961,000.00	420,783,728,000.00
Belanja Modal	42,353,713,000.00	103,336,977,000.00	60,983,264,000.00
<b>Total Belanja</b>	<b>608,372,344,000.00</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>470,854,826,000.00</b>

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	50,422,933,000.00	521,043,542,000.00
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	547,053,025,000.00	543,957,730,000.00
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	9,102,066,000.00	10,956,694,000.00
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	1,794,320,000.00	3,269,204,000.00
<b>Total Belanja</b>	<b>608,372,344,000.00</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp26.260.135.552,-

### B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BKN berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada TA 2023 adalah sebesar Rp26.260.135.552,00 atau mencapai 135,39% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp19.396.526.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1,956,535,000.00	2,944,989,133.00	150.52
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	432,110,000.00	432,110,000.00	100.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	17,007,881,000.00	18,061,139,000.00	106.19
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	6,000,000.00	0.00
Pendapatan Denda	-	2,862,057,347.00	0.00
Pendapatan Lain - lain	-	1,953,840,072.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>19,396,526,000.00</b>	<b>26,260,135,552.00</b>	<b>135.39</b>

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp26.260.135.552,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp 2.944.989.133,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp4.738.508,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas kekurangan pelepasan tanah di Kantor Regional II BKN Surabaya. Terdapat kesalahan pada saat pembuatan kode billing yang seharusnya dibuat oleh Bendahara pada Satker Kantor Regional II BKN Surabaya karena seharusnya menjadi pendapatan pada satker tersebut, akan tetapi kode billing dibuat oleh Bendahara Penerimaan pada Satker Kantor Pusat BKN.
  - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp509.122.616,00 yang berasal dari:
    - 1) Kantor Pusat BKN sebesar Rp 7.220.000,00 merupakan penjualan berupa 1 paket barang inventaris kantor sesuai dengan Risalah Lelang No.313/28/2023, tgl 20 Juni 2023;
    - 2) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp58.800.000,00 merupakan penjualan berupa 1 paket barang inventaris kantor sesuai dengan Risalah Lelang No. 873/42/2023, tgl 20 November 2023;
    - 3) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp250.161.500,00 merupakan penjualan yang terdiri dari:
      - a) 4 unit barang bergerak berupa mobil sebesar Rp238.401.500,00 sesuai dengan Risalah Lelang No.115/30/2023, tgl 20 Januari 2023; dan
      - b) 1 paket peralatan dan mesin sebesar Rp11.760.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang No.2282/30/2023, tgl 31 Oktober 2023.
    - 4) Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp19.676.550,00 merupakan penjualan yang terdiri dari:
      - a) 1 paket peralatan kantor terdiri dari 2 UPS sebesar Rp5.058.250,00 sesuai dengan Risalah Lelang No. 541/28/2023, tgl 17 Oktober 2023; dan
      - b) 1 paket barang inventaris kantor sebesar Rp14.618.300,00 sesuai dengan Risalah Lelang No. 542/28/2023, tgl 17 Oktober 2023;
    - 5) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp51.334.567,00 merupakan penjualan yang terdiri dari:
      - a) 1 paket barang inventaris kantor sebesar Rp45.600.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang No.1045/04/2023, tgl 09 Agustus 2023;
      - b) 4 unit barang bergerak berupa kendaraan roda 2 sebesar Rp4.500.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang No.1245/04/2023, tgl 12 September 2023; dan
      - c) 1 paket BMN terdiri dari 1 buah UPS dan 1 buah Router sebesar Rp1.234.567,00 sesuai dengan Risalah Lelang No.2044/04/2023, tgl 18 Desember 2023.

- 6) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp13.999.999,00 merupakan penjualan berupa 1 paket barang inventaris kantor sesuai dengan Risalah Lelang No.464/58/2023, tgl 14 Agustus 2023;
  - 7) Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp71.100.000,00 merupakan penjualan berupa 1 paket kendaraan yang terdiri atas 1 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua sesuai dengan Risalah Lelang No. 296/81/2023, tgl 21 September 2023;
  - 8) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp26.330.000,00 merupakan penjualan berupa 1 paket barang inventaris kantor sesuai dengan Risalah Lelang No.1093/10/2023, tgl 15 Desember 2023;
  - 9) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp10.500.000,00 merupakan penjualan berupa 1 paket barang inventaris kantor sebanyak 196 unit dan 1 mesin *foto copy* sesuai dengan Risalah Lelang No.2191/32/2023, tgl 01 November 2023.
- c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp54.385.996,00 yang berasal dari:
- 1) Kantor Pusat BKN sebesar Rp12.009.999,00 merupakan hasil lelang dari 1 paket barang inventaris kantor, 2 buah lift, 1 buah pompa air dan 1 buah *stationery water pump* sesuai dengan Risalah Lelang No.648/28/2023, tgl 29 November 2023;
  - 2) Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp26.111.999,00 merupakan hasil lelang dari 1 paket peralatan dan mesin berupa barang inventaris kantor sesuai dengan Risalah Lelang No.663/46/2023, tgl 29 Mei 2023;
  - 3) Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp16.263.998,00 merupakan hasil lelang yang terdiri dari:
    - a) 1 paket BMN berupa inventaris kantor di Kanreg X BKN Denpasar sebesar Rp14.599.999,00 sesuai dengan Risalah Lelang No. 1159/65/2023, tgl 2 November 2023; dan
    - b) 1 paket BMN berupa peralatan dan inventaris kantor (UPT Mataram) sebesar Rp1.663.999,00 sesuai dengan Risalah Lelang No. 471/67/2023, tgl 3 November 2023.
- d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.098.442.013,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara, rumah dinas pegawai, maupun ruangan kantor yang berasal dari:

Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	717,799,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	52,244,146.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8,473,516.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	14,298,568.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6,228,751.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	41,651,955.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	37,166,013.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	22,305,944.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	15,383,292.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	39,358,050.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	36,910,796.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	63,667,400.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	24,058,890.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	18,895,692.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1,098,442,013.00</b>

- e. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp1.278.300.000,00 berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp432.110.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN yang berasal dari pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp18.061.139.000,00 yang berasal dari:
  - a. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp3.133.238.000,00; dan
  - b. Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp14.927.901.000,00.
4. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp6.000.000,00 berasal dari Kantor Regional VI BKN Medan berupa Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri atas penetapan TP/TGR terhadap laporan barang hilang berupa 1 unit sepeda motor dengan NUP 4, BK 4864 K dengan SK No 528 Tahun 2023 Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara.

5. Pendapatan Denda sebesar Rp2.862.057.347,00 yang berasal dari:
  - a. Kantor Pusat BKN sebesar Rp2.856.251.847,00 berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah atas keterlambatan pekerjaan dari 1 kontrak pengadaan UPS, 13 kontrak pengadaan jasa pendukung penyelenggaraan seleksi CASN, dan 1 kontrak pengadaan PAC tahap 2; dan
  - b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp5.805.500,00 berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah atas keterlambatan pekerjaan dari renovasi Ruang Pendukung CAT Lantai 2.
6. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp1.953.840.072,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp1.071.208.630,00 yang berasal dari:

*Tabel 2.6 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker*

*(Dalam Rupiah)*

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	400,892,434.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	155,804,050.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	77,760,866.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	6,473,887.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	26,105,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,381,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8,150,470.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	8,921,200.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	211,517,639.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	245.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	148,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,424,750.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	316,350.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	108,000,834.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	60,311,905.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,071,208,630.00</b>

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp833.910.371,00 yang berasal dari:

Tabel 2.7 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	229,568,527.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5,408,000.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	231,675,858.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	261,699,435.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	5,565,000.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	44,461,221.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	13,852,409.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,800,000.00
9	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	11,808,396.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	27,071,525.00
	<b>Jumlah</b>	<b>833,910,371.00</b>

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Sebesar Rp40.923.571,00 yang berasal dari:

Tabel 2.8 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	8,003,825.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,741,306.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	4,300,631.00
4	Kantor Regional XIV Manokwari	7,946,877.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	12,930,932.00
	<b>Jumlah</b>	<b>40,923,571.00</b>

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pensiunan PNS sebesar Rp7.797.500,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 terdapat kenaikan sebesar 20,02% dikarenakan BKN dapat melaksanakan kembali program-program yang telah direncanakan dengan optimal sehingga terdapat kenaikan pendapatan pada Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar 9,09% yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BKN dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	2,944,989,133.00	2,287,190,591.00	28.76
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	432,110,000.00	589,125,000.00	(26.65)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	18,061,139,000.00	16,556,156,000.00	9.09
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	6,000,000.00	-	0.00
Pendapatan Denda	2,862,057,347.00	-	0.00
Pendapatan Lain - lain	1,953,840,072.00	2,447,772,759.00	(20.18)
<b>Jumlah</b>	<b>26,260,135,552.00</b>	<b>21,880,244,350.00</b>	<b>20.02</b>

Realisasi Belanja  
Rp1.028.677.308.609

## B.2 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat BKN pada TA 2023 sebesar Rp1.028.677.308.609,00 atau 95,32% dari anggaran belanja sebesar Rp1.079.227.170.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat pada TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	356,489,232,000.00	347,228,115,192.00	97.40
Belanja Barang	619,400,961,000.00	579,769,526,524.00	93.60
Belanja Modal	103,336,977,000.00	103,021,142,225.00	99.69
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>1,030,018,783,941.00</b>	<b>95.44</b>
Pengembalian	-	(1,341,475,332.00)	
<b>Jumlah</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>1,028,677,308,609.00</b>	<b>95.32</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan program pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	521,043,542,000.00	482,730,832,504.00	92.65
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	543,957,730,000.00	532,509,497,934.00	97.90
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	10,956,694,000.00	10,212,111,131.00	93.20
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	3,269,204,000.00	3,224,867,040.00	98.64
<b>Total Belanja</b>	<b>1,079,227,170,000.00</b>	<b>1,028,677,308,609.00</b>	<b>95.32</b>

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 63,79% dibandingkan TA 2022. Kenaikan realisasi belanja yang sangat signifikan terdapat pada Belanja Barang sebesar 139,37% dan Belanja Modal sebesar 68,18%. Hal ini dikarenakan pada TA 2023, BKN mendapatkan anggaran tambahan untuk pengadaan seleksi CASN dan PPPK yang diterima pada bulan Desember 2023.

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	346,866,997,060.00	325,007,563,078.00	6.73
Belanja Barang	578,789,169,324.00	241,799,619,534.00	139.37
Belanja Modal	103,021,142,225.00	61,254,916,935.00	68.18
<b>Jumlah</b>	<b>1,028,677,308,609.00</b>	<b>628,062,099,547.00</b>	<b>63.79</b>

Belanja Pegawai  
Rp346.866.997.060,-

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp346.866.997.060,00 dan Rp325.007.563.078,00 atau terjadi kenaikan sebesar 6,73%. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya kenaikan terhadap Realisasi Belanja Lembur sebesar 2,34% dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito sebesar 20,20% seiring dengan penambahan pegawai BKN. Adapun kenaikan realisasi belanja yang cukup signifikan pada tunjangan khusus dan pegawai transito disebabkan adanya perubahan jabatan pegawai ke jabatan fungsional. Selain itu terdapat juga akun baru yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang baru ada pada tahun 2023 ini.

Tabel 2.13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	168,628,818,868.00	178,725,799,787.00	(5.65)
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	714,869,476.00	-	0.00
5122	Belanja Lembur	1,222,348,000.00	1,194,387,000.00	2.34
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transito	176,662,078,848.00	146,976,013,943.00	20.20
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>347,228,115,192.00</b>	<b>326,896,200,730.00</b>	<b>6.22</b>
	Pengembalian Belanja Pegawai	(361,118,132.00)	(1,888,637,652.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>346,866,997,060.00</b>	<b>325,007,563,078.00</b>	<b>6.73</b>

Adapun Rincian Realisasi Belanja Pegawai BKN TA 2023 sebesar Rp346.866.997.060,00 berasal dari:

Tabel 2.14 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	246,672,623,037.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10,536,682,617.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8,549,125,710.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8,389,089,358.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	9,404,088,663.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	5,936,142,560.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,016,174,476.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	6,349,551,444.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,573,667,072.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4,884,967,157.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,382,313,659.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,194,693,891.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	6,921,892,682.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,438,494,898.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,476,399,260.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,141,090,576.00
	<b>Jumlah</b>	<b>346,866,997,060.00</b>

Belanja Gaji dan  
Tunjangan PNS  
Rp168.310.808.686,-

### B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp168.310.808.686,00 dan Rp177.028.650.530,00 atau terjadi penurunan sebesar 4,92%.

Tabel 2.15 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	112,975,620,150.00	118,313,782,556.00	(4.51)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,860,514.00	1,903,016.00	(2.23)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,102,996,726.00	7,509,867,022.00	(5.42)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,830,762,192.00	1,860,449,294.00	(1.60)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,364,660,000.00	7,205,970,000.00	(39.43)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,938,571,200.00	14,024,288,000.00	13.65
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	705,477,476.00	835,919,099.00	(15.60)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,803,310,610.00	5,969,361,800.00	(2.78)
511129	Belanja Uang Makan PNS	17,145,180,000.00	20,042,414,000.00	(14.46)
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	696,950,000.00	624,450,000.00	11.61
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,063,430,000.00	2,337,395,000.00	(11.72)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>168,628,818,868.00</b>	<b>178,725,799,787.00</b>	<b>(5.65)</b>
	Pengembalian Belanja	(318,010,182.00)	(1,697,149,257.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>168,310,808,686.00</b>	<b>177,028,650,530.00</b>	<b>(4.92)</b>

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2023 sebesar Rp168.310.808.686,00 berasal dari:

Tabel 2.16 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	69,464,644,788.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10,365,837,879.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8,351,264,430.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8,340,637,063.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	9,306,103,663.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	5,889,253,560.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,010,414,476.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	6,304,695,164.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,571,151,072.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4,884,967,157.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,330,682,659.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,119,777,539.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	6,771,120,592.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,338,851,808.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,129,734,260.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,131,672,576.00
	<b>Jumlah</b>	<b>168,310,808,686.00</b>

Belanja Gaji dan  
Tunjangan PPPK  
Rp714.869.476,-

### B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp714.869.476,00 dan Rp0,00.

Tabel 2.17 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	478,122,400.00	-	0.00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,006.00	-	0.00
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	29,478,610.00	-	0.00
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	5,704,960.00	-	0.00
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	67,380,000.00	-	0.00
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	27,157,500.00	-	0.00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	107,015,000.00	-	0.00
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	-	0.00
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>714,869,476.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>714,869,476.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2023 sebesar Rp714.869.476,00 berasal dari:

Tabel 2.18 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	491,549,351.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	65,119,738.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	18,708,280.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	36,982,295.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	18,183,280.00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	6,839,352.00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	38,216,090.00
8	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	39,271,090.00
	<b>Jumlah</b>	<b>714,869,476.00</b>

Belanja Lembur  
Rp1.222.272.000,-

### B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.222.272.000,00 dan Rp1.194.387.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar 2,33 %.

Tabel 2.19 Perbandingan Realisasi Belanja Lembur

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
512211	Belanja Uang Lembur	1,222,348,000.00	1,194,387,000.00	2.34
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,222,348,000.00</b>	<b>1,194,387,000.00</b>	<b>2.34</b>
	Pengembalian Belanja	(76,000.00)	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,222,272,000.00</b>	<b>1,194,387,000.00</b>	<b>2.33</b>

Realisasi Belanja Uang Lembur pada TA 2023 sebesar Rp1.222.272.000,00 berasal dari:

Tabel 2.20 Rincian Belanja Lembur per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	97,382,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	105,725,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	179,153,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	11,470,000.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	97,985,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	46,889,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	5,760,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	26,673,000.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,516,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	51,631,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	68,077,000.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	112,556,000.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	60,372,000.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	346,665,000.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	9,418,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,222,272,000.00</b>

Belanja Tunjangan  
Khusus dan Pegawai  
Transito  
Rp176.619.046.898,-

### B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp176.619.046.898,00 dan Rp146.784.525.548,00 atau terjadi kenaikan sebesar 20,33% dikarenakan adanya penambahan pegawai CASN. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) BKN hanya ada pada Kantor Pusat BKN.

Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito  
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	176,141,564,636.00	146,976,013,943.00	19.84
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPK)	520,514,212.00	-	0.00
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>176,662,078,848.00</b>	<b>146,976,013,943.00</b>	<b>20.20</b>
	Pengembalian Belanja	(43,031,950.00)	(191,488,395.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>176,619,046,898.00</b>	<b>146,784,525,548.00</b>	<b>20.33</b>

Belanja Barang  
Rp578.789.169.324,-

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp578.789.169.324,00 dan Rp241.799.619.534,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 139,37%. Kenaikan Realisasi Belanja Barang disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada Belanja Jasa sebesar 445,07% dan Belanja Barang Non Operasional sebesar 81,78% karena pada bulan Desember 2023, BKN mendapatkan anggaran tambahan untuk pengadaan seleksi CASN dan PPPK TA 2023.

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
5211	Belanja Barang Operasional	51,516,123,184.00	51,145,472,878.00	0.72
5212	Belanja Barang Non Operasional	41,577,813,115.00	22,861,837,522.00	81.87
5218	Belanja Barang Persediaan	8,334,429,662.00	10,476,557,633.00	(20.45)
5221	Belanja Jasa	343,819,052,395.00	63,077,977,971.00	445.07
5231	Belanja Pemeliharaan	27,396,502,150.00	25,148,911,726.00	8.94
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	106,542,242,572.00	69,148,562,712.00	54.08
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	583,363,446.00	255,700,628.00	0.00
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>579,769,526,524.00</b>	<b>242,115,021,070.00</b>	<b>139.46</b>
	Pengembalian Belanja	(980,357,200.00)	(315,401,536.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>578,789,169,324.00</b>	<b>241,799,619,534.00</b>	<b>139.37</b>

BKN mengalokasikan Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.015.532.000,00. Anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp995.257.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23 Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19  
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN (%)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	21,400,000.00	21,317,550.00	99.61
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	994,132,000.00	973,940,449.00	97.97
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,015,532,000.00</b>	<b>995,257,999.00</b>	<b>98.00</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,015,532,000.00</b>	<b>995,257,999.00</b>	<b>98.00</b>

Adapun Realisasi Belanja Barang BKN pada TA 2023 sebesar Rp578.789.169.324,00 berasal dari:

Tabel 2.24 Rincian Belanja Barang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	383,802,905,956.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	14,993,947,762.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	19,892,942,774.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	14,807,293,442.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	23,163,464,071.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	10,947,680,348.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	12,345,236,785.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	14,730,730,812.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	12,994,750,089.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	6,277,378,000.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	13,576,511,347.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	10,826,087,420.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	13,058,149,702.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	7,032,541,705.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	6,878,966,548.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	13,460,582,563.00
	<b>Jumlah</b>	<b>578,789,169,324.00</b>

Belanja Barang  
Operasional  
Rp51.510.523.125,-

#### B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.510.523.125,00 dan Rp51.132.842.604,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,74%. Walaupun terdapat empat akun yang mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan turunnya realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar 100,00% dan Belanja

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar 63,15%. Penurunan tersebut dikarenakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023 sehingga sudah tidak ada penganggaran dan realisasi untuk penanganan COVID-19 dan juga berkurangnya frekuensi pengiriman surat dan barang melalui jasa pengiriman.

Tabel 2.25 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	46,135,321,221.00	45,199,375,049.00	2.07
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	664,770,400.00	633,078,155.00	5.01
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	428,633,930.00	1,163,322,751.00	(63.15)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,388,061,190.00	3,287,578,000.00	3.06
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	899,336,443.00	800,502,233.00	12.35
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	61,616,690.00	(100.00)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>51,516,123,184.00</b>	<b>51,145,472,878.00</b>	<b>0.72</b>
	Pengembalian Belanja	(5,600,059.00)	(12,630,274.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>51,510,523,125.00</b>	<b>51,132,842,604.00</b>	<b>0.74</b>

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 sebesar Rp51.510.523.125,00 berasal dari:

Tabel 2.26 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	15,267,118,771.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2,587,440,446.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,132,878,761.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	705,366,599.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,893,076,596.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	2,487,335,735.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,927,743,284.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,659,354,401.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,948,641,481.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,671,245,481.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,537,152,601.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,511,336,114.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,313,558,394.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	888,736,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1,333,857,177.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,645,681,284.00
	<b>Jumlah</b>	<b>51,510,523,125.00</b>

Belanja Barang Non  
Operasional  
Rp41.527.745.763,-

#### B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.527.745.763,00 dan Rp22.859.864.522,00 atau mengalami kenaikan sebesar 81,66%. Kenaikan yang sangat signifikan pada Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar 1.745,77% dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar 212,84%.

Tabel 2.27 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
521211	Belanja Bahan	20,219,950,268.00	15,444,111,426.00	30.92
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,120,896,000.00	5,472,814,000.00	212.84
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,272,011,000.00	1,578,826,600.00	(19.43)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,930,551,347.00	158,771,160.00	1745.77
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	41,828,876.00	(100.00)
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	34,404,500.00	165,485,460.00	(79.21)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>41,577,813,115.00</b>	<b>22,861,837,522.00</b>	<b>81.87</b>
	Pengembalian Belanja	(50,067,352.00)	(1,973,000.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>41,527,745,763.00</b>	<b>22,859,864,522.00</b>	<b>81.66</b>

Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2023 sebesar Rp41.527.745.763,00 berasal dari:

Tabel 2.28 Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	18,231,401,289.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2,222,605,507.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,595,111,378.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	981,231,250.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,373,029,859.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	886,239,740.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,015,370,628.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,778,468,215.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,224,333,684.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	341,032,930.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,276,388,263.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,251,574,920.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,145,171,630.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1,123,257,400.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	447,473,770.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,635,055,300.00
	<b>Jumlah</b>	<b>41,527,745,763.00</b>

Belanja Barang  
Persediaan  
Rp8.334.429.662,-

### B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.334.429.662,00 dan Rp10.476.557.633,00 atau mengalami penurunan sebesar 20,45%. Penurunan yang sangat signifikan pada Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar 83,81% dikarenakan sudah tidak ada penganggaran dan realisasi untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023.

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,250,080,112.00	10,279,563,983.00	(19.74)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	63,032,000.00	65,363,000.00	(3.57)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	21,317,550.00	131,630,650.00	(83.81)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8,334,429,662.00</b>	<b>10,476,557,633.00</b>	<b>(20.45)</b>
	Pengembalian Belanja	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,334,429,662.00</b>	<b>10,476,557,633.00</b>	<b>(20.45)</b>

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 sebesar Rp8.334.429.662,00 berasal dari:

Tabel 2.30 Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	3,461,298,908.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	345,601,301.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	500,107,526.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	297,613,116.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	455,084,707.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	306,575,705.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	342,121,303.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	355,877,195.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	172,689,597.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	411,244,025.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	80,192,818.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	432,686,160.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	216,711,042.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	416,324,700.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	151,010,688.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	389,290,871.00
	<b>Jumlah</b>	<b>8,334,429,662.00</b>

Belanja Jasa

Rp343.813.617.415,-

**B.4.4 Belanja Jasa**

Realisasi Belanja Jasa pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp343.813.617.415,00 dan Rp63.077.967.971,00 atau mengalami kenaikan sebesar 445,06%. Kenaikan yang sangat signifikan terdapat pada Belanja Sewa sebesar 853,66% dikarenakan adanya kegiatan seleksi sekolah kedinasan dan pengadaan seleksi CASN TA 2023 yang memerlukan belanja sewa untuk sarana dan prasarana.

Tabel 2.31 Perbandingan Realisasi Belanja Jasa

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
522111	Belanja Langganan Listrik	18,243,917,685.00	15,175,004,630.00	20.22
522112	Belanja Langganan Telepon	435,296,388.00	453,608,848.00	(4.04)
522113	Belanja Langganan Air	427,903,228.00	582,253,275.00	(26.51)
522131	Belanja Jasa Konsultan	4,042,894,600.00	3,563,865,655.00	13.44
522141	Belanja Sewa	309,720,853,032.00	32,477,073,220.00	853.66
522151	Belanja Jasa Profesi	2,245,284,550.00	3,336,220,000.00	(32.70)
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,728,962,463.00	5,328,423,605.00	45.05
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	973,940,449.00	2,161,528,738.00	(54.94)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>343,819,052,395.00</b>	<b>63,077,977,971.00</b>	<b>445.07</b>
	Pengembalian Belanja	(5,434,980.00)	(10,000.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>343,813,617,415.00</b>	<b>63,077,967,971.00</b>	<b>445.06</b>

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 sebesar Rp343.813.617.415,00 berasal dari:

Tabel 2.32 Rincian Belanja Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	282,967,370,415.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4,864,922,246.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	11,593,970,776.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	6,608,316,823.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	5,643,463,070.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,216,039,906.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	5,868,574,451.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	4,951,186,256.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,437,650,673.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	601,947,178.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,221,758,693.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,517,784,827.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3,829,708,368.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1,035,152,831.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1,562,686,077.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,893,084,825.00
	<b>Jumlah</b>	<b>343,813,617,415.00</b>

Belanja  
Pemeliharaan  
Rp27.390.434.048,-

#### B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.390.434.048,00 dan Rp25.143.553.477,00 dengan kenaikan sebesar 8,94%, karena adanya kenaikan signifikan pada belanja pemeliharaan irigasi.

Tabel 2.33 Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,548,048,282.00	9,263,755,459.00	13.86
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	465,123,866.00	232,473,435.00	100.08
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	62,396,955.00	-	0.00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	844,713,722.00	1,104,468,927.00	(23.52)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,504,860,735.00	13,173,024,264.00	2.52
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219,037,308.00	204,754,550.00	6.98
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	24,263,457.00	(38.18)
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	22,881,000.00	4,983,000.00	359.18
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	25,626,164.00	170,682,899.00	(84.99)
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	-	3,000,000.00	(100.00)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,688,814,118.00	967,505,735.00	74.55
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>27,396,502,150.00</b>	<b>25,148,911,726.00</b>	<b>8.94</b>
	Pengembalian Belanja	(6,068,102.00)	(5,358,249.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27,390,434,048.00</b>	<b>25,143,553,477.00</b>	<b>8.94</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp27.390.434.048,00 berasal dari:

Tabel 2.34 Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	14,256,504,889.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	972,005,871.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	572,234,603.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,147,676,884.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,053,778,249.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	933,136,085.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	902,994,289.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	581,518,096.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	786,261,871.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	294,294,221.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,113,014,118.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	935,122,369.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	959,481,127.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	266,729,580.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	782,397,076.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,833,284,720.00
	<b>Jumlah</b>	<b>27,390,434,048.00</b>

Belanja Perjalanan  
Dalam Negeri  
Rp105.629.055.865,-

#### B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp105.629.055.865,00 dan Rp68.853.233.022,00 atau mengalami kenaikan 53,41%. Kenaikan dikarenakan adanya penyelenggaraan kegiatan seleksi CASN dan PPPK yang diselenggarakan di beberapa tilok yang tersebar di seluruh Indonesia

Tabel 2.35 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
524111	Belanja Perjalanan Biasa	83,644,474,115.00	55,393,516,765.00	51.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,533,974,909.00	936,079,079.00	277.53
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,300,947,757.00	6,721,009,380.00	38.39
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,062,845,791.00	6,097,957,488.00	65.02
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>106,542,242,572.00</b>	<b>69,148,562,712.00</b>	<b>54.08</b>
	Pengembalian Belanja	(913,186,707.00)	(295,329,690.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>105,629,055,865.00</b>	<b>68,853,233,022.00</b>	<b>53.41</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 sebesar Rp105.629.055.865,00 berasal dari:

Tabel 2.36 Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	49,035,848,238.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4,001,372,391.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,498,639,730.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5,067,088,770.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	8,745,031,590.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,118,353,177.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,288,432,830.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,404,326,649.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,425,172,783.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,957,614,165.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	5,348,004,854.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	3,177,583,030.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3,593,519,141.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3,302,341,194.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,601,541,760.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,064,185,563.00
	<b>Jumlah</b>	<b>105,629,055,865.00</b>

Belanja Perjalanan  
Luar Negeri  
Rp583.363.446,-

#### B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp583.363.446,00 dan Rp255.700.628,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri BKN merupakan Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri terdapat pada Kantor Pusat BKN. Realisasi belanja perjalanan luar negeri pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 128,23% dibanding TA 2022.

Tabel 2.37 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	583,363,446.00	255,700,628.00	128.14
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>583,363,446.00</b>	<b>255,700,628.00</b>	<b>128.14</b>
	Pengembalian Belanja	-	(100,323.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>583,363,446.00</b>	<b>255,600,305.00</b>	<b>128.23</b>

Belanja Modal  
Rp103.021.142.225,-

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp103.021.142.225,00 dan Rp61.254.916.935,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 68,18% yang disebabkan ada kenaikan signifikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 85,68% dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pengadaan seleksi CASN dan PPPK TA 2023.

Tabel 2.38 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
5311	Belanja Modal Tanah	206,181,000.00	-	0.00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,027,046,618.00	51,177,223,060.00	85.68
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,648,930,847.00	7,984,344,200.00	(29.25)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	632,222,180.00	(100.00)
5361	Belanja Modal Lainnya	2,138,983,760.00	1,462,645,795.00	0.00
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>103,021,142,225.00</b>	<b>61,256,435,235.00</b>	<b>68.18</b>
	Pengembalian	-	(1,518,300.00)	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>103,021,142,225.00</b>	<b>61,254,916,935.00</b>	<b>68.18</b>

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 sebesar Rp103.021.142.225,00 berasal dari:

Tabel 2.39 Rincian Belanja Modal per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	90,806,850,307.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	673,848,032.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	673,758,509.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	179,909,635.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	513,572,340.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	571,966,734.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	869,782,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	964,802,120.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,197,811,451.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,111,935,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	314,076,175.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	199,871,250.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	499,644,186.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	177,258,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,233,901,084.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,032,154,852.00
<b>Jumlah</b>		<b>103,021,142,225.00</b>

Belanja Modal Tanah  
Rp206.181.000,-

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp206.181.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 2.40 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	10,000,000.00	-	0.00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	196,181,000.00	-	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>		<b>206,181,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	Pengembalian	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>206,181,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 sebesar Rp206.181.000,00 berasal dari:

Tabel 3.41 Rincian Belanja Modal Tanah per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional VII BKN Palembang	196,181,000.00
2	Kantor Regional X BKN Denpasar	10,000,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>206,181,000.00</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp95.027.046.618,-

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp95.027.046.618,00 dan Rp51.177.223.060,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 85,68 dibandingkan dengan TA 2022. Hal tersebut disebabkan kenaikan yang signifikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 88,92% karena adanya penambahan anggaran untuk pengadaan seleksi CASN dan PPPK TA 2023.

Tabel 2.42 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94,114,355,350.00	49,817,499,210.00	88.92
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	912,691,268.00	1,359,723,850.00	(32.88)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>95,027,046,618.00</b>	<b>51,177,223,060.00</b>	<b>85.68</b>
	Pengembalian	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>95,027,046,618.00</b>	<b>51,177,223,060.00</b>	<b>85.68</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 sebesar Rp95.027.046.618,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode akun 532111 sebesar Rp94.114.355.350,00, berasal dari:

Tabel 2.43 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	87,746,213,591.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	673,848,032.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	32,948,976.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	90,852,200.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	488,497,840.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	245,112,546.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	718,340,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	82,093,001.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	958,319,769.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	151,742,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	304,076,175.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	199,871,250.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	499,644,186.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	129,558,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	761,601,084.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,031,636,150.00
	<b>Jumlah</b>	<b>94,114,355,350.00</b>

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin dengan kode akun 532121 sebesar Rp912.691.268,00, berasal dari:

Tabel 2.44 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	393,701,460.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	518,989,808.00
	<b>Jumlah</b>	<b>912,691,268.00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp5.648.930.847,-

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.648.930.847,00 dan Rp7.984.344.200,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 29,25% yang disebabkan adanya penurunan realisasi terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar 31,46% dan 28,59%.

Tabel 2.45 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,263,933,579.00	1,843,996,850.00	(31.46)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,384,997,268.00	6,140,347,350.00	(28.59)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,648,930,847.00</b>	<b>7,984,344,200.00</b>	<b>(29.25)</b>
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5,648,930,847.00</b>	<b>7,984,344,200.00</b>	<b>(29.25)</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 sebesar Rp5.648.930.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan kode akun 533111 sebesar Rp1.263.933.579,00 berasal dari:

Tabel 2.46 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	168,877,064.00
2	Kantor Regional VII BKN Palembang	686,528,119.00
3	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	408,528,396.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,263,933,579.00</b>

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan kode akun 533121 sebesar Rp4.384.997.268,00 berasal dari:

Tabel 2.47 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1,831,374,432.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	121,819,725.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	89,057,435.00
4	Kantor Regional IV Makasar	25,074,500.00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	326,854,188.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	151,442,000.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	239,491,682.00
8	Kantor Regional IX Jayapura	960,193,000.00
9	Kantor Regional XIII Banda Aceh	47,700,000.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	591,990,306.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4,384,997,268.00</b>

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0,-

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp630.703.880,00. Pada TA 2023 tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 2.48 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	217,190,800	(100.00)
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	217,022,680	(100.00)
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	198,008,700	(100.00)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>632,222,180.00</b>	<b>(100.00)</b>
	Pengembalian Belanja Modal	-	(1,518,300.00)	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>630,703,880.00</b>	<b>(100.00)</b>

Belanja Modal  
Lainnya  
Rp2.138.983.760,-

### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.138.983.760,00 dan Rp1.462.645.795,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 46,24% dibandingkan dengan TA 2022 dikarenakan adanya renovasi di beberapa kantor yang masih berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.49 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
536111	Belanja Modal Lainnya	191,475,000.00	377,377,800.00	(49.26)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,947,508,760.00	1,085,267,995.00	79.45
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2,138,983,760.00</b>	<b>1,462,645,795.00</b>	<b>46.24</b>
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,138,983,760.00</b>	<b>1,462,645,795.00</b>	<b>46.24</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp2.138.983.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Lainnya dengan kode akun 536111 sebesar Rp191.475.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN.
2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dengan kode akun 536121 sebesar Rp1.947.508.760,00 berasal dari:

Tabel 2.50 Rincian Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	475,208,760.00
2	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1,472,300,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,947,508,760.00</b>

Terdapat kesalahan pembebanan MAK pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang seharusnya menggunakan akun 536111, namun menggunakan akun 536121 yang merupakan Pekerjaan Pembangunan Gedung CAT sebesar Rp974.700.000,00.

Prioritas Nasional

**B.6 PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 BKN memiliki tugas pada **Prioritas Nasional (PN) VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN;
2. Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D;
4. Sistem Informasi Manajemen ASN; dan
5. Penegakan Disiplin ASN.

Pagu Anggaran untuk proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN adalah Rp14.281.550.000,00 dengan Total Realisasi Anggaran hingga TA 2023 sebesar Rp14.137.270.374,00. Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Proyek Prioritas Nasional BKN dalam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51 Rincian Capaian Output Prioritas Nasional

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	% output
1	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi							
	a. Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN (088.01.01.CO.3655.UAB.001)	1,500,000,000.00	1,469,494,968.00	97.97	Sistem Informasi	1	1	100.00
	b. Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (088.01.01.CO.3655.UAC.001)	5,429,600,000.00	5,380,479,949.00	99.10	Orang	60,000	96,760	161.27
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN							
	a. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D	2,851,950,000.00	2,846,111,059.00	99.80	Lembaga	411	580	141.12
3	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem							
	a. Sistem Informasi Manajemen ASN (088.01.01.CO.4847.UAB.001)	3,500,000,000.00	3,451,617,077.00	98.62	Sistem Informasi	1	1	97.10
4	Pengawasan dan Pengendalian NSPK							
	a. Penegakan Disiplin ASN (088.01.01.CO.4848.PBQ.002)	1,000,000,000.00	990,692,421.00	99.07	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
<b>Jumlah</b>		<b>14,281,550,000.00</b>	<b>14,138,395,474.00</b>	<b>99.00</b>				

*Revitalisasi Sistem  
Rekrutmen ASN*

### **B.6.1 Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN**

Tahun 2023 Unit Kerja Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN mendapatkan perintah dari Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN. Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa Program tersebut adalah penting sehingga dimasukkan kedalam Program Prioritas Nasional yaitu Revitalisasi Seleksi CASN. Revitalisasi Seleksi CASN yang akan dilakukan adalah untuk *Entry Level* dengan target 1 sistem (rekrutmen seleksi CASN *entry level*, tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan formasi yang diberikan MenpanRB). Sistem yang dimaksud adalah sistem seleksi yang dapat dilaksanakan secara fleksibel dari segi waktu pelaksanaan, Sistem seleksi yang dimaksud bukan hanya alat tetapi juga metode atau mekanisme yang perlu dilakukan untuk mengganti seleksi SKD yang masif dan serentak menjadi bertahap. Capaian anggaran dari Rincian Output (RO) Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN adalah sebesar 97,97% atau Rp.1469.494.968,00 dari nilai pagu sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

*Pemetaan/Penilaian  
Potensi dan  
Kompetensi ASN*

### **B.6.2 Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 48 mengemban amanat membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta 17 mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Upaya menjalankan amanat tersebut, pada tahun 2023, BKN merencanakan melaksanakan kegiatan prioritas nasional pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi bagi pegawai instansi pusat Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pemindahan Ibukota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur. Indikator Rincian Output program prioritas nasional ini adalah mengukur jumlah pegawai peserta pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan target 60.000 orang dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5.429.600.000,00. Capaian anggaran dari RO Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN adalah sebesar 99,10% atau Rp5.380.479.949,00 dengan capaian kinerja sebesar 161,27%.

*Penerapan Sistem  
Informasi  
Manajemen Kinerja  
Terintegrasi di  
Seluruh K/L/D*

### **B.6.3 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D**

Direktorat Kinerja ASN pada tahun 2023 akan melaksanakan program prioritas nasional berupa Percepatan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D. Program ini dibutuhkan untuk segera dilakukan karena penerapan manajemen kinerja yang ada belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masing-masing Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kinerja yang bersifat mandiri dan karena itu sistem informasi kinerja ASN di setiap Instansi Pemerintah belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, masing-masing instansi belum memiliki sistem informasi kinerja yang terintegrasi dengan database nasional BKN. Hal ini menyebabkan kualitas data kinerja belum optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi manajemen kinerja ASN yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kinerja. Indikator yang diukur pada program ini adalah jumlah instansi yang telah menerapkan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi. Capaian anggaran dari RO Penerapan

Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D adalah sebesar 99,80% atau Rp2.846.111.059,00 dari nilai pagu sebesar Rp2.851.950.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 141,12%.

*Sistem Informasi  
Manajemen ASN*

#### **B.6.4 Sistem Informasi Manajemen ASN**

Dalam rangka menjalankan tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, serta dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, BKN berupaya membangun Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi. Proses ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan Sistem Informasi ASN (SIASN) yang dapat menghimpun dan menghubungkan pengelolaan data kepegawaian yang terstandar secara nasional di dalam database yang dikelola oleh BKN. Capaian anggaran dari RO Penerapan Sistem Informasi Manajemen adalah sebesar 98,62% atau Rp3.451.617.077,00 dari nilai pagu sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 97,10%.

*Penegakan Disiplin  
ASN*

#### **B.6.5 Penegakan Disiplin ASN**

Berbagai dinamika yang berhubungan disiplin pegawai PNS di berbagai instansi, dapat dipotret dari temuan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terkait isu-isu strategis yang berhasil diselesaikan. Beberapa isu-isu kontemporer yang berhasil diidentifikasi antara lain kasus penyalahgunaan wewenang, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Capaian anggaran dari RO Penegakan Disiplin ASN adalah sebesar 99,07% atau Rp990.692.421,00 dari nilai pagu sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Uang Tunai	-	1.00
Uang muka/persekot pada BPP	-	-
Uang di Bank	-	-
Kuitansi UP yg belum SP2D	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>

Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya yang merupakan sisa dari TUP yang belum disetorkan ke Kas Negara. Sisa TUP tersebut baru disetorkan pada 3 Januari 2023 dengan kode NTPN: 4E82E1GAB6LKQ54F (Dokumen pendukung terlampir – pada Lampiran X).

Bendahara Pengeluaran mengelola Kas di rekening bank. Rincian rekening bank yang dikelola oleh masing-masing satker di BKN disajikan pada Lampiran Utama A1.

### Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNBP. Bendahara Penerimaan BKN terdapat pada satker Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Rekening 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

Mekanisme penerimaan PNBP dilakukan dengan penyeteroran langsung ke kas negara dan tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023.

*Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp4.587.816,-*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan setara kas lainnya, merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.587.816,00 dan Rp823.727.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,587,816.00	823,727,649.00
<b>Jumlah</b>	<b>4,587,816.00</b>	<b>823,727,649.00</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp4.587.816,00 berasal dari:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Regional III BKN Bandung	-	823,727,649.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	4,236,316.00	-
3	Kantor Regional XI BKN Manado	351,500.00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4,587,816.00</b>	<b>823,727,649.00</b>

Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp4.587.816,00 terdiri dari:

1. Utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp4.236.316,00 pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Retur atas pembayaran uang makan pegawai sebesar Rp351.500,00 pada tanggal 29 Desember 2023.

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp131.199.742,-*

### C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp131.199.742,00 dan Rp63.196.307,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	9,543,716.00	-
Biaya Langganan Lisensi	121,656,026.00	63,196,307.00
<b>Jumlah</b>	<b>131,199,742.00</b>	<b>63,196,307.00</b>

Adapun rincian Belanja Dibayar di Muka per satker sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Belanja Dibayar di Muka per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	98,559,551.00	54,124,000.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1,552,599.00	1,685,792.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	4,967,742.00	4,675,072.00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	1,215,332.00	1,234,364.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	12,244,031.00	1,477,079.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	242,346.00	-
7	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	9,543,716.00	-
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,874,425.00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>131,199,742.00</b>	<b>63,196,307.00</b>

Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka pada masing-masing satker disajikan pada Lampiran Utama A2.

Piutang Bukan Pajak  
Rp2.747.393.181,-

### C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing adalah sebesar Rp2.747.393.181,00 dan Rp8.102.750,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Piutang PNB	-	8,102,750.00
Piutang Lainnya	2,747,393,181.00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,747,393,181.00</b>	<b>8,102,750.00</b>

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.747.393.181,00 berasal dari piutang lainnya yang merupakan Pengembalian Belanja TA 2023 yang baru disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2024 dan Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2023.

Adapun rincian piutang lainnya per satker sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Piutang Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kantor Pusat BKN	433,473,386.00	-
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,368,040.00	-
Kantor Regional II BKN Surabaya	2,600,000.00	-
Kantor Regional III BKN Bandung	-	8,102,750.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	2,034,084,835.00	-
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,455,000.00	-
Kantor Regional VI BKN Medan	1,191,200.00	-
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	45,450,641.00	-
Kantor Regional IX BKN Jayapura	96,691,976.00	-
Kantor Regional X BKN Denpasar	30,799,200.00	-
Kantor Regional XI BKN Manado	25,194,262.00	-
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,681,500.00	-
Kantor Regional XIII BKN Aceh	13,643,600.00	-
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	6,688,350.00	-
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	53,071,191.00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,747,393,181.00</b>	<b>8,102,750.00</b>

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak  
Rp13.736.966,-

### C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp13.736.966,00 dan Rp33.755,00. Adapun rincian atas penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	2,747,393,181	0.50%	13,736,966
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2,747,393,181</b>		<b>13,736,966</b>

Tabel 3.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Kantor Pusat BKN	433,473,386	0.50%	2,167,367
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,368,040	0.50%	6,840
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,600,000	0.50%	13,000
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	2,034,084,835	0.50%	10,170,424
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,455,000	0.50%	7,275
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1,191,200	0.50%	5,956
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	45,450,641	0.50%	227,253
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	96,691,976	0.50%	483,460
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	30,799,200	0.50%	153,996
10	Kantor Regional XI BKN Manado	25,194,262	0.50%	125,971
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,681,500	0.50%	8,408
12	Kantor Regional XIII BKN Aceh	13,643,600	0.50%	68,218
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	6,688,350	0.50%	33,442
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	53,071,191	0.50%	265,356
<b>JUMLAH PIUTANG</b>		<b>2,747,393,181</b>		<b>13,736,966</b>

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00

### C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,-

### C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan

Rp7.106.175.160,-

### C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.106.175.160,00 dan Rp7.837.731.684,00.

Tabel 3.10 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Barang Konsumsi	6,722,383,660.00	7,468,125,581.00
Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500.00	313,613,087.00
Suku cadang	-	4,247,700.00
Persediaan Lainnya	-	51,745,316.00
<b>Jumlah</b>	<b>7,106,175,160</b>	<b>7,837,731,684</b>

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kantor Pusat BKN	2,232,335,274.00	2,130,525,196.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	579,302,866.00	738,223,183.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	292,376,448.00	403,577,529.00
Kantor Regional III BKN Bandung	170,052,545.00	177,385,471.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	181,080,450.00	96,490,028.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	278,279,760.00	375,533,960.00
Kantor Regional VI BKN Medan	322,797,442.00	157,152,164.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	201,179,129.00	258,131,702.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	449,486,840.00	498,152,118.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	499,488,799.00	475,250,303.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	471,799,088.00	620,380,772.00
Kantor Regional XI BKN Manado	229,634,298.00	317,080,034.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	882,110,788.00	1,074,408,949.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	138,853,430.00	265,999,730.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	44,708,946.00	19,842,020.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	132,689,057.00	229,598,525.00
<b>Jumlah</b>	<b>7,106,175,160.00</b>	<b>7,837,731,684.00</b>

Terdapat persediaan dalam kondisi using sebesar Rp213.392.450,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan using tersebut berasal dari:

Tabel 3.12 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Regional VII BKN Palembang	62,425,000.00	Toner Printer HP dan Laser Jet sebanyak 52 buah
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	15,511,450.00	ATK dan Toner Printer sebanyak 45 buah
3	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	135,456,000.00	Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian sebanyak 498 buah
	<b>Jumlah</b>	<b>213,392,450.00</b>	

Tanah

Rp2.330.666.524.668,-

C.10 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.330.666.524.668,00 dan Rp2.322.022.352.128,00.

Tabel 3.13 Mutasi Tanah Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2,322,022,352,128.00
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>8,644,172,540.00</b>
Hibah Masuk	8,437,991,540.00
Realisasi Belanja Modal Tanah	206,181,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>2,330,666,524,668.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>2,330,666,524,668.00</b>

Adapun rincian mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** sebesar Rp8.644.172.540,00 atas transaksi Tanah berupa:

1. Hibah (Masuk) sebesar Rp8.437.991.540,00 yang berasal dari:
  - a. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp1.275.000,00 atas UPT BKN Pontianak sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 02 Januari 2023.
  - b. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp149.191.140,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9.A Tahun 2023 dan Nomor HM.04.01/BA/K/2023 Tanggal 06 Maret 2023.

- c. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp8.287.525.400,00 yang terdiri dari:
  - 1) UPT Batam sebesar Rp7.887.525.400,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Kota Batam Nomor 175/K/KU.02.02/IV/2022 dan Nomor 08 Tahun 2022, Tanggal 19 April 2022;
  - 2) UPT Padang sebesar Rp400.000.000,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 dan Nomor 03/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 27 Februari 2023.
- 2. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp206.181.000,00 yang berasal dari:
  - a. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp196.181.000,00 menggunakan akun 531115 berupa pekerjaan pengurukan dan pematangan tanah di lingkungan kantor.
  - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp10.000.000,00 menggunakan akun 531114 berupa pembuatan sertifikat tanah untuk UPT Kupang.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	790,911,774,000.00	790,911,774,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150,838,792,000.00	150,838,792,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	351,559,532,000.00	351,559,532,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	50,955,787,080.00	50,955,787,080.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	90,756,538,500.00	90,756,538,500.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	62,663,190,000.00	62,661,915,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	164,724,060,000.00	164,724,060,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	264,364,323,238.00	264,168,142,238.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,285,349,140.00	17,136,158,000.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	40,113,517,000.00	40,113,517,000.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	166,626,748,000.00	166,616,748,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	48,274,100,310.00	48,274,100,310.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	25,270,525,400.00	16,983,000,000.00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	18,461,628,000.00	18,461,628,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,624,710,000.00	4,624,710,000.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	83,235,950,000.00	83,235,950,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2,330,666,524,668.00</b>	<b>2,322,022,352,128.00</b>

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m<sup>2</sup> senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
  - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m<sup>2</sup> senilai Rp3.037.866.000,00.
  - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m<sup>2</sup> senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m<sup>2</sup> senilai Rp342.853.000,00
  - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m<sup>2</sup> senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya. Tanah milik BKN yang berlokasi di belakang kantor yaitu Desa Waru, Sidoarjo seluas 97,44 m<sup>2</sup> telah dibangun bangunan permanen dan difungsikan oleh pihak ketiga sebagai garasi mobil.

Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m<sup>2</sup> atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
  - b. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m<sup>2</sup> atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.118 m<sup>2</sup> senilai Rp20.215.074.000,00 yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 537,313 m<sup>2</sup>, terdapat tanah yang belum bersertifikat yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
  - a. Perumahan Citra Gran Blok Q5 Nomor 10, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup> senilai Rp1.021.623.000,00.
  - b. Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah 244 m<sup>2</sup> senilai Rp9.385.290.000,00.
2. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Akhmad Sood Nomor 25 Pontianak dengan luas tanah 1.420 m<sup>2</sup> senilai Rp1.275.000,00.
3. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
  - a. Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tangah, Kota Padang. dengan luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> senilai Rp400.000.000,00
  - b. Jalan Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam dengan luas tanah 20.019 m<sup>2</sup> senilai Rp7.887.525.400,00

Peralatan dan Mesin  
Rp704.398.035.892,-

### C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp704.398.035.892,00 dan Rp644.039.889.022,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.15 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>644,039,889,022.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>92,560,970,446.00</b>
Hibah Masuk	479,310,994.00
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,643,703,977.00
Pengembangan Melalui KDP	160,452,975.00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	263,300,000.00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	6,390,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7,812,500.00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(32,202,823,576.00)</b>
Hibah Keluar	(20,572,634.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(7,355,440.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(32,174,895,502.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>704,398,035,892.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(561,012,680,230.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>143,385,355,662.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.560.970.446,00 berupa:

1. Hibah (Masuk) sebesar Rp479.310.994,00 berasal dari:
  - a. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta untuk UPT Pontianak sebesar Rp476.435.994,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023 Tanggal 02 Januari 2023;
  - b. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk UPT Padang sebesar Rp2.875.000,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 dan Nomor 03/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 27 Februari 2023;

Hibah (Masuk) sebesar Rp479.310.994,00 berupa:

Tabel 3.16 Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	195,550,000.00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	276,790,994.00
3	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,970,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>479,310,994.00</b>

2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.643.703.977,00 berupa:

Tabel 3.17 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	2,689,529,710.00
2	Alat Angkutan	19,940,000.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	390,806,136.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12,331,963,818.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	14,069,330,984.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	14,738,846.00
7	Alat Laboratorium	24,338,970.00
8	Komputer	62,067,459,169.00
9	Alat Keselamatan Kerja	31,846,344.00
10	Rambu-Rambu	3,750,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>91,643,703,977.00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.18 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	84,756,572,410.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	673,848,032.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	551,938,784.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	90,852,200.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	488,497,840.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	245,112,546.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	718,340,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	82,093,001.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	958,319,769.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	151,742,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	304,076,175.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	199,871,250.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	499,644,186.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	129,558,000.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	761,601,084.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,031,636,150.00
	<b>Jumlah</b>	<b>91,643,703,977.00</b>

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp95.027.046.618,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp91.643.703.977,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.383.342.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya atas pembayaran Dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp3.204.250.000,00 pada Kantor Pusat Jakarta
  - b. Penihilan Dana RPATA sebesar Rp179.092.641,00 yang merupakan pengembalian ke Kas Negara karena tidak terealisasinya pelaksanaan pengadaan pada Kantor Pusat BKN Jakarta.
3. Pengembangan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp160.452.975,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. KDP Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.434.975,00 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Reinstalasi Jaringan Listrik Utama Kantor pada Tahun 2021 di Kantor Pusat BKN Jakarta.
  - b. KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp118.018.000,00 atas pekerjaan pada tahun 2022 berupa:
    - 1) Biaya Jasa Konsultan Perencana Peremajaan Lift Gedung I Kantor Pusat sebesar Rp58.497.000,00.
    - 2) Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Perbaikan *Hydrant* pada Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp59.521.000,00.
4. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp263.300.000,00 merupakan pembelian peralatan dan mesin dengan pembayaran menggunakan Dana RPATA berupa Pengadaan *Walkthrough/Portal Metal Detector* yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta dimana barangnya sudah dikirim ke:
- a. Kantor UPT BKN Serang sebesar Rp87.750.000,00;
  - b. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp87.950.000,00;
  - c. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp87.600.000,00
5. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp6.390.000,00 berupa Hardisk Eksternal pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.
6. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp7.812.500,00 berupa Komputer yang berasal dari Kantor Regional VI BKN Medan.

**Mutasi Kurang** transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.202.823.576,00 berupa:

1. Hibah Keluar sebesar Rp20.572.634,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor 1814/B.PL.03.04/SD/A/2023 Tanggal 20 Februari 2023 Perihal Persetujuan Permohonan Hibah BMN Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan Berita Acara Penyerahan Hibah BMN Nomor 001/BA Peny-BMN/III/2023 Tanggal

15 Maret 2023 ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari.

2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.355.440,00 berasal dari:
  - ✓ Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp2.172.000,00;
  - ✓ Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp5.183.440,00
3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp32.174.895.502,00 berupa:

Tabel 3.19 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	2,491,537,330.00
2	Alat Angkutan	49,775,000.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,397,250.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,280,767,652.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1,048,085,289.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,755,650.00
7	Komputer	24,295,577,331.00
<b>Jumlah</b>		<b>32,174,895,502.00</b>

Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.20 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	21,845,588,393.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	288,268,075.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,433,980,047.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2,294,144,954.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,129,510,067.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1,269,435,505.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	13,850,000.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	695,754,212.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	719,198,022.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	993,022,405.00
11	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	83,705,650.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	408,438,172.00
<b>Jumlah</b>		<b>32,174,895,502.00</b>

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.21 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	342,160,941,921.00	307,438,147,933.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	24,657,156,441.00	21,337,906,469.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	16,707,646,920.00	16,833,088,883.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	19,979,772,347.00	18,274,634,186.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	34,229,568,898.00	30,207,690,221.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	22,854,992,523.00	21,287,711,550.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	19,719,157,084.00	19,163,717,839.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,588,018,933.00	32,618,562,134.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	26,224,463,207.00	23,833,624,060.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	20,125,790,739.00	18,522,297,054.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	22,166,473,103.00	20,706,178,703.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	25,336,074,256.00	24,213,857,538.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26,801,800,810.00	25,169,261,094
14	Kantor Regional XIII Banda Aceh	7,402,732,256.00	6,703,771,606.00
15	Kantor Regional XIV Manokwari	13,420,581,744.00	11,304,016,946.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	47,022,864,710.00	46,425,422,806.00
	<b>Jumlah</b>	<b>704,398,035,892.00</b>	<b>644,039,889,022.00</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Utama A3.

*Gedung dan Bangunan*  
Rp868.849.348.970,-

### C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp868.849.348.970,00 dan Rp859.028.655.212,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>859,028,655,212.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>9,895,025,823.00</b>
Hibah Masuk	2,011,623,500.00
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,480,053,783.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2,403,348,540.00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(74,332,065.00)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(74,332,065.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>868,849,348,970.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(165,721,828,073.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>703,127,520,897.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pegurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.895.025.823,00 berupa:

1. Hibah (Masuk) sebesar Rp2.011.623.500,00 berasal dari:
  - a. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta untuk UPT Pontianak sebesar Rp833.090.000,00 untuk UPT Pontianak sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023 Tanggal 02 Januari 2023 berupa:

Tabel 3.23 Rincian Hibah (Masuk) Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	703,227,521.00
2	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	129,862,479.00
	<b>Jumlah</b>	<b>833,090,000.00</b>

- b. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk UPT Padang sebesar Rp1.178.533.500,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 dan Nomor 03/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 27 Februari 2023 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.480.053.783,00 berupa:

Tabel 3.24 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Asrama Permanen	59,251,800.00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3,705,035,501.00
3	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	208,714,854.00
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	151,442,000.00
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	45,300,000.00
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	126,195,678.00
7	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	322,686,768.00
8	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	89,057,435.00
9	Pagar Permanen	691,467,619.00
10	Taman Lainnya	80,902,128.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,480,053,783.00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berasal dari:

Tabel 3.25 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	1,831,374,432.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	121,819,725.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	89,057,435.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	25,074,500.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	326,854,188.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	151,442,000.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	686,528,119.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	239,491,682.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	960,193,000.00
10	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	47,700,000.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,000,518,702.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,480,053,783.00</b>

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.648.930.847,00, sedangkan Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.480.053.783,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp168.877.064,00 yang dicatat sebagai Perolehan/Penambahan KDP pada Kantor Pusat BKN Jakarta.

3. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp2.403.348.540,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen berasal dari:
  - a. Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp602.164.000,00 berupa:
    - 1) Penambahan nilai atas kurang saji reklasifikasi ATR Kantor UPT Kendari sebesar Rp47.698.000,00;
    - 2) Penambahan nilai atas kurang saji reklasifikasi ATR Kantor UPT Donggala sebesar Rp554.466.000,00
  - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp45.571.557,00 merupakan penambahan nilai atas pekerjaan renovasi rumah panel menjadi musholla yang menggunakan akun 523111
  - c. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.755.612.983,00 merupakan penambahan nilai dari reklasifikasi ATR Kantor UPT Padang karena belum dikapitalisasi pada saat penerimaan hibah.

**Mutasi Kurang** transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.332.065,00 berupa koreksi nilai berkurang atas kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari:

Tabel 3.26 Rincian Koreksi Nilai Berkurang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	11,504,339.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,741,306.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	4,300,631.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	13,884,755.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	36,901,034.00
	<b>Jumlah</b>	<b>74,332,065.00</b>

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.27 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	368,299,042,861.00	366,479,172,768.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39,134,021,945.00	39,134,021,945.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	26,455,248,682.00	26,341,170,263.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	33,921,491,035.00	33,832,433,600.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	45,351,715,358.00	44,728,777,489.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	31,523,050,297.00	30,363,106,109.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	36,003,945,025.00	35,852,503,025.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	45,710,637,926.00	45,024,109,807.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22,696,288,832.00	22,470,681,905.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	22,324,928,549.00	21,364,735,549.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	30,810,421,814.00	30,764,850,257.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	28,350,992,641.00	28,350,992,641.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	30,373,891,519.00	27,439,745,036.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6,084,633,004.00	6,036,933,004.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499,327,000.00	499,327,000.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	101,309,712,482.00	100,346,094,814.00
	<b>Jumlah</b>	<b>868,849,348,970.00</b>	<b>859,028,655,212.00</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp24.716.999.940,-

### C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.716.999.940,00 dan Rp24.589.544.940,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>24,589,544,940.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>127,455,000.00</b>
Hibah Masuk	127,455,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>24,716,999,940.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(18,945,134,998.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>5,771,864,942.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp127.455.000,00 berasal dari Kantor Regional V BKN DKI Jakarta yang merupakan Hibah (Masuk) untuk UPT Pontianak berupa Jalan sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 02 Januari 2023.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	56,071,000.00	56,071,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	925,565,400.00	925,565,400.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20,000,000.00	20,000,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	290,456,867.00	290,456,867.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7,399,412,500.00	7,399,412,500.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	127,455,000.00	-
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,540,823,780.00	2,540,823,780.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,879,491,700.00	2,879,491,700.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,942,634,000.00	2,942,634,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,062,182,000.00	2,062,182,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	2,064,521,123.00	2,064,521,123.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308,174,570.00	308,174,570.00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,100,212,000.00	3,100,212,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>24,716,999,940.00</b>	<b>24,589,544,940.00</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Utama A3.

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp13.874.987.099,-

#### C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp13.874.987.099,00 dan Rp19.850.308.423,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>19,850,308,423.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>1,535,900,989.00</b>
Realisasi Belanja Modal Lainnya	1,472,300,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	63,600,989.00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(7,511,222,313.00)</b>
Koreksi Pencatatan	(3,527,304,411.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(3,978,091,902.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(5,826,000.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>13,874,987,099.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(602,959,129.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>13,272,027,970.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.535.900.989,00 berasal dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Lainnya sebesar Rp1.472.300.000,00 yang menggunakan akun belanja penambahan nilai aset tetap lainnya dan/atau aset lainnya 536121 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi.

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp2.138.983.760,00, sedangkan Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.472.300.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp666.683.760,00 yang merupakan Belanja Modal Lainnya untuk penambahan nilai Aset Tak Berwujud (ATB).

2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp63.600.989,00 yang menggunakan akun 523119 berupa Aset Tetap Renovasi berasal dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

**Mutasi Kurang** transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.511.222.313,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.527.304.411,00 berupa:
  - a. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi sebesar Rp3.348.638.411,00;
  - b. Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi sebesar Rp178.666.000,00.

Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.527.304.411,00 berasal dari:

Tabel 3.31 Rincian Koreksi Pencatatan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,771,691,428.00
2	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,755,612,983.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3,527,304,411.00</b>

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp3.978.091.902,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang berasal dari:

Tabel 3.32 Rincian Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,970,145,025.00
2	Kantor Regional XII BKN Manokwari	7,946,877.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3,978,091,902.00</b>

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp5.826.000,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak yang berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974.00
2	Bahan Perpustakaan	1,649,891,025.00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	164,719,100.00
	<b>Jumlah</b>	<b>13,874,987,099.00</b>

Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) pada BKN merupakan aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik BKN. Nilai ATR tersebut masih tercatat dalam laporan keuangan BKN karena kerja sama pinjam pakai yang masih berlaku. Adapun rincian aset tetap renovasi sebesar Rp12.060.376.974,00 terdiri dari:

- Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp330.933.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Semarang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
- Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp385.659.850,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Serang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2025.

3. Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp1.340.813.225,00 terdiri dari:
  - a. Kantor UPT BKN Ambon sebesar Rp491.127.225,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2027.
  - b. Kantor UPT BKN Mamuju Rp849.686.000,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2028.
4. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp731.257.320,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
  - c. Kantor UPT BKN Lampung sebesar Rp296.942.500,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2027.
  - d. Kantor UPT BKN Pontianak sebesar Rp434.314.820,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dihibahkan kembali ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp818.738.074,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
  - a. Kantor UPT BKN Pangkal Pinang sebesar Rp398.897.674,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2024.
  - b. Kantor UPT BKN Jambi sebesar Rp419.840.400,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
6. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp1.921.038.381,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
  - a. Kantor UPT BKN Palangkaraya sebesar Rp442.521.200,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
  - b. Kantor UPT BKN Balikpapan sebesar Rp994.989.900,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2024.
  - c. Kantor UPT BKN Tarakan sebesar Rp483.527.281,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Juli 2024.
7. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp1.191.495.203,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
  - a. Kantor UPT BKN Mataram sebesar Rp432.104.317,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Desember 2025.
  - b. Kantor UPT BKN Kupang sebesar Rp759.390.886,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan November 2025.
8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.175.607.217,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:

- a. Kantor UPT BKN Padang sebesar Rp372.780.267,00 yang akan dihibahkan kembali ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Kantor UPT BKN Batam sebesar Rp802.826.950,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
9. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp4.164.834.204,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
- a. Kantor UPT BKN Sorong sebesar Rp1.661.582.588,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2025.
  - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp2.503.251.616,00 yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan telah bersertifikat atas nama BKN namun proses atas pengesahan hibahnya masih dalam proses.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	482,070,963.00	482,070,963.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	376,956,817.00	376,956,817.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	50,566,000.00	56,392,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	451,498,900.00	451,498,900.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1,381,738,022.00	7,123,574,475.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	731,257,320.00	731,257,320.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	173,193,222.00	173,193,222.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838,912,644.00	838,912,644.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,930,288,381.00	1,930,288,381.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9,999,550.00	9,999,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,205,126,203.00	1,205,126,203.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	99,972,695.00	99,972,695.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,185,150,817.00	2,940,763,800.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,164,834,204.00	2,636,880,092.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	793,421,361.00	793,421,361.00
	<b>Jumlah</b>	<b>13,874,987,099.00</b>	<b>19,850,308,423.00</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Rp168.877.064,-

### C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp168.877.064,00 dan Rp160.452.975,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>160,452,975.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>168,877,064.00</b>
Perolehan/Penambahan KDP dari Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	168,877,064.00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(160,452,975.00)</b>
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(160,452,975.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>168,877,064.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>168,877,064.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp168.877.064,00 berupa Perolehan/Penambahan KDP dari Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta atas pekerjaan *reviu design* untuk pembangunan Kantor UPT Gorontalo dan Kantor UPT Mataram.

**Mutasi Kurang** transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp160.452.975,00 berupa Reklasifikasi KDP menjadi Barang jadi yang berasal dari:

1. Penyelesaian KDP Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.434.975,00 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Reinstalasi Jaringan Listrik Utama Kantor pada Tahun 2021 di Kantor Pusat BKN Jakarta.
2. Penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp118.018.000,00 atas pekerjaan pada tahun 2022 berupa:
  - a. Biaya Jasa Konsultan Perencana Peremajaan Lift Gedung I Kantor Pusat sebesar Rp58.497.000,00.
  - b. Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Perbaikan *Hydrant* pada Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp59.521.000,00.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp746.282.602.430,-

### C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp746.282.602.430,00 dan Rp703.556.040.854,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892.00	561,012,680,230.00	143,385,355,662.00
2	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970.00	165,721,828,073.00	703,127,520,897.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,716,999,940.00	18,945,134,998.00	5,771,864,942.00
4	Aset Tetap Lainnya	13,874,987,099.00	602,959,129.00	13,272,027,970.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,611,839,371,901.00</b>	<b>746,282,602,430.00</b>	<b>865,556,769,471.00</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan dalam Lampiran Utama A3.

Aset Tak Berwujud  
Rp125.741.319.487,-

### C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp125.741.319.487,00 dan Rp142.021.610.016,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>142,021,610,016.00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>666,683,760.00</b>
Realisasi Belanja Modal Lainnya	666,683,760.00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(16,946,974,289.00)</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	(16,946,974,289.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>125,741,319,487.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(124,210,061,367.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1,531,258,120.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi ATB berasal dari Realisasi Belanja Modal Lainnya sebesar Rp666.683.760,00 yang merupakan pembelian *Software* Komputer pada Kantor Pusat BKN Jakarta.

**Mutasi Kurang** transaksi ATB sebesar Rp16.946.974.289,00 berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa:

Tabel 3.38 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	16,907,315,439.00
2	Lisensi	39,658,850.00
<b>Jumlah</b>		<b>16,946,974,289.00</b>

Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa:

Tabel 3.39 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	16,850,934,939.00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	39,658,850.00
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	56,380,500.00
<b>Jumlah</b>		<b>16,946,974,289.00</b>

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.40 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Hak Cipta	500,000.00	500,000.00
2	Software Komputer	125,545,819,487.00	141,786,451,166.00
3	Lisensi	-	39,658,850.00
4	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000.00	195,000,000.00
<b>Jumlah Nilai Perolehan</b>		<b>125,741,319,487.00</b>	<b>142,021,610,016.00</b>
Amortisasi ATB		(124,210,061,367)	(138,954,397,432)
<b>Jumlah</b>		<b>1,531,258,120.00</b>	<b>3,067,212,584.00</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.41 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	119,620,477,457.00	135,804,728,636.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	409,397,750.00	409,397,750.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	22,000,000.00	22,000,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	-	39,658,850.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	713,533,250.00	713,533,250.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	767,754,180.00	767,754,180.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	886,661,700.00	886,661,700.00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729,484,450.00	729,484,450.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	651,566,250.00	707,946,750.00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	651,566,250.00	651,566,250.00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740,391,250.00	740,391,250.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	548,486,950.00	548,486,950.00
	<b>Jumlah</b>	<b>125,741,319,487.00</b>	<b>142,021,610,016.00</b>

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Utama A4.

Dana yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp21.071.862.270,-

### C.18 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dana yang dibatasi penggunaannya pada BKN adalah dana pada rekening penampungan sementara yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang penyelesaian pekerjaannya diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp21.071.862.270,00 dan Rp0,00. Adapun rincian dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari:

Tabel 3.42 Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	20,674,809,270.00	34 Kontrak Pekerjaan
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	200,880,000.00	2 Kontrak Pekerjaan
3	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	147,555,000.00	2 Kontrak Pekerjaan
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	48,618,000.00	1 Kontrak Pekerjaan
	<b>Jumlah</b>	<b>21,071,862,270.00</b>	

Dari sejumlah 39 kontrak dengan nilai Rp21.071.862.270,00, realisasi penggunaan atas dana yang dibatasi penggunaannya ini hanya terealisasi sebesar Rp17.688.504.629,00. Terdapat selisih sebesar Rp3.383.357.641,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat wanprestasi pekerjaan sebesar Rp127.650.000,00 sesuai dengan Kontrak Nomor 091/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023 atas Pengadaan Kursi Pendukung CAT yang tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis barang yang sesuai dengan rincian kontrak. Atas wanprestasi pekerjaan tersebut, saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana di RPATA dengan nomor dokumen SPM 02968A/017220/2023 & SP2D Nomor: 230880301000326, tanggal 27 Desember 2023 telah dilakukan penihilan dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00050A/017220/2024 & SP2D Nomor: 240880301000012, tanggal 10 Januari 2024.
2. Terdapat keterlambatan penyelesaian suatu pekerjaan sebesar Rp3.204.250.000,00 sesuai dengan Kontrak Nomor 027/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023 atas Pengadaan *Metal Gate* yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, barang tersebut belum dapat diterima. Adapun *progress* dari pekerjaan pengadaan *Metal Gate* yang sudah dicatat sebagai penambahan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2023 dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp263.300.000,00. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, telah diberikan kesempatan perpanjangan penyelesaian pekerjaan pada tahun berikutnya, sehingga sisa pekerjaan sebesar Rp2.940.950.000,00 akan tercatat sebagai penambahan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2024. Terhadap pekerjaan tersebut saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana di RPATA dengan nomor dokumen SPM 02971T/017220/2023 & SP2D Nomor: 230880301000348, tanggal 27 Desember 2023 telah dilakukan pembayaran dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00064A/017220/2024 & SP2D Nomor: 249991303004560, tanggal 23 Januari 2024.
3. Terdapat perbedaan jumlah pembayaran atas 3 dokumen kontrak sebesar Rp51.457.641,00 yang tidak sesuai dengan nilai kontrak karena adanya perbedaan perhitungan, yang terdiri dari:
  - a. Pekerjaan atas pengadaan kursi CAT sesuai Dokumen Kontrak Nomor 032/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023, dengan nilai selisih pembayaran sebesar Rp3.170.032,00 dikarenakan biaya kirim barang yang dianggarkan dalam kontrak lebih tinggi sedangkan perhitungan biaya kirim dibayarkan secara *at cost*. Atas pekerjaan tersebut saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana di RPATA dengan nomor dokumen SPM 02977T/017220/2023 & SP2D Nomor: 230880301000342, tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.316.300.000,00 telah dilakukan penyelesaian dana RPATA yang terdiri dari:
    - 1) Pembayaran dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00046A/017220/2024 & SP2D Nomor: 249991302002129, tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp1.313.129.968,00;

- 2) Penihilan dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00047A/017220/2024 & SP2D Nomor: 240880301000021, tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp3.170.032,00.
- b. Pekerjaan atas pengadaan meja CAT sesuai Dokumen Kontrak Nomor 030/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023, dengan nilai selisih pembayaran sebesar Rp48.272.609,00 dikarenakan biaya kirim barang yang dianggarkan dalam kontrak lebih tinggi sedangkan perhitungan biaya kirim dibayarkan secara *at cost*. Atas pekerjaan tersebut saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana di RPATA dengan nomor dokumen SPM 02972T/017220/2023 & SP2D Nomor: 230880301000343, tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp2.532.350.000,00 telah dilakukan penyelesaian dana RPATA yang terdiri dari:
  - 1) Pembayaran dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00044A/017220/2024 & SP2D Nomor: 249991302002128, tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp2.484.077.391,00;
  - 2) Penihilan dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00045A/017220/2024 & SP2D Nomor: 240880301000020, tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp48.272.609,00
- c. Pekerjaan atas pengadaan jasa konsultan perorangan pemeliharaan SIASN V.2.1 (Layanan Dashboard) sesuai Dokumen Kontrak Nomor 023/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023, dengan nilai selisih pembayaran sebesar Rp15.000,00 dikarenakan bukti biaya non personil yang diberikan oleh konsultan lebih kecil dibandingkan biaya yang dianggarkan dalam kontrak. Atas pekerjaan tersebut saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana di RPATA dengan nomor dokumen SPM 02958T/017220/2023 & SP2D Nomor: 230880301000350, tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp13.500.000,00 telah dilakukan penyelesaian dana RPATA yang terdiri dari:
  - 1) Pembayaran dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00017A/017220/2024 & SP2D Nomor: 249991304000934, tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp13.485.000,00;
  - 2) Penihilan dana RPATA dengan nomor dokumen SPM 00042A/017220/2024 & SP2D Nomor: 240880301000011, tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp15.000,00

Adapun Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa saldo awal dana rekening penampungan, nilai pembayaran dan saldo dana yang dikembalikan melalui penihilan saldo dana RPATA disajikan pada Lampiran Utama A7.

Aset Lain-Lain  
Rp21.362.783.827,-

### C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp21.362.783.827,00 dan Rp12.659.761.686,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.43 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>12,659,761,686.00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>49,127,695,791.00</b>
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	49,127,695,791.00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(40,424,673,650.00)</b>
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(7,812,500.00)
Pencatatan barang yang telah dihapuskan	(40,416,861,150.00)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>21,362,783,827.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(21,058,505,165.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>304,278,662.00</b>

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

**Mutasi Tambah** transaksi Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp49.127.695.791,00 berupa:

Tabel 3.44 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	2,491,537,330.00
2	Alat Angkutan	49,775,000.00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,397,250.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,280,767,652.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1,048,085,289.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,755,650.00
6	Komputer	24,295,577,331.00
7	Bahan Perpustakaan	5,826,000.00
8	Aset Tak Berwujud	16,946,974,289.00
	<b>Jumlah</b>	<b>49,127,695,791.00</b>

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berasal dari:

Tabel 3.45 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	38,696,523,332.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	288,268,075.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,439,806,047.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2,333,803,804.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,129,510,067.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1,269,435,505.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	13,850,000.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	752,134,712.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	719,198,022.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	993,022,405.00
11	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	83,705,650.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	408,438,172.00
	<b>Jumlah</b>	<b>49,127,695,791.00</b>

**Mutasi Kurang** transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp40.424.673.650,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp7.812.500,00 berasal dari Kantor Regional VI BKN Medan berupa Komputer.
2. Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan sebesar Rp40.416.861.150,00 berupa:

Tabel 3.46 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	2,491,537,330.00
2	Alat Angkutan	551,915,800.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,397,250.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,892,515,271.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1,080,073,479.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,985,650.00
7	Komputer	15,252,249,956.00
8	Bahan Perpustakaan	5,826,000.00
9	Aset Tak Berwujud	16,133,360,414.00
	<b>Jumlah</b>	<b>40,416,861,150.00</b>

Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan berasal dari:

Tabel 3.47 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	24,634,928,193.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	423,401,088.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,611,513,738.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,699,007,315.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,129,510,067.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1,779,928,489.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,922,730,425.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	13,850,000.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	752,134,712.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	1,515,251,180.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,411,667,771.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	522,938,172.00
	<b>Jumlah</b>	<b>40,416,861,150.00</b>

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.48 Rincian Aset Lain-lain per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	17,274,339,189.00	3,212,744,050.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	135,133,013.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	784,761,700.00	956,469,391.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	-	1,365,203,511.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	574,138,000.00	574,138,000.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	144,174,000.00	662,479,484.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	673,986,500.00	673,986,500.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	262,938,890.00	2,185,669,315.00
9	Kantor Regional IX Jayapura	582,370,747.00	582,370,747.00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	-	796,053,158.00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	362,578,247.00	781,223,613.00
12	Kantor Regional XIII BKN Aceh	83,705,650.00	-
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	619,790,904.00	619,790,904.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	114,500,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>21,362,783,827.00</b>	<b>12,659,761,686.00</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran Utama A3 dan A4.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*  
Rp145.268.566.532,-

### C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp145.268.566.532,00 dan Rp151.280.443.054,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500,000.00	64,279.00	435,721.00
2	Software Komputer	125,545,819,487.00	124,209,997,088.00	1,335,822,399.00
3	Lisensi	-	-	-
4	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000.00	-	195,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>125,741,319,487.00</b>	<b>124,210,061,367.00</b>	<b>1,531,258,120.00</b>
B	Aset Lain-lain	21,362,783,827.00	21,058,505,165.00	304,278,662.00
	<b>Jumlah</b>	<b>147,104,103,314.00</b>	<b>145,268,566,532.00</b>	<b>1,835,536,782.00</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan Per 31 Desember 2023 dalam Lampiran Utama A4.

*Utang kepada Pihak Ketiga*  
Rp19.629.558.217,-

### C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.629.558.217,00 dan Rp4.023.347.005,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai dengan 31 Desember 2023, BKN memiliki utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

Tabel 3.50 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	93,499,510.00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1,583,902,578.00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	17,952,156,129.00
	<b>Jumlah</b>	<b>19,629,558,217.00</b>

Rincian utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp93.499.510,00 merupakan pembayaran atas kekurangan gaji, tunjangan ataupun uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.51 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	18,614,977.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,603,880.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	5,930,239.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	25,932,175.00
5	Kantor Regional V DKI Jakarta	942,630.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	10,499,282.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	21,409,306.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,735,000.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	624,000.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,190,000.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	5,018,021.00
	<b>Jumlah</b>	<b>93,499,510.00</b>

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.583.902.578,00 merupakan pembayaran atas tagihan pemakaian listrik, telepon, air, pengiriman surat dinas/pos dan tagihan lainnya yang seharusnya menjadi beban tahun 2023 namun baru dibayarkan pada tahun 2024. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.52 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	711,668,527.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	77,173,048.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	72,467,518.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	46,552,262.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	34,306,441.00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	57,803,198.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	60,759,089.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	84,243,084.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	56,995,062.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	41,306,492.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	53,336,105.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	89,708,933.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	62,369,269.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	20,098,161.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	16,675,488.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	98,439,901.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,583,902,578.00</b>

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp17.952.156.129,00 terdiri dari

- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas Pembayaran Dana RPATA sebesar Rp17.951.804.629,000, yang berasal dari:

Tabel 3.53 Rincian SPP atas Pembayaran Dana RPATA per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	17,554,751,629.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	200,880,000.00
3	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	147,555,000.00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	48,618,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>17,951,804,629.00</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi pembayaran RPATA sebesar Rp17.688.504.629,00, terdapat selisih sebesar Rp263.300.000,00 yang merupakan penyesuaian nilai utang kepada pihak ketiga lainnya dimana terdapat Kantor Regional dan Kantor UPT BKN yang sudah menerima barang pada tanggal 29 Desember 2023, namun pembayarannya belum dapat dilakukan karena pengajuan pembayaran dilakukan pada satu dokumen kontrak. Adapun Kantor Regional dan Kantor UPT BKN yang seharusnya sudah bisa dilakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp87.950.000,00.
  - 2) Kantor UPT Serang sebesar Rp87.750.000,00.
  - 3) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp87.600.000,00
- b. LS Bendahara yang Belum Disetorkan ke Pegawai sebesar Rp351.500,00, berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado yang merupakan transaksi Retur dari Bank BNI atas pembayaran uang makan pegawai.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya berasal dari:

Tabel 3.54 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	17,554,751,629.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	200,880,000.00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	351,500.00
4	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	147,555,000.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	48,618,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>17,952,156,129.00</b>

Pendapatan Diterima di Muka Rp1.091.528.298,-

### C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.091.528.298,00 dan Rp914.314.432,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran.

Tabel 3.55 Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kantor Pusat BKN	989,641,310.00	863,969,556.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,429,301.00	2,279,301.00
3	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	28,996,835.00	2,795,833.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,482,110.00	-
5	Kantor Regional XI BKN Manado	54,157,333.00	5,086,000.00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru		15,912,000.00
7	Pusat Pengembangan ASN	13,821,409.00	24,271,742.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,091,528,298.00</b>	<b>914,314,432.00</b>

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 tersaji pada Lampiran Utama A5.

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

### C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4.236.316,-

### C.24 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.236.316,00 dan Rp5.556.249,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara yang berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar.

Ekuitas Rp3.208.549.866.357,-

### C.25 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.208.549.866.357,00 dan Rp3.173.325.597.443,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp23.670.868.321,-

**D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah PNBPN pada BKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.670.868.321,00 dan Rp18.717.242.822,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNBPN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	913,125,397.00	702,261,822.00	30.03
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya	1,278,300,000.00	869,700,000.00	46.98
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	432,110,000.00	589,125,000.00	(26.65)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,133,238,000.00	2,932,787,000.00	6.83
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	14,927,901,000.00	13,623,369,000.00	9.58
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2,986,193,924.00	-	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,670,868,321.00</b>	<b>18,717,242,822.00</b>	<b>26.47</b>

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami kenaikan sebesar 26,47% dari tahun anggaran sebelumnya disebabkan adanya peningkatan pada Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya sebesar 46,98%. Peningkatan pendapatan ini dikarenakan BKN dapat melaksanakan kembali program-program yang telah direncanakan dengan optimal.

Berdasarkan LRA, BKN memperoleh PNBPN sebesar Rp26.260.135.552,00 sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp23.670.868.321,00. Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp2.589.267.231,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA yang dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional pada Laporan Operasional sebesar Rp2.487.163.621,00;
2. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp177.213.866,00;
3. Pembayaran Piutang PNBPN Akhir Tahun atas transaksi pencatatan piutang sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp8.102.750,00;
4. Penyesuaian atas Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL atas koreksi nilai aset sebesar Rp40.923.571,00.
5. Penyesuaian atas nilai Piutang Lainnya atas transaksi denda penyelesaian pekerjaan jasa dukungan sarpras seleksi CASN yang disetor pada tahun 2024 sebesar (Rp124.136.577,00).

Adapun Pendapatan Operasional BKN per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	18,500,416,670.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	53,094,146.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8,473,516.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	6,195,818.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6,228,751.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	15,450,953.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	37,166,013.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	22,305,944.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	15,383,292.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	39,358,050.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	33,428,686.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	14,596,067.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	39,970,890.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	5,805,500.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,872,994,025.00
	<b>Jumlah</b>	<b>23,670,868,321.00</b>

Beban Pegawai

Rp345.122.172.386,-

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.122.172.386,00 dan Rp325.097.041.001,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	166,879,061,059.00	177,109,983,453.00	(5.78)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	717,039,576.00	-	0.00
Beban Lembur	1,214,127,000.00	1,202,532,000.00	0.96
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	176,311,944,751.00	146,784,525,548.00	20.12
<b>JUMLAH</b>	<b>345,122,172,386.00</b>	<b>325,097,041,001.00</b>	<b>6.16</b>

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pegawai pada BKN adalah sebesar Rp346.866.997.060,00 sedangkan Beban Pegawai LO sebesar Rp345.122.172.386,00. Terdapat selisih antara Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO sebesar Rp1.744.824.674,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo piutang lainnya atas transaksi kelebihan pembayaran belanja yang baru disetor pada tahun 2024 sebesar Rp310.632.835,00;
2. Saldo utang belanja pegawai awal tahun sebesar Rp1.547.884.401,00;
3. Saldo utang belanja pegawai akhir tahun sebesar (Rp93.499.510,00);
4. Koreksi lainnya atas utang belanja pegawai tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar (Rp20.193.052,00).

Adapun Beban Pegawai BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	245,876,049,341.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10,316,222,048.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	8,424,920,610.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8,394,611,383.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	9,403,913,055.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	5,875,646,071.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,006,583,276.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	6,324,821,362.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,262,474,193.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4,895,561,640.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,384,048,659.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,192,847,486.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	6,921,401,182.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,250,113,398.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,469,181,535.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,123,777,147.00
	<b>Jumlah</b>	<b>345,122,172,386.00</b>

*Beban Persediaan*  
Rp7.953.984.101,-

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.953.984.101,00 dan Rp11.376.993.028,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.5 Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %)
Beban Persediaan Konsumsi	7,953,984,101.00	10,847,561,604.00	(26.67)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	529,431,424.00	(100.00)
<b>JUMLAH</b>	<b>7,953,984,101.00</b>	<b>11,376,993,028.00</b>	<b>(30.09)</b>

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran kas, seperti pemakaian persediaan akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Hal ini dikarenakan persediaan yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dicatat menggunakan kode barang yang sama dengan BMN pada umumnya, berdasarkan ketentuan mengenai kodefikasi BMN.

Adapun Beban Persediaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	2,829,419,407.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	457,805,918.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	555,629,207.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	302,972,117.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	325,645,018.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	417,517,678.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	240,654,778.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	313,845,283.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	215,918,954.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	279,381,629.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	262,384,987.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	531,218,171.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	208,855,002.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	360,553,800.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	185,559,080.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	466,623,072.00
	<b>Jumlah</b>	<b>7,953,984,101.00</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp436.964.717.186,-

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp436.964.717.186,00 dan Rp136.707.875.959,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.7 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	51,449,187,172.00	51,135,270,195.00	0.61
Beban Barang Non Operasional	38,502,478,785.00	22,758,445,684.00	69.18
Beban Langganan Daya dan Jasa	344,046,866,382.00	62,800,408,230.00	447.84
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,966,184,847.00	13,751,850.00	21469.35
<b>JUMLAH</b>	<b>436,964,717,186.00</b>	<b>136,707,875,959.00</b>	<b>219.63</b>

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 adalah Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp973.940.449,00.

Adapun Beban Barang dan Jasa BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	316,719,961,727.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	9,680,656,717.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	16,325,441,434.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8,296,167,552.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	12,819,633,247.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	6,581,918,431.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8,816,431,389.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	10,386,458,997.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,612,193,447.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,609,663,024.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	7,002,582,036.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	6,282,419,555.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	8,289,075,759.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3,026,464,437.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	3,351,568,566.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	9,164,080,868.00
	<b>Jumlah</b>	<b>436,964,717,186.00</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp27.841.739.788,-

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.841.739.788,00 dan Rp25.634.007.494,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.9 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,492,615,169.00	9,196,190,805.00	14.10
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	62,396,955.00	-	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	781,112,733.00	718,450,497.00	8.72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,502,149,553.00	13,139,811,825.00	2.76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	24,263,457.00	(38.18)
Beban Pemeliharaan Irigasi	22,881,000.00	18,931,000.00	20.87
Beban Pemeliharaan Jaringan	28,123,664.00	164,577,899.00	(82.91)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1,691,646,618.00	964,673,235.00	75.36
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1,240,758,396.00	1,382,062,816.00	(10.22)
Beban Persediaan Suku Cadang	5,055,700.00	25,045,960.00	(79.81)
<b>JUMLAH</b>	<b>27,841,739,788.00</b>	<b>25,634,007,494.00</b>	<b>8.61</b>

Adapun Beban Pemeliharaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Beban Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	14,565,951,842.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,019,271,571.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	627,914,003.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,147,676,884.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,084,932,116.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	919,448,312.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	837,535,536.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	680,502,581.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	774,386,342.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	401,864,121.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,036,274,076.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	922,431,894.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,011,437,708.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	307,800,780.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	656,161,769.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,848,150,253.00
	<b>Jumlah</b>	<b>27,841,739,788.00</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp104.054.816.105,-

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp104.054.816.105,00 dan Rp67.929.757.287,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.11 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	80,771,971,991.00	53,945,934,779.00	49.73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,496,674,909.00	936,079,079.00	273.54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,300,257,757.00	6,721,009,380.00	38.38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,902,548,002.00	6,071,133,744.00	63.11
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	583,363,446.00	255,600,305.00	128.23
<b>JUMLAH</b>	<b>104,054,816,105.00</b>	<b>67,929,757,287.00</b>	<b>53.18</b>

Adapun Beban Perjalanan Dinas BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	49,600,130,935.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4,001,822,391.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,496,039,730.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	5,067,088,770.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	6,750,507,298.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,118,353,177.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,288,432,830.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,404,326,649.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,407,658,797.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,866,466,713.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	5,348,004,854.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	3,152,388,768.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3,593,519,141.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3,302,341,194.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,601,541,760.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,056,193,098.00
	<b>Jumlah</b>	<b>104,054,816,105.00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp78.060.519.188,-.

### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp78.060.519.188,00 dan Rp73.379.526.292,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48,518,688,033.00	42,391,740,062.00	14.45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,558,681,827.00	26,138,280,328.00	1.61
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	688,377,255.00	967,446,903.00	(28.85)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60,285,834.00	460,377,814.00	(86.91)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	16,160,515.00	39,605,777.00	(59.20)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>75,842,193,464.00</b>	<b>69,997,450,884.00</b>	<b>8.35</b>
Beban Amortisasi			
Beban Amortisasi Software	2,202,631,082.00	3,266,241,950.00	(32.56)
Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142.00	7,142.00	0.00
Beban Amortisasi Lisensi	-	1,982,942.00	(100.00)
Beban Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan	15,687,500.00	113,843,374.00	0.00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>2,218,325,724.00</b>	<b>3,382,075,408.00</b>	<b>(34.41)</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>78,060,519,188.00</b>	<b>73,379,526,292.00</b>	<b>6.38</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp13.703.211,-

### D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.703.211,00 dan Rp33.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(33,755.00)	33,755.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	13,736,966.00	-	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>13,703,211.00</b>	<b>33,755.00</b>	<b>40496.09</b>

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.235.842.916,-

### D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.235.842.916,00 dan Rp4.788.797.081,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	547,206,678.00	496,024,925.00	10.32
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	568,247,120.00	904,442,551.00	(37.17)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21,040,442.00	408,417,626.00	(94.85)
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	688,636,238.00	4,292,772,156.00	(83.96)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	1,227,446,601.00	4,989,560,690.00	(75.40)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	538,810,363.00	696,788,534.00	(22.67)
<b>Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>1,235,842,916.00</b>	<b>4,788,797,081.00</b>	<b>(74.19)</b>

Surplus Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.235.842.916,00 berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp568.247.120,00 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp4.738.508,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
  - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp509.122.616,00 yang berasal dari:

Tabel 4.16 Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	7,220,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	58,800,000.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	250,161,500.00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	19,676,550.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	51,334,567.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	13,999,999.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	71,100,000.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26,330,000.00
9	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	10,500,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>509,122,616.00</b>

- c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp54.385.996,00 yang berasal dari:

Tabel 4.17 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	12,009,999.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	26,111,999.00
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	16,263,998.00
	<b>Jumlah</b>	<b>54,385,996.00</b>

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp21.040.442,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:

Tabel 4.18 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	7,407,125.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	9,315,000.00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	495,000.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,636,637.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,186,680.00
	<b>Jumlah</b>	<b>21,040,442.00</b>

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.227.446.601,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp6.000.000,00 yang berasal dari Kantor Regional VI BKN Medan.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp378.738.730,00 yang berasal dari:

Tabel 4.19 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	257,250,234.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	12,523,050.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	866.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	6,473,887.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	185,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,381,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8,150,470.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	8,921,200.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,651,739.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	245.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	148,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,424,750.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	316,350.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	34.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	60,311,905.00
	<b>Jumlah</b>	<b>378,738,730.00</b>

- c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp833.910.371,00 yang berasal dari:

Tabel 4.20 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	229,568,527.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5,408,000.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	231,675,858.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	261,699,435.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	5,565,000.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	44,461,221.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	13,852,409.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,800,000.00
9	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	11,808,396.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	27,071,525.00
	<b>Jumlah</b>	<b>833,910,371.00</b>

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp7.797.500,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
- e. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp1.000.000,00 berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta berupa headset yang telah dicatat pada Laporan Persediaan atas hadiah yang didapat dari Bank Mandiri karena keberhasilan atas penggunaan KKP.
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp538.810.363,00 berupa Beban Persediaan Rusak/Usang yang berasal dari:

Tabel 4.21 Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	223,206,368.00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	1,973,925.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	12,665,000.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,311,450.00
5	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	148,197,620.00
6	Kantor Regional XIII BKN Aceh	135,456,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>538,810,363.00</b>

Pos Luar Biasa Rp0,-

#### D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp3.173.325.597.443,-*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.173.325.597.443,00 dan Rp3.166.883.637.818,00.

*Surplus (Defisit) LO*  
*(Rp975.104.940.728,-)*

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp975.104.940.728,00) dan (Rp616.619.194.913,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif*  
*Perubahan Kebijakan*  
*Akuntansi/Kesalahan*  
*Mendasar Rp0,-*

**E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi yang*  
*Menambah/Mengurangi*  
*Ekuitas*  
*(Rp3.488.126.484,-)*

**E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar (Rp3.488.126.484,00). Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah Koreksi yang mengurangi Ekuitas sebesar (Rp1.751.032.969,00). Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	433,260.00	(100.00)
Koreksi atas Reklasifikasi	-	-	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(4,209,626,661.00)	(469,216,910.00)	797.16
Koreksi Lain-Lain	721,500,177.00	(1,282,249,319.00)	(156.27)
<b>JUMLAH</b>	<b>(3,488,126,484.00)</b>	<b>(1,751,032,969.00)</b>	<b>99.20</b>

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0,-*

#### **E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,-*

#### **E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp433.260,00.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,-*

#### **E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp0,-*

#### **E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan, jembatan dan bangunan air.

*Koreksi Nilai Aset Tetap  
Non Revaluasi  
(Rp4.209.626.661,-)*

#### **E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp4.209.626.661,00) dan (Rp469.216.910,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5.2 Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Debit	Kredit	
<b>A. Aset Tetap</b>			
Tanah	717,170,000.00	717,170,000.00	-
Peralatan dan Mesin	1,061,357,503.00	33,425,931,645.00	(32,364,574,142.00)
Gedung dan Bangunan	3,997,105,890.00	1,663,149,915.00	2,333,955,975.00
Jalan dan Jembatan	127,455,000.00	127,455,000.00	-
Irigasi	16,428,500.00	16,428,500.00	-
Aset Tetap Lainnya	-	5,826,000.00	(5,826,000.00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	181,843,200.00	-	181,843,200.00
Aset Tetap Renovasi	539,172,989.00	7,980,968,313.00	(7,441,795,324.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	32,759,482,671.00	474,190,059.00	32,285,292,612.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	57,022,670.00	573,302,771.00	(516,280,101.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	108,336,750.00	(108,336,750.00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	8,214,250.00	16,428,500.00	(8,214,250.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,426,437,228.00	-	1,426,437,228.00
Piutang Lainnya	54,542,636.00	-	54,542,636.00
<b>B. Aset Lainnya</b>			
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32,180,721,502.00	509,953,300.00	31,670,768,202.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	509,953,300.00	32,157,270,447.00	(31,647,317,147.00)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	1,076,568,110.00	(1,076,568,110.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	699,361,250.00	-	699,361,250.00
<b>C. Lain-Lain</b>			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6,937,500.00	-	6,937,500.00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	4,939,500.00	(4,939,500.00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,960,000.00	-	1,960,000.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	45,571,557.00	(45,571,557.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	63,600,989.00	(63,600,989.00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	377,206,860.00	-	377,206,860.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	35,091,746.00	-	35,091,746.00
<b>Jumlah</b>	<b>74,757,464,695.00</b>	<b>78,967,091,356.00</b>	<b>(4,209,626,661.00)</b>

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari:

Tabel 5.3 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	(517,549,668.00)
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	34,855,366.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	4,090,950,020.00
4	Kantor Regional V DKI Jakarta	768,240,285.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,592,572.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6,556,583.00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	(175,561,299.00)
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	542,802.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4,209,626,661.00</b>

Koreksi Lain-lain  
Rp721.500.177,-

**E.4.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp721.500.177,00 dan (Rp1.282.249.319,00). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 5.4 Rincian Nilai Koreksi Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Debit	Kredit	
Beban Gaji Pokok PNS	179,200.00	-	179,200.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	360.00	280.00	80.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	17,920.00	-	17,920.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	20,160,000.00	-	20,160,000.00
Beban Tunjangan PPh PNS	-	164,148.00	(164,148.00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	294,843,426.00	(294,843,426.00)
Beban Langganan Listrik	6,000.00	19,000.00	(13,000.00)
Beban Langganan Telepon	35,250.00	35,250.00	-
Beban Langganan Air	3,018,400.00	-	3,018,400.00
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	294,843,426.00	-	294,843,426.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	692,469,900.00	-	692,469,900.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	5,831,825.00	-	5,831,825.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,016,562,281.00</b>	<b>295,062,104.00</b>	<b>721,500,177.00</b>

Koreksi Lain-Lain berasal dari:

Tabel 5.5 Rincian Koreksi Lain-Lain per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	152,492,785.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	143,281,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	77,760,000.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	46,112,692.00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	193,865,900.00
6	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	107,987,800.00
	<b>Jumlah</b>	<b>721,500,177.00</b>

Transaksi Antar Entitas  
Rp1.013.817.336.126,-

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.013.817.336.126,00 dan Rp624.812.187.507,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 5.6 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	1,028,677,308,609.00
2. Diterima dari Entitas Lain	(26,260,135,552.00)
3. Transfer Keluar	(27,612,255,754.00)
4. Transfer Masuk	27,612,255,754.00
5. Pengesahan Hibah Langsung	3,512,637,669.00
6. Pengesahan Hibah Langsung TAYL	7,887,525,400.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,013,817,336,126.00</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### 1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2023, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp1.028.677.308.609,00.

#### 2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2023, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp26.260.135.552,00).

### 3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp27.612.255.754,00) merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.7 Rincian Transfer Keluar Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	3,663,000.00
	Peralatan dan Mesin	28,550,250,004.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,040,363,770.00)
Kanreg XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	98,706,520.00
<b>JUMLAH</b>		<b>27,612,255,754.00</b>

### 4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp27.612.255.754,00 merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Transfer Masuk Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	2,933,670,015.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(75,250,000.00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	1,697,078,300.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(103,468,750.00)
Kantor Regional III BKN Bandung	Peralatan dan Mesin	3,908,430,915.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(86,996,250.00)
Kantor Regional IV BKN Makasar	Peralatan dan Mesin	3,533,380,837.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(78,575,000.00)
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Peralatan dan Mesin	1,975,242,500.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(84,010,000.00)
Kantor Regional VI BKN Medan	Peralatan dan Mesin	1,098,722,250.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(77,385,000.00)
Kantor Regional VII BKN Palembang	Peralatan dan Mesin	2,887,363,798.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(76,475,000.00)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Peralatan dan Mesin	1,432,519,378.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(78,385,000.00)
Kantor Regional IX BKN Jayapura	Peralatan dan Mesin	1,465,601,135.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(83,420,000.00)
Kantor Regional X BKN Denpasar	Barang Konsumsi	2,442,000.00
	Peralatan dan Mesin	1,851,972,437.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(76,790,000.00)
Kantor Regional XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	1,740,250,010.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(79,857,520.00)
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Peralatan dan Mesin	2,123,042,935.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(77,210,000.00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	646,718,300.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,691,250.00)
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Barang Konsumsi	1,221,000.00
	Peralatan dan Mesin	1,354,963,714.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(42,850,000.00)
<b>JUMLAH</b>		<b>27,612,255,754.00</b>

## 5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.512.637.669,00. Pengesahan Hibah Langsung berasal dari:

- Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp343.782.035,00, yaitu berupa pengesahan hibah Jasa Luar Negeri Prospera dari Australia dalam bentuk *workshop* sesuai dengan BAST Hibah Nomor 09/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 12 Juli 2023.
- Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp1.438.255.994,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, serta Peralatan Mesin yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk UPT Pontianak sesuai dengan BAST Hibah Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 02 Januari 2023.
- Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp149.191.140,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan BAST Hibah Nomor 9.A Tahun 2023 dan Nomor HM.04.01/BA/K/2023, Tanggal 06 Maret 2023.

- d. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.581.408.500,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Tanah, Papan Nama, serta Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk UPT Padang sesuai dengan BAST Hibah Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 dan Nomor 03/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 27 Februari 2023.

#### **6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu**

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.887.525.400,00 yang berasal dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, yaitu berupa pengesahan hibah Tanah dari Pemerintah Kota Batam untuk UPT Batam sesuai dengan BAST Hibah Nomor 175/K/KU.02.02/IV/2022 dan Nomor 08 Tahun 2022, Tanggal 19 April 2022.

#### *Ekuitas Akhir*

*Rp3.208.549.866.357,-*

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing – masing sebesar Rp3.208.549.866.357,00 dan Rp3.173.325.597.443,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tanggal 05 Mei 2023, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin mengajukan Surat Permohonan Hibah Tanah kepada Gubernur Kalimantan Utara Nomor 232/B-PL.02.03/SD/KR.VIII/2023 dengan tujuan untuk pembangunan gedung kantor UPT Tarakan. Atas surat permohonan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Poros Nasional Tanjung Selor-Malinau, Tanjung Selor yang baru disepakati pada tanggal 15 Januari 2024 melalui Perjanjian Naskah Hibah Nomor 100.3.7/0150/PUPR-PERKIM/GUB dan Nomor 43/HM.04.01/2023.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas ±7.532.04 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test (CAT)* dan *Assesment* yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian *Memorandum of Understanding (MoU)* Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
1	Mataram	900/3824.9/BPKAD/2015 06/K/KS/1/2016 21 Desember 2015	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d 2025
2	Semarang	030/000639 04/A/KS/1/2016 12 Januari 2016	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pinjam Pakai s/d 2026
3	Jambi	3228/BAST/BPKPD-7.2/2021 47/HM.05/01/2021 30 Desember 2021	Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d 2026
4	Serang	032/764-BPKAD/2023 2/HM.04.01/2023 03 Maret 2023	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung	Pinjam Pakai s/d Maret 2025
5	Ambon	011-26 Tahun 2022 7/HM.05.01/2022 8 Maret 2022	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amantelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2027
6	Sorong	030/449/2017 01/SDJ/V/2017 23 Mei 2017	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pinjam Pakai s/d Mei 2022
7	Pontianak	68/PKS/BKAD/2022 48/HM.04.01/2022 20 Juni 2022	Jl. Veteran No. 29 Benua Melayu Darat, pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pinjam Pakai s/d Juli 2022
8	Mamuju	B-800/512/2023 11/HM.04.01/2023 06 Maret 2023	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2028
9	Palangkaraya	900/146/BPKAD/2023 5/HM.04.01/2023 22 Februari 2023	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d April 2028

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
10	Lampung	415.4/1753/VI.02/2022 15/HM.05.01/2022 18 Mei 2022	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pinjam Pakai s/d April 2027
11	Batam	124/900.1.4.3/IV/2023 13/HM.04.01/2023 03 April 2023	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pinjam Pakai s/d April 2028
12	Balikpapan	032/103/BPKD 05/K/KS/II/2019 07 Februari 2019	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Februari 2024
13	Pangkal Pinang	01/PP/BAKEUDA/II/2019 06/K/KS/II/2019 28 Februari 2019	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Pangkalpinang, Bangka Belitung	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d Februari 2024
14	Tarakan	032/ASET-VI/006/2019 15/K/KS/VI/2019 13 Juni 2019	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Juli 2024
15	Kupang	BU.028/1635/BPKAD/XI/2020 37.1/A/KS/XI/2020 02 November 2020	Jl. Timor Raya Km.36-Oelamasi	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d November 2025

Berdasarkan MOU Pinjam Pakai antara BKN dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor: 030/448/2017 dan 22/A/KS/2017 tanggal 23 Mei 2017, perjanjian pinjam pakai tanah, gedung dan bangunan UPT Sorong telah berakhir pada Mei 2022. Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Sorong Nomor: 800/281/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemda Kabupaten Sorong Papua Barang, UPT Sorong masih diperbolehkan menempati Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2022-2025.

Pada tahun 2023, BKN memperoleh Hibah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagai pengganti atas MoU Pinjam Pakai untuk UPT Pontianak yang akan digunakan untuk kegiatan operasional mulai tahun 2024 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 01/BAST-BKAD-F/2023 dan Nomor 01/HM.04.01/BA/A/2023, Tanggal 02 Januari 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih memperbolehkan UPT Pontianak untuk menempati Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Pinjam Pakai Nomor: 68/PKS/BKAD/2022 dan Nomor: 48/HM.04.01/2022, Tanggal 20 Juni 2022.

Dari 21 UPT yang dimiliki BKN sampai dengan tahun 2023, terdapat 6 UPT yang telah tercatat mempunyai kepemilikan atas Tanah dan Gedung Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2023

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Proses
1	Kendari	028/947 KR.IV.K.26-25/P.7-44/2018 15 Februari 2018	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2018
2	Gorontalo	900/BKPG/2946/IX/2022 23/PL.03.04/KE/K/2022 22 Agustus 2022	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2022
3	Padang	030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 03/HM.04.01/BA/A/2023 27 Februari 2023	Jl. Adinegoro No 6-7, Kota Padang	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Hibah TA 2023
4	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang	Tanah dan Gedung Bangunan sendiri
5	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2021
6	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2021

3. Terdapat penerimaan Hibah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagai pengganti atas MoU Pinjam Pakai untuk penggunaan Kantor Regional XIV BKN Manokwari sesuai dengan BAST Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada BKN dengan Nomor: 032/508/GPB/2021 dan Nomor: 9/HM.05.01/2021, Tanggal 15 Maret 2021. Atas penerimaan hibah tersebut, Tanah seluas 7.893 m<sup>2</sup> telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. BKN dan Pengesahan atas Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut masih dalam proses kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kemenkeu setempat.
4. Terdapat penerimaan barang dari Perpustakaan Nasional berupa 1 set Pojok Baca Digital (POCADI) yang diterima oleh 2 (dua) satker dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kantor Pusat BKN menerima Transfer (Masuk) dari Perpustakaan Nasional berupa 1 set Pojok Baca Digital (POCADI) dengan nomor Berita Acara Serah Terima Nomor 5708/4.2/PLK.03.07/2022 tanggal 1 Desember 2022 senilai Rp171.971.079,00. Namun, ADK transfer masuk belum dikirim oleh pihak Perpustakaan Nasional. Sehingga sampai T.A. 2022 berakhir, POCADI belum dapat dicatat pada aset BKN.
  - b. Kantor Regional IV BKN Makasar menerima Hibah (Masuk) dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah ditempatkan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sesuai Naskah Perjanjian Bantuan Hibah antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan BKN Regional IV Makasar Tahun Anggaran 2023 Nomor 041/171/Dispu.Arsip, tanggal 31 Januari 2023 berupa Pojok Baca Digital (POCADI) dan kelengkapannya sebesar Rp151.910.000,00 dan Buku Siap Layan sebesar Rp18.135.000,00 atas Bantuan Perpustakaan Nasional Tahun 2021.

5. Terdapat perbedaan pencatatan aset pada aplikasi berdasarkan dokumen sumber dan kondisi fisik di lapangan berupa Gedung dan Bangunan pada UPT Kendari yang berasal dari penerimaan hibah pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3 Perbandingan Rincian Pencatatan Aset dengan Dokumen Sumber dan Cek Fisik di Lapangan

No	Aset BMN	Dokumen Sumber Surat Pengesahan Hibah No. 001/ SP3HL-BJB/ KR.IV/I/2019		Dokumen Sumber Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) No. 219 Tahun 2018		Dokumen Sumber Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) No. 996/007		Hasil Cek Fisik Tim Khusus Kantot Regional IV BKN Makasar	
		Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Luas (M2)	Ket
1	Tanah, Gedung dan Bangunan, Pembawa Air Kotor					2,137	2,508,967,583		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	115	79,639,000			118.63	Lebih Besar
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	402	26,502,458			418.93	Lebih Kecil
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	442	997,941,000			432.29	Lebih Kecil
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	170	47,698,000	170	47,698,000			170	Sama
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	75	44,900,000			77.95	Lebih Besar
7	Bangunan Gedung Kantor Lain lain	-	-	407	29,778,750			405.60	Lebih Kecil
8	Bagunan Gedung tempat pertemuan	-	-	200	382,359,250			189.66	Lebih Kecil
9	Pagar	610	167,825,625	610	167,825,625				
10	Bangunan air kotor	132	16,428,500	132	16,428,500				
11	Tanah	2,137	715,895,000	2,137	715,895,000			2,159	Lebih Besar
<b>TOTAL</b>			<b>947,847,125</b>		<b>2,508,967,583</b>		<b>2,508,967,583</b>		

Selain adanya selisih perhitungan luas pada saat cek fisik, tim khusus yang dibentuk oleh Kantor Regional IV BKN Makasar dan tim monev dari Biro Keuangan menemukan adanya 4 Gedung/Bangunan semi permanen yang belum dilakukan pencatatan secara dokumen karena tidak ada dokumen sumber, yaitu 3 Gedung Semi Permanen Tanpa Atap dan 1 Gedung Semi Permanen untuk Genset. Adapun hasil diskusi dan kordinasi dengan Pembina Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI pada saat penyelenggaraan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III adalah dengan melaksanakan Sensus BMN di seluruh wilayah satuan kerja BKN untuk menginventarisir ulang status kepemilikan barang/aset milik negara yang dikelola oleh BKN sebagai tindak lanjut dari kegiatan penatausahaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

6. Terdapat setoran pendapatan oleh PT. Taspen (Persero) pada Kantor Pusat BKN Jakarta yang berasal dari potongan pegawai BKN yang telah pensiun. Dasar dari setoran tersebut adalah masih adanya kewajiban pengembalian dana ke negara oleh para pegawai BKN hingga masa pensiun. Sistem pemotongannya adalah PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiun memotong setiap bulan (sistem cicilan) gaji para pegawai tersebut kemudian menyetorkan ke BKN tiap bulannya. Pendapatan tersebut di BKN muncul sebagai Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931). Pada Tahun Anggaran 2023, jumlah Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931) senilai Rp7.797.500,00 atas nama Tedih Supriatna sebesar Rp5.112.000,00 Slamet Sugeng Siswanto sebesar Rp316.000,00 dan Adhika Pranaya, SE sebesar Rp2.369.500,00.

Jakarta, Mei 2024

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryono Dwi Putranto

## LAMPIRAN UTAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2023	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
<b>REKENING PENGELUARAN</b>						
1	Kantor Pusat BKN	-	652320172201000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	8100120172411000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	652324504541000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 165 KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA
4	Kantor Regional III BKN Bandung	-	9890840172371000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	9890845606351000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	9890846062541000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 KANREG V BKN JAKARTA	BNI KC JATINEGARA
7	Kantor Regional VI BKN Medan	-	8100126062611000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	9890846223721000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	9890846223861000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KCP DEPARTEMEN KEUANGAN PECENONGAN
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	S-890/WPB.30/KP.063/2015	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
		-	652326223901000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	9890846678821000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC 1946
12	Kantor Regional XI BKN Manado	351,500.00	9890846678961000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KCP JATINEGARA BKN
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	652326679011000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC Jakarta Gatot Subroto
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	-	8100996677521000	S-3029/WPB.12/KP.03/2020	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII BKN BA	BRI SYARIAH
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	652326676521000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 065 KANREG XIV BKN MKW 667652	BRI KC Manokwari
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	654500205051000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KC Otista
<b>REKENING PENERIMAAN</b>						
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	S-6002/WPB.12/KP.03/2019	BPN 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000123304	S-389/WPB.13/KP.04/2018	BPN 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
<b>REKENING LAINNYA</b>						
19	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000127308	S-678/WPB.13/KP.04/2018	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR

**Badan Kepegawaian Negara Jakarta**  
**Informasi Belanja Dibayar Dimuka**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2023**

**Bagian Anggaran** : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
**Eselon I / UAPPA-E1** : ( 01 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Nilai Kontrak	31 Desember 2023
1	Kantor Pusat BKN	Biaya langganan Aplikasi Zoom	1 Bulan	10/12/2023 - 9/01/2024	52/KW/ACW/XII/23	3,200,000	929,032
		Biaya langganan Microsoft Office 365	12 Bulan	03/03/2023 - 02/03/2024	004/SPK/PPK PUSPENKOM/III/2023	139,860,000	23,692,131
		Biaya langganan Koran Tempo (Deputi PMK)	12 Bulan	30/10/2023 - 29/10/2024	00072/PB/KKP/017220/2023	659,340	545,847
		Biaya langganan Koran Tempo (Biro Umum)	12 Bulan	30/10/2023 - 29/10/2024	00073/PB/KKP/017220/2023	659,340	545,847
		Biaya langgananlangganan Envato	12 Bulan	17/05/2023 - 17/05/2024	11931286	1,666,970	626,817
		Biaya langganan CANVA	12 Bulan	1/04/2023 - 31/03/2024	03742-9630960	769,000	191,199
		Biaya langganan IntelliJ IDEA Ultimate	12 Bulan	30/01/2023 - 29/01/2024	INVCZ5785389	36,649,726	2,911,896
		Biaya langganan IntelliJ IDEA Ultimate	12 Bulan	14/02/2023 - 13/02/2024	INVCZ5846957	9,305,011	1,121,700
		Tableau Creator & Explorer	12 Bulan	14/04/2023 - 13/04/2024	25661480	18,904,842	5,371,868
		Biaya langganan MyEclipse Standard	12 Bulan	14/04/2023 - 14/04/2024	696164	560,793	160,445
		Biaya langganan SSL Simpegnas	12 Bulan	22/05/2023 - 22/05/2024	GTI-INV2305-210CBD	6,374,730	2,483,887
		Biaya langganan Database Tools DBForge	12 Bulan	13/06/2023 - 12/06/2024	BV74256002	3,344,976	1,498,842
		Biaya langganan Tableau Creator & Explorer	12 Bulan	05/05/2023 - 04/05/2024	25878982	38,349,661	13,097,562

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Nilai Kontrak	31 Desember 2023
		Biaya langganan Tableau Creator (Server)	12 Bulan	28/07/2023 - 27/07/2024	26694181	25,891,981	14,785,312
		Biaya langganan Tableau Creator (Server)	12 Bulan	16/10/2023 - 15/10/2024	TABWS_00193642	14,959,818	11,812,534
		Biaya langganan Zoom One Business	12 Bulan	8/02/2023 - 8/02/2024	I/KR079/100223	34,077,000	3,631,156
		Biaya langganan Zoom One Pro + Large Meeting	12 Bulan	7/02/2023 - 7/02/2024	I/KR079/100223	81,447,360	8,456,283
		Biaya langganan Renewal IP Blok Address	12 Bulan	1/03/2023 - 1/03/2024	012/BCI-KWT/V/2023	13,320,000	2,213,951
		Biaya langganan Sewa Router IP Transit	12 Bulan	1/03/2023 - 1/03/2024	012/BCI-KWT/V/2023	20,379,600	3,387,345
		Biaya langganan Geo Trust BussinessID Wildcard	12 Bulan	24/02/2023 - 24/02/2024	012/BCI-KWT/V/2023	7,292,700	1,095,898
2	Kanreg II BKN Surabaya	Biaya langganan lisensi <i>freepik</i>	12 Bulan	30/08/2023 - 30/08/2024	INV-C-2023-3788425	2,030,308	1,353,539
		Biaya langganan goole storage	12 Bulan	05/09/2023 - 05/09/2024	SOP.3313-4047-2721-22524	298,590	199,060
3	Kanreg III BKN Bandung	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	12 bulan	08/08/2023 - 08/08/2024	INV213009680	8,250,000	4,967,742
4	Kanreg IV BKN Makasar	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	12 bulan	27/06/2023 - 26/06/2024	INV 213009680	2,499,133	1,215,332
5	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Langganan meeting annual dan zoom one pro annual ( ZOOM meeting )	12 bulan	27/07/2023 - 26/07/2024	INV272343795	12,974,753	7,394,214
		Langganan penyimpanan data (google storage) 100 GB	12 bulan	12/04/2023 - 11/04/2024	00004/KV//KKP/606254 12023	298,590	83,477
		Langganan Barantum, CRM, Chat & Call Center	4 bulan	01/11/2023 - 29/02/2024	#8RTM230802210	9,532,680	4,766,340
7	Kanreg VII BKN Palembang	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	12 bulan	21/01/2023 - 20/01/2024	INV185119465	2,585,646	139,013
		Biaya langganan lisensi <i>Canva</i>	12 bulan	01/02/2023 - 01/02/2024	03686-5777764	1,240,000	103,333
8	Kanreg XIII BKN Banda Aceh	Biaya sewa ruangan tata naskah	12 bulan	10/03/2023 - 10/03/2024	8.1/SP/PPK/KANREG-XIII/III/2023	49,900,000	9,543,716
9	Pusat Pengembangan ASN	Biaya langganan zoom	12 bulan	21/02/2023 - 20/02/2024	009.2/F/IGP/II/2023	18,250,000	2,491,667
		Biaya langganan canva	12 bulan	23/04/2023 - 23/04/2024	03764-6954996	1,240,000	382,758
<b>Jumlah</b>						<b>566,772,548</b>	<b>131,199,742</b>

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>570,438.00</b>	<b>2,330,666,524,668.00</b>	<b>-</b>	<b>2,330,666,524,668.00</b>
20101	TANAH PERSIL	570,438.00	2,330,666,524,668.00	-	2,330,666,524,668.00
20103	LAPANGAN	-	-	-	-
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>67,234.00</b>	<b>704,398,035,892.00</b>	<b>(561,012,680,230.00)</b>	<b>143,385,355,662.00</b>
30101	ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-
30103	ALAT BANTU	216.00	39,065,671,821.00	(29,344,312,493.00)	9,721,359,328.00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216.00	40,686,136,920.00	(30,743,231,976.00)	9,942,904,944.00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108.00	222,531,720.00	(200,062,024.00)	22,469,696.00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	28.00	6,054,885,211.00	(5,614,626,877.00)	440,258,334.00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40.00	126,802,050.00	(114,580,445.00)	12,221,605.00
30303	ALAT UKUR	8.00	109,795,050.00	(57,048,075.00)	52,746,975.00
30401	ALAT PENGOLAHAN	6.00	49,107,300.00	(48,602,950.00)	504,350.00
30501	ALAT KANTOR	9,792.00	82,050,874,380.00	(79,102,508,309.00)	2,948,366,071.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,934.00	149,188,518,672.00	(131,409,062,162.00)	17,779,456,510.00
30601	ALAT STUDIO	1,150.00	40,567,265,657.00	(25,744,100,838.00)	14,823,164,819.00
30602	ALAT KOMUNIKASI	618.00	5,023,790,910.00	(4,908,290,992.00)	115,499,918.00
30603	PERALATAN PEMANCAR	12.00	1,440,181,793.00	(1,111,327,449.00)	328,854,344.00
30701	ALAT KEDOKTERAN	329.00	952,713,794.00	(822,012,535.00)	130,701,259.00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14.00	120,200,625.00	(71,774,675.00)	48,425,950.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	86.00	5,795,051,964.00	(5,516,731,780.00)	278,320,184.00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.00	18,616,500.00	(4,343,850.00)	14,272,650.00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17.00	87,670,000.00	(34,374,991.00)	53,295,009.00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1.00	4,284,000.00	(856,800.00)	3,427,200.00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2.00	2,400,000.00	(1,200,000.00)	1,200,000.00
31001	KOMPUTER UNIT	10,870.00	155,198,977,129.00	(91,669,555,574.00)	63,529,421,555.00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,675.00	174,942,732,982.00	(152,023,638,823.00)	22,919,094,159.00
31503	ALAT SAR	57.00	2,169,719,500.00	(2,169,719,500.00)	-
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12.00	218,556,314.00	(41,967,758.00)	176,588,556.00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8.00	54,978,600.00	(39,390,638.00)	15,587,962.00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27.00	143,815,000.00	(140,600,716.00)	3,214,284.00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7.00	102,758,000.00	(78,758,000.00)	24,000,000.00
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>494.00</b>	<b>868,849,348,970.00</b>	<b>(165,721,828,073.00)</b>	<b>703,127,520,897.00</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	168.00	748,625,031,034.00	(144,860,915,863.00)	603,764,115,171.00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297.00	104,798,653,706.00	(18,551,340,094.00)	86,247,313,612.00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1.00	45,569,000.00	(6,009,096.00)	39,559,904.00
40401	TUGU/TANDA BATAS	28.00	15,380,095,230.00	(2,303,563,020.00)	13,076,532,210.00
<b>134111</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>58,771.00</b>	<b>16,468,966,800.00</b>	<b>(15,831,346,575.00)</b>	<b>637,620,225.00</b>
50101	JALAN	58,761.00	16,466,806,800.00	(15,830,986,579.00)	635,820,221.00
50102	JEMBATAN	10.00	2,160,000.00	(359,996.00)	1,800,004.00
<b>134112</b>	<b>Irigasi</b>	<b>27.00</b>	<b>2,980,446,163.00</b>	<b>(788,035,767.00)</b>	<b>2,192,410,396.00</b>
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2.00	257,076,600.00	(32,623,537.00)	224,453,063.00

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2.00	159,020,000.00	(25,120,446.00)	133,899,554.00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.00	16,428,500.00	(16,428,500.00)	-
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11.00	1,757,299,063.00	(538,865,324.00)	1,218,433,739.00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4.00	440,714,000.00	(99,662,396.00)	341,051,604.00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7.00	349,908,000.00	(75,335,564.00)	274,572,436.00
<b>134113</b>	<b>Jaringan</b>	<b>32.00</b>	<b>5,267,586,977.00</b>	<b>(2,325,752,656.00)</b>	<b>2,941,834,321.00</b>
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2.00	335,572,500.00	(203,544,165.00)	132,028,335.00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4.00	1,783,479,940.00	(257,020,652.00)	1,526,459,288.00
50310	INSTALASI LAIN	7.00	951,173,820.00	(951,173,820.00)	-
50401	JARINGAN AIR MINUM	1.00	103,840,700.00	(60,573,738.00)	43,266,962.00
50402	JARINGAN LISTRIK	16.00	2,028,728,367.00	(807,353,859.00)	1,221,374,508.00
50403	JARINGAN TELEPON	2.00	64,791,650.00	(46,086,422.00)	18,705,228.00
<b>135111</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>	<b>25.00</b>	<b>12,060,376,974.00</b>	<b>(558,669,466.00)</b>	<b>11,501,707,508.00</b>
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1.00	3,998,500.00	-	3,998,500.00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23.00	11,976,140,074.00	(558,669,466.00)	11,417,470,608.00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1.00	80,238,400.00	-	80,238,400.00
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	-	-	-
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11,646.00</b>	<b>1,814,610,125.00</b>	<b>(44,289,663.00)</b>	<b>1,770,320,462.00</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403.00	951,436,025.00	-	951,436,025.00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1.00	21,500,000.00	-	21,500,000.00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211.00	676,955,000.00	-	676,955,000.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29.00	84,719,100.00	(44,289,663.00)	40,429,437.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>	<b>188.00</b>	<b>15,612,040,702.00</b>	<b>(15,497,962,040.00)</b>	<b>114,078,662.00</b>
30103	ALAT BANTU	-	-	-	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	-	-	-
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	-	-	-
30303	ALAT UKUR	-	-	-	-
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	-	-
30501	ALAT KANTOR	3.00	8,881,020.00	(8,881,020.00)	-
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66.00	389,359,732.00	(389,359,732.00)	-
30601	ALAT STUDIO	10.00	946,857,597.00	(946,857,597.00)	-
30602	ALAT KOMUNIKASI	5.00	541,968,610.00	(541,968,610.00)	-
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3.00	436,185,894.00	(436,185,894.00)	-
31001	KOMPUTER UNIT	81.00	2,110,400,875.00	(2,110,400,875.00)	-
31002	PERALATAN KOMPUTER	17.00	11,034,212,974.00	(11,034,212,974.00)	-
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3.00	144,174,000.00	(30,095,338.00)	114,078,662.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	-	-	-
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>708,855.00</b>	<b>3,958,117,937,271.00</b>	<b>(761,780,564,470.00)</b>	<b>3,196,337,372,801.00</b>

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	
1	2	3	4	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500,000.00	(64,279.00)	435,721.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000.00	(64,279.00)	435,721.00
162151	Software	211	125,545,819,487.00	(124,209,997,088.00)	1,335,822,399.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	211	125,545,819,487.00	(124,209,997,088.00)	1,335,822,399.00
162161	Lisensi	-	-	-	-
80101	ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000.00	-	195,000,000.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000.00	-	195,000,000.00
166113	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	28	5,750,743,125.00	(5,560,543,125.00)	190,200,000.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	28	5,750,743,125.00	(5,560,543,125.00)	190,200,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>241</b>	<b>131,492,062,612.00</b>	<b>(129,770,604,492.00)</b>	<b>1,721,458,120.00</b>

**Badan Kepegawaian Negara (BA 088)**  
**Informasi Pendapatan Diterima Dimuka**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2023**

**Bagian Anggaran** : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**Eselon I / UAPPA-EI** : ( 01 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No	Uraian	Jangka Waktu (TMT)	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per Desember 2023	
1	Kantor Pusat BKN	PT. BRI (ATM)	36 bulan 15 Feb 2023 s.d 15 Feb 2026	23/HM.04.01/2023 B.2805.KC-V/LOG/05/2023	119,328,000	84,470,538
		PT. BRI (Kantor)	36 bulan 01 Agst 2021 s.d 31 Jul 2024	33/HM.05.03/2021 B5497/KC-V/LOG/07/2021	221,362,000	43,042,611
		PT Fidac Inovasi Teknologi	60 bulan 20 Mar 2019 s.d 19 Mar 2024	09/A/KS/III/2019 12/FIT/III/2019	54,460,000	2,400,925
		PT. BNI	24 bulan 01 Jan 2022 s.d 31 Des 2023	48/HM.04.01/2023 JNG/PKS/54/23	403,451,000	455,446,000
		PT Fidac Inovasi Teknologi	36 bulan 1 Jan 2022 s.d 1 Jan 2025	44/HM.05.03/2021 2179/FIT/PKS/XII/2021	327,907,000	109,302,333
		PT. Bank DKI	24 bulan 01 Okt 2022 s.d. 30 Sep 2024	33/HM.05.03/2022 01/PKS/DIR/PPA/IX/2022	34,021,000	12,757,875
		Koperasi Promart (1)	36 bulan 01 Sept 2022 s.d. 31 Agus 2025	44/HM.04.01/2022	55,902,000	31,056,667
		Koperasi Promart (2)	36 bulan 01 Des 2022 s.d. 30 Nov 2025	45/HM.04.01/2022	85,850,000	54,848,611
		PT Fidac Inovasi Teknologi (Baru)	24 bulan 02 Jan 2023 s.d. 02 Jan 2025	46/HM.04.01/2022 3861/FIT/PKS/I/2023	111,349,000	55,674,500
		PT. Dayamitra Telekomunikasi	60 bulan 01 Des 2023 s.d. 30 Nov 2028	KEPKA No. 502 Tahun 2023	143,025,000	140,641,250
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SEDAR	36 bulan 07 Feb 2022 s.d. 06 Feb 2025	1/HM0401/2022	3,900,000	1,429,301
3	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Kantin	12 bulan 01 Des 2023 s.d. 01 Des 2024	S-234/MK.6/KNL.0704/2023	3,088,000	2,830,667
		PT. BRI	36 bulan 08 Feb 2023 s.d. 07 Feb 2026	080.1B-RT.01.01/SD/KR.V/2023	37,342,000	26,166,168
4	Kanreg X BKN Denpasar	Koperasi	36 bulan 13 Juni 2023 s.d. 12 Juni 2026	001/KR.X/VI/2023	4,265,000	3,482,110
5	Kanreg XI BKN Manado	PT. BNI (ATM)	36 bulan 01 Sept 2023 s.d 31 Agus 2026	MDO/01/020/PKS SEWA ATM/2023	60,927,000	54,157,333

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per Desember 2023
6	Kanreg XII BKN Pekanbaru	PT. BRI (ATM)	24 bulan	01 Jan 2022 s.d 31 Des 2023	0018/T-PL.03.04/SD/KR.XII/2022	31,824,000	-
7	Pusat Pengembangan ASN	PT. BRI (ATM)	36 bulan	28 April 2022 s.d. 27 April 2025	001/PKS-BMN/A/PUSBANGPEGASN/IV/2022 B.335 KC/XIV/LYI/04/2022	31,351,000	13,821,409
<b>Jumlah</b>						<b>1,729,352,000</b>	<b>1,091,528,298</b>

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

<b>NO</b>	<b>PEMBERI HIBAH</b>	<b>BENTUK HIBAH</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>NILAI HIBAH</b>	<b>SUDAH DISAHKAN</b>	<b>KET</b>
1	Pemerintah Australia (Prospera)	Jasa	LN	343,782,035.00	343,782,035.00	<i>Workshop Online &amp; Diskusi Kelompok</i>
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Barang	DN	1,438,255,994.00	1,438,255,994.00	<i>Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi, serta Peralatan dan Mesin</i>
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Barang	DN	141,191,140.00	141,191,140.00	<i>Tanah</i>
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Barang	DN	1,581,408,500.00	1,581,408,500.00	<i>Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Plang Nama</i>
5	Pemerintah Kota Batam	Barang	DN	7,887,525,400.00	7,887,525,400.00	<i>Tanah</i>
<b>Jumlah</b>				<b>11,392,163,069.00</b>	<b>11,392,163,069.00</b>	

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TGL BAST	DANA PENAMPUNGAN				PEMBAYARAN				PENIHILAN				KET
			NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI	NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI	NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A</b>	<b>KANTOR PUSAT BKN JAKARTA</b>					<b>Rp 20,674,809,270.00</b>				<b>Rp 17,291,451,629.00</b>				<b>Rp 3,383,357,641.00</b>	
1	03/SP-ECT/SDM/XII/2023	21-Dec-2023	03020A	230880301000382	27-Dec-2023	Rp 66,000,000.00	00043A	249991303004226	16-Jan-2024	Rp 66,000,000.00	-	-	-	Rp -	
2	046/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	21-Dec-2023	03007A	230880301000368	27-Dec-2023	Rp 219,060,000.00	00041A	249991304001732	16-Jan-2024	Rp 219,060,000.00	-	-	-	Rp -	
3	041/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	21-Dec-2023	03008A	230880301000346	27-Dec-2023	Rp 405,790,000.00	00040A	249991303004238	16-Jan-2024	Rp 405,790,000.00	-	-	-	Rp -	
4	108/SP-ECT/ROUM/PPK/X/2023	22-Dec-2023	02933A	230880301000331	27-Dec-2023	Rp 327,360,000.00	00004A	249991303000259	4-Jan-2024	Rp 327,360,000.00	-	-	-	Rp -	
5	109/SP-ECT/ROUM/PPK/X/2023	22-Dec-2023	02935A	230880301000332	27-Dec-2023	Rp 317,440,000.00	00005A	249991303000260	4-Jan-2024	Rp 317,440,000.00	-	-	-	Rp -	
6	02/SP/KONTRAK/PPSS/XII/2023	22-Dec-2023	02963A	230880301000336	27-Dec-2023	Rp 564,835,000.00	00022A	249991303004239	16-Jan-2024	Rp 564,835,000.00	-	-	-	Rp -	
7	01/SP/KONTRAK/PPSS/XII/2023	22-Dec-2023	02965A	230880301000325	27-Dec-2023	Rp 1,041,240,000.00	00023A	249991303004240	16-Jan-2024	Rp 1,041,240,000.00	-	-	-	Rp -	
8	085/SPK/PPSS PNPB/PP IV/XII/2023	22-Dec-2023	02969A	230880301000330	27-Dec-2023	Rp 197,749,275.00	00025A	249991303004242	16-Jan-2024	Rp 197,749,275.00	-	-	-	Rp -	
9	03/SP/KONTRAK/PPSS/XII/2023	22-Dec-2023	02961A	230880301000324	27-Dec-2023	Rp 356,550,000.00	00021A	249991303004298	17-Jan-2024	Rp 356,550,000.00	-	-	-	Rp -	
10	70/SPK/ME/ROUM/XII/2023	26-Dec-2023	03010A	230880301000338	27-Dec-2023	Rp 171,971,190.00	00003A	249991304000096	4-Jan-2024	Rp 171,971,190.00	-	-	-	Rp -	
11	030/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	27-Dec-2023	02972A	230880301000343	27-Dec-2023	Rp 2,532,350,000.00	00044A	249991302002128	16-Jan-2024	Rp 2,484,077,391.00	00045A	240880301000020	17-Jan-2024	Rp 48,272,609.00	Perbedaan nilai realisasi (atcost)
12	086/SPK/PPSS PNPB/PP IV/XII/2023	27-Dec-2023	02938A	230880301000337	27-Dec-2023	Rp 193,750,500.00	00030A	249991303004243	16-Jan-2024	Rp 193,750,500.00	-	-	-	Rp -	
13	032/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	27-Dec-2023	02977A	230880301000342	27-Dec-2023	Rp 1,316,300,000.00	00046A	249991302002129	16-Jan-2024	Rp 1,313,129,968.00	00047A	240880301000021	17-Jan-2024	Rp 3,170,032.00	Perbedaan nilai realisasi (atcost)
14	074/SP/ECT/PPSS BUN/BKN/XI/2023	27-Dec-2023	02973A	230880301000344	27-Dec-2023	Rp 109,100,000.00	00020A	249991302002127	16-Jan-2024	Rp 109,100,000.00	-	-	-	Rp -	
15	037/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	29-Dec-2023	02974A	230880301000345	27-Dec-2023	Rp 1,327,500,000.00	00024A	249991304001254	9-Jan-2024	Rp 1,327,500,000.00	-	-	-	Rp -	
16	01/PL.01.01/A.I/2023	31-Dec-2023	02932A	230880301000333	27-Dec-2023	Rp 606,060,000.00	00009A	249991303001115	5-Jan-2024	Rp 606,060,000.00	-	-	-	Rp -	
17	02/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2023	31-Dec-2023	02951A	230880301000370	27-Dec-2023	Rp 80,697,000.00	00008A	249991303001109	5-Jan-2024	Rp 80,697,000.00	-	-	-	Rp -	
18	02/PL.01.01/A.1/I/2023	31-Dec-2023	02924A	230880301000340	27-Dec-2023	Rp 129,527,010.00	00007A	249991303001102	5-Jan-2024	Rp 129,527,010.00	-	-	-	Rp -	
19	01/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/I/2023	31-Dec-2023	02991A	230880301000371	27-Dec-2023	Rp 95,215,800.00	00006A	249991302000511	5-Jan-2024	Rp 95,215,800.00	-	-	-	Rp -	
20	017/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/IX/2023	31-Dec-2023	02940A	230880301000366	27-Dec-2023	Rp 13,325,000.00	00031A	249991303002381	8-Jan-2024	Rp 13,325,000.00	-	-	-	Rp -	
21	020/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023	31-Dec-2023	02954A	230880301000362	27-Dec-2023	Rp 13,300,000.00	00013A	249991303002379	8-Jan-2024	Rp 13,300,000.00	-	-	-	Rp -	
22	024/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023	31-Dec-2023	02959A	230880301000374	27-Dec-2023	Rp 35,298,000.00	00033A	249991304000926	8-Jan-2024	Rp 35,298,000.00	-	-	-	Rp -	
23	018/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/IX/2023	31-Dec-2023	02941A	230880301000367	27-Dec-2023	Rp 13,402,500.00	00010A	249991304000949	8-Jan-2024	Rp 13,402,500.00	-	-	-	Rp -	
24	022/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023	31-Dec-2023	02956A	230880301000361	27-Dec-2023	Rp 12,950,000.00	00014A	249991304000935	8-Jan-2024	Rp 12,950,000.00	-	-	-	Rp -	
25	015/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/VIII/2023	31-Dec-2023	02936A	230880301000351	27-Dec-2023	Rp 7,050,000.00	00012A	249991302000999	8-Jan-2024	Rp 7,050,000.00	-	-	-	Rp -	

NO	URAIAN	TGL BAST	DANA PENAMPUNGAN				PEMBAYARAN				PENIHLAN				KET	
			NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI	NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI	NO SPM	NO SP2D	TGL	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	023/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023	31-Dec-2023	02958A	230880301000350	27-Dec-2023	Rp 13,500,000.00	00017A	249991304000934	8-Jan-2024	Rp 13,485,000.00	00042A	240880301000011	10-Jan-2024	Rp 15,000.00	Perbedaan nilai realisasi (atcost)	
27	019/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/IX/2023	31-Dec-2023	02953A	230880301000294	27-Dec-2023	Rp 15,050,000.00	00032A	249991304000937	8-Jan-2024	Rp 15,050,000.00	-	-	-	Rp -		
28	021/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/X/2023	31-Dec-2023	02957A	230880301000349	27-Dec-2023	Rp 12,950,000.00	00015A	249991304000950	8-Jan-2024	Rp 12,950,000.00	-	-	-	Rp -		
29	044/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	31-Dec-2023	02966A	230880301000323	27-Dec-2023	Rp 78,837,495.00	00048A	249991303003719	10-Jan-2024	Rp 78,837,495.00	-	-	-	Rp -		
30	020/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	31-Dec-2023	02970A	230880301000356	28-Dec-2023	Rp 6,697,528,000.00	00026A	249991304001252	9-Jan-2024	Rp 6,697,528,000.00	-	-	-	Rp -		
31	076/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	31-Dec-2023	02975A	230880301000352	27-Dec-2023	Rp 199,522,500.00	00016A	249991304001733	16-Jan-2024	Rp 199,522,500.00	-	-	-	Rp -		
32	027/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	29-Dec-2023	02971A	230880301000348	27-Dec-2023	Rp 3,204,250,000.00	-	-	-	Rp -	00064A	249991303004560	23-Jan-2024	Rp 3,204,250,000.00	Pemberian kesempatan	
33	091/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	29-Dec-2023	02968A	230880301000326	27-Dec-2023	Rp 127,650,000.00	-	-	-	Rp -	00050A	240880301000012	10-Jan-2024	Rp 127,650,000.00	Wanprestasi	
34	042/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	31-Dec-2023	02964A	230880301000347	27-Dec-2023	Rp 171,700,000.00	00039A	249991303003720	10-Jan-2024	Rp 171,700,000.00	-	-	-	Rp -		
2	<b>KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR</b>					<b>Rp 200,880,000.00</b>					<b>Rp 200,880,000.00</b>					<b>Rp -</b>
1	50/SP/KR.IV/BKN/XII/2023	21-Dec-2023	00558A	231360301000291	27-Dec-2023	Rp 82,000,000.00	00002A	249991303000500	4-Jan-24	Rp 82,000,000.00	-	-	-	Rp -		
2	48/SP/KR.IV/BKN/XII/2023	21-Dec-2023	00557A	231360301000286	27-Dec-2023	Rp 118,880,000.00	00003A	249991303000499	4-Jan-24	Rp 118,880,000.00	-	-	-	Rp -		
3	<b>KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI</b>					<b>Rp 147,555,000.00</b>					<b>Rp 147,555,000.00</b>					<b>Rp -</b>
1	017/KONTRAK/PL/PPK/PBJ-KR.XIV/2023	27-Dec-2023	00399A	230650301000229	27-Dec-2023	Rp 63,000,000.00	00003A	249991303000520	4-Jan-24	Rp 63,000,000.00	-	-	-	Rp -		
2	017/KONTRAK/PL/PPK/PBJ-KR.XIV/2023	27-Dec-2023	00400A	230650301000228	27-Dec-2023	Rp 84,555,000.00	00002A	249991303000519	4-Jan-24	Rp 84,555,000.00	-	-	-	Rp -		
4	<b>PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN</b>					<b>Rp 48,618,000.00</b>					<b>Rp 48,618,000.00</b>					<b>Rp -</b>
1	001/SPK/PUSBANG-ASN/I/2023	31-Dec-2023	00417A	230230301000342	27-Dec-2023	Rp 48,618,000.00	00002A	249991303002735	8-Jan-24	Rp 48,618,000.00	-	-	-	Rp -		
<b>TOTAL</b>						<b>21,071,862,270.00</b>					<b>17,688,504,629.00</b>					<b>3,383,357,641.00</b>

## LAMPIRAN PENDUKUNG

# **LAMPIRAN I**

## **Laporan Realisasi Anggaran**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_kl\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,079,227,170,000	1,028,677,308,609	(50,549,861,391)	95	647,741,833,000	628,062,099,547	(19,679,733,453)	97
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/24 8:20 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl --

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100KD	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	12,890,080,000	18,150,879,000	17,520,583,167	64,793,525	17,455,789,642	96.17	695,089,358
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	12,890,080,000	18,150,879,000	17,520,583,167	64,793,525	17,455,789,642	96.53	695,089,358
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	389,885,956,000	763,458,322,000	722,230,954,776	948,575,476	721,282,379,300	94.48	42,175,942,700
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	389,885,956,000	763,458,322,000	722,230,954,776	948,575,476	721,282,379,300	94.6	42,175,942,700
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	16,711,432,000	24,757,529,000	23,459,832,076	83,539,641	23,376,292,435	94.42	1,381,236,565
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	16,711,432,000	24,757,529,000	23,459,832,076	83,539,641	23,376,292,435	94.76	1,381,236,565
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	15,071,536,000	27,092,383,000	26,208,432,108	3,953,697	26,204,478,411	96.72	887,904,589
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	15,071,536,000	27,092,383,000	26,208,432,108	3,953,697	26,204,478,411	96.74	887,904,589
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	14,719,840,000	29,172,011,000	29,129,112,809	13,285,816	29,115,826,993	99.81	56,184,007
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	14,719,840,000	29,172,011,000	29,129,112,809	13,285,816	29,115,826,993	99.85	56,184,007
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	9,228,017,000	12,153,974,000	11,656,740,559	8,445,956	11,648,294,603	95.84	505,679,397
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9,228,017,000	12,153,974,000	11,656,740,559	8,445,956	11,648,294,603	95.91	505,679,397
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	14,246,729,000	20,328,682,000	20,260,136,686	28,943,425	20,231,193,261	99.52	97,488,739
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	14,246,729,000	20,328,682,000	20,260,136,686	28,943,425	20,231,193,261	99.66	97,488,739
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	14,472,107,000	20,802,734,000	20,485,007,532	5,320,962	20,479,686,570	98.45	323,047,430
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	14,472,107,000	20,802,734,000	20,485,007,532	5,320,962	20,479,686,570	98.47	323,047,430
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	15,584,683,000	22,382,391,000	22,065,885,900	20,801,524	22,045,084,376	98.49	337,306,624
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	15,584,683,000	22,382,391,000	22,065,885,900	20,801,524	22,045,084,376	98.59	337,306,624
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	15,910,955,000	22,213,622,000	21,786,306,528	20,077,916	21,766,228,612	97.99	447,393,388
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	15,910,955,000	22,213,622,000	21,786,306,528	20,077,916	21,766,228,612	98.08	447,393,388
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/24 8:20 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl --

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	13,563,982,000	16,450,052,000	16,278,212,990	57,560,429	16,220,652,561	98.61	229,399,439
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	13,563,982,000	16,450,052,000	16,278,212,990	57,560,429	16,220,652,561	98.96	229,399,439
088011900KD 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	18,273,230,000	35,290,308,000	33,115,817,243	34,692,169	33,081,125,074	93.74	2,209,182,926
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	18,273,230,000	35,290,308,000	33,115,817,243	34,692,169	33,081,125,074	93.84	2,209,182,926
088012200KD 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	12,859,026,000	20,662,136,000	20,277,343,599	4,442,418	20,272,901,181	98.12	389,234,819
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	12,859,026,000	20,662,136,000	20,277,343,599	4,442,418	20,272,901,181	98.14	389,234,819
088012500KD 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	11,584,149,000	12,563,774,000	12,291,299,334	17,018,627	12,274,280,707	97.7	289,493,293
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	11,584,149,000	12,563,774,000	12,291,299,334	17,018,627	12,274,280,707	97.83	289,493,293
088013300KD 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	13,140,975,000	13,702,648,000	13,594,237,928	4,971,036	13,589,266,892	99.17	113,381,108
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	13,140,975,000	13,702,648,000	13,594,237,928	4,971,036	13,589,266,892	99.21	113,381,108
null 020505	Kode UAPPAW Tidak Ada PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	20,229,647,000	20,045,725,000	19,658,880,706	25,052,715	19,633,827,991	97.95	411,897,009
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	20,229,647,000	20,045,725,000	19,658,880,706	25,052,715	19,633,827,991	98.07	411,897,009
	JUMLAH BELANJA 01	608,372,344,000	1,079,227,170,000	1,030,018,783,941	1,341,475,332	1,028,677,308,609	95.44	50549861391
	JUMLAH BELANJA	608,372,344,000	1,079,227,170,000	1,030,018,783,941	1,341,475,332	1,028,677,308,609	95.44	50,549,861,391

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 13/05/24 8:20 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	128,142,722,000	115,858,162,000	112,975,620,150	3,957,123	112,971,663,027	97.51	2,886,498,973
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,355,000	2,045,000	1,860,514	42,034	1,818,480	90.98	226,520
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9,011,566,000	7,155,920,000	7,102,996,726	3,601,860	7,099,394,866	99.26	56,525,134
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,495,117,000	2,140,946,000	1,830,762,192	0	1,830,762,192	85.51	310,183,808
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,839,535,000	4,568,596,000	4,364,660,000	113,847,300	4,250,812,700	95.54	317,783,300
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,632,695,000	17,322,884,000	15,938,571,200	135,599,525	15,802,971,675	92.01	1,519,912,325
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	596,489,000	752,815,000	705,477,476	0	705,477,476	93.71	47,337,524
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,974,351,000	6,521,610,000	5,803,310,610	144,840	5,803,165,770	88.99	718,444,230
511129	Belanja Uang Makan PNS	22,859,828,000	19,790,171,000	17,145,180,000	5,931,400	17,139,248,600	86.63	2,650,922,400
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	865,944,000	732,377,000	696,950,000	0	696,950,000	95.16	35,427,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,833,022,000	2,082,070,000	2,063,430,000	54,886,100	2,008,543,900	99.1	73,526,100
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	490,226,000	478,122,400	0	478,122,400	97.53	12,103,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	38,000	11,006	0	11,006	28.96	26,994
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	36,248,000	29,478,610	0	29,478,610	81.32	6,769,390
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	7,914,000	5,704,960	0	5,704,960	72.09	2,209,040
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	79,670,000	67,380,000	0	67,380,000	84.57	12,290,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	37,400,000	27,157,500	0	27,157,500	72.61	10,242,500
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	130,930,000	107,015,000	0	107,015,000	81.73	23,915,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,625,000	0	0	0	0	4,625,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,476,934,000	1,498,920,000	1,219,951,000	76,000	1,219,875,000	81.39	279,045,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	3,896,000	2,397,000	0	2,397,000	61.52	1,499,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	174,670,840,000	176,658,429,000	176,141,564,636	43,031,950	176,098,532,686	99.71	559,896,314
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	613,340,000	520,514,212	0	520,514,212	84.87	92,825,788
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>367,401,398,000</b>	<b>356,489,232,000</b>	<b>347,228,115,192</b>	<b>361,118,132</b>	<b>346,866,997,060</b>	<b>97.4</b>	<b>9,622,234,940</b>
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	47,074,482,000	46,378,285,000	45,956,426,221	3,085,459	45,953,340,762	99.09	424,944,238
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	667,180,000	666,764,000	664,770,400	0	664,770,400	99.7	1,993,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,216,254,000	447,409,000	428,633,930	0	428,633,930	95.8	18,775,070
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,269,916,000	3,243,378,000	3,220,601,190	2,514,600	3,218,086,590	99.3	25,291,410
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	754,398,000	949,911,000	899,336,443	0	899,336,443	94.68	50,574,557
521211	Belanja Bahan	10,728,761,000	20,172,867,000	18,741,335,136	16,072,352	18,725,262,784	92.9	1,447,604,216
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,221,158,000	16,455,128,000	15,513,796,000	32,159,000	15,481,637,000	94.28	973,491,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,738,090,000	1,281,706,000	1,272,011,000	1,836,000	1,270,175,000	99.24	11,531,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	217,445,000	2,969,431,000	2,827,213,947	0	2,827,213,947	95.21	142,217,053
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	16,878,000	6,605,000	6,604,500	0	6,604,500	99.99	500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,586,039,000	8,371,560,000	8,154,588,757	0	8,154,588,757	97.41	216,971,243
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	86,500,000	70,022,000	61,062,000	0	61,062,000	87.2	8,960,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000,000	21,400,000	21,317,550	0	21,317,550	99.61	82,450

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 13/05/24 8:20 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	16,626,312,000	17,922,664,000	17,897,561,157	6,500	17,897,554,657	99.86	25,109,343
522112	Belanja Langganan Telepon	668,840,000	489,845,000	435,296,388	0	435,296,388	88.86	54,548,612
522113	Belanja Langganan Air	613,952,000	436,050,000	427,903,228	0	427,903,228	98.13	8,146,772
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,091,570,000	3,949,243,000	3,940,308,400	0	3,940,308,400	99.77	8,934,600
522141	Belanja Sewa	7,631,652,000	313,416,783,000	306,727,579,544	0	306,727,579,544	97.87	6,689,203,456
522151	Belanja Jasa Profesi	2,693,910,000	1,868,635,000	1,585,874,050	5,428,480	1,580,445,570	84.87	288,189,430
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,905,802,000	7,435,585,000	7,372,287,023	0	7,372,287,023	99.15	63,297,977
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	522,121,000	994,132,000	973,940,449	0	973,940,449	97.97	20,191,551
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,027,132,000	10,612,340,000	10,548,048,282	5,215,118	10,542,833,164	99.39	69,506,836
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	355,302,000	465,578,000	465,123,866	0	465,123,866	99.9	454,134
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	63,000,000	62,396,955	0	62,396,955	99.04	603,045
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,030,706,000	897,136,000	844,713,722	0	844,713,722	94.16	52,422,278
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,674,335,000	13,669,649,000	13,317,548,235	424,184	13,317,124,051	97.42	352,524,949
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,930,000	246,363,000	219,037,308	428,800	218,608,508	88.91	27,754,492
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	22,883,000	22,881,000	0	22,881,000	99.99	2,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	135,272,000	33,700,000	25,626,164	0	25,626,164	76.04	8,073,836
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	3,000,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,497,638,000	1,724,726,000	1,688,814,118	0	1,688,814,118	97.92	35,911,882
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,801,620,000	106,592,877,000	82,424,047,621	861,413,479	81,562,634,142	77.33	25,030,242,858
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	811,724,000	4,235,569,000	3,524,059,016	1,233,000	3,522,826,016	83.2	712,742,984
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,537,617,000	10,331,441,000	8,974,972,357	690,000	8,974,282,357	86.87	1,357,158,643
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,767,631,000	11,414,880,000	9,724,931,110	49,420,228	9,675,510,882	85.2	1,739,369,118
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	250,000,000	508,722,000	508,701,026	0	508,701,026	100	20,974
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>189,515,167,000</b>	<b>608,381,267,000</b>	<b>569,494,348,093</b>	<b>979,927,200</b>	<b>568,514,420,893</b>	<b>93.61</b>	<b>39,866,846,107</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	337,330,000	196,181,000	196,181,000	0	196,181,000	100	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,398,841,000	92,107,236,000	91,881,174,642	0	91,881,174,642	99.75	226,061,358
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	663,523,000	912,790,000	912,691,268	0	912,691,268	99.99	98,732
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	837,039,000	1,060,429,000	1,029,503,799	0	1,029,503,799	97.08	30,925,201
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,304,844,000	3,698,617,000	3,690,378,016	0	3,690,378,016	99.78	8,238,984
536111	Belanja Modal Lainnya	1,907,641,000	198,000,000	191,475,000	0	191,475,000	96.7	6,525,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	2,110,175,000	1,947,520,000	1,947,508,760	0	1,947,508,760	100	11,240
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>40,559,393,000</b>	<b>100,130,773,000</b>	<b>99,858,912,485</b>	<b>0</b>	<b>99,858,912,485</b>	<b>99.73</b>	<b>271,860,515</b>
	<b>JUMLAH RUPIAH MURNI</b>	<b>597,475,958,000</b>	<b>1,065,001,272,000</b>	<b>1,016,581,375,770</b>	<b>1,341,045,332</b>	<b>1,015,240,330,438</b>	<b>95.45</b>	<b>49,760,941,562</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	180,000,000	178,895,000	178,895,000	0	178,895,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 13/05/24 8:20 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	167,460,000	167,460,000	0	167,460,000	100	0
521211	Belanja Bahan	1,918,300,000	1,616,913,000	1,478,615,132	0	1,478,615,132	91.45	138,297,868
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,302,700,000	1,874,700,000	1,607,100,000	0	1,607,100,000	85.73	267,600,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	170,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	103,939,000	103,337,400	0	103,337,400	99.42	601,600
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	65,000,000	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	132,000,000	95,602,000	95,491,355	0	95,491,355	99.88	110,645
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	3,000,000	5,470,000	1,970,000	0	1,970,000	36.01	3,500,000
522111	Belanja Langganan Listrik	0	346,358,000	346,356,528	0	346,356,528	100	1,472
522131	Belanja Jasa Konsultan	40,000,000	102,725,000	102,586,200	0	102,586,200	99.86	138,800
522141	Belanja Sewa	2,239,693,000	3,197,460,000	2,993,273,488	0	2,993,273,488	93.61	204,186,512
522151	Belanja Jasa Profesi	892,400,000	666,564,000	659,410,500	0	659,410,500	98.93	7,153,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	402,000,000	357,485,000	356,675,440	0	356,675,440	99.77	809,560
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	41,753,000	0	0	0	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,000,000	190,000,000	187,312,500	0	187,312,500	98.59	2,687,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,113,828,000	1,329,481,000	1,220,426,494	430,000	1,219,996,494	91.8	109,484,506
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,674,000	17,716,000	9,915,893	0	9,915,893	55.97	7,800,107
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	344,718,000	328,266,000	325,975,400	0	325,975,400	99.3	2,290,600
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	338,153,000	337,914,681	0	337,914,681	99.93	238,319
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	74,706,000	74,662,420	0	74,662,420	99.94	43,580
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>9,102,066,000</b>	<b>11,019,694,000</b>	<b>10,275,178,431</b>	<b>430,000</b>	<b>10,274,748,431</b>	<b>93.24</b>	<b>744,945,569</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,594,320,000	2,272,700,000	2,233,180,708	0	2,233,180,708	98.26	39,519,292
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	234,431,000	234,429,780	0	234,429,780	100	1,220
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	699,073,000	694,619,252	0	694,619,252	99.36	4,453,748
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1,794,320,000</b>	<b>3,206,204,000</b>	<b>3,162,229,740</b>	<b>0</b>	<b>3,162,229,740</b>	<b>98.63</b>	<b>43,974,260</b>
	<b>JUMLAH PNPB</b>	<b>10,896,386,000</b>	<b>14,225,898,000</b>	<b>13,437,408,171</b>	<b>430,000</b>	<b>13,436,978,171</b>	<b>94.46</b>	<b>788,919,829</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>608,372,344,000</b>	<b>1,079,227,170,000</b>	<b>1,030,018,783,941</b>	<b>1,341,475,332</b>	<b>1,028,677,308,609</b>	<b>95.44</b>	<b>50,549,861,391</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
 Tanggal : 13/05/24 8:19 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_kl --

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000,000	21,400,000	21,317,550	0	21,317,550	99.61	82,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	50,000,000	21,400,000	21,317,550	0	21,317,550	99.61	82,450
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	563,874,000	994,132,000	973,940,449	0	973,940,449	97.97	20,191,551
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	563,874,000	994,132,000	973,940,449	0	973,940,449	97.97	20,191,551
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	613,874,000	1,015,532,000	995,257,999	0	995,257,999	98	20,274,001
	JUMLAH BELANJA	613,874,000	1,015,532,000	995,257,999	0	995,257,999	98	20,274,001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 13/05/24 8:19 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_ira\_bel\_akun\_kl --rekon17

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	128,142,722,000	115,858,162,000	112,975,620,150	3,957,123	112,971,663,027	97.51	2,886,498,973
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,355,000	2,045,000	1,860,514	42,034	1,818,480	90.98	226,520
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9,011,566,000	7,155,920,000	7,102,996,726	3,601,860	7,099,394,866	99.26	56,525,134
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,495,117,000	2,140,946,000	1,830,762,192	0	1,830,762,192	85.51	310,183,808
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,839,535,000	4,568,596,000	4,364,660,000	113,847,300	4,250,812,700	95.54	317,783,300
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,632,695,000	17,322,884,000	15,938,571,200	135,599,525	15,802,971,675	92.01	1,519,912,325
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	596,489,000	752,815,000	705,477,476	0	705,477,476	93.71	47,337,524
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,974,351,000	6,521,610,000	5,803,310,610	144,840	5,803,165,770	88.99	718,444,230
511129	Belanja Uang Makan PNS	22,859,828,000	19,790,171,000	17,145,180,000	5,931,400	17,139,248,600	86.63	2,650,922,400
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	865,944,000	732,377,000	696,950,000	0	696,950,000	95.16	35,427,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,833,022,000	2,082,070,000	2,063,430,000	54,886,100	2,008,543,900	99.1	73,526,100
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>191,253,624,000</b>	<b>176,927,596,000</b>	<b>168,628,818,868</b>	<b>318,010,182</b>	<b>168,310,808,686</b>	<b>95.31</b>	<b>8,616,787,314</b>
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	490,226,000	478,122,400	0	478,122,400	97.53	12,103,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	38,000	11,006	0	11,006	28.96	26,994
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	36,248,000	29,478,610	0	29,478,610	81.32	6,769,390
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	7,914,000	5,704,960	0	5,704,960	72.09	2,209,040
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	79,670,000	67,380,000	0	67,380,000	84.57	12,290,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	37,400,000	27,157,500	0	27,157,500	72.61	10,242,500
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	130,930,000	107,015,000	0	107,015,000	81.73	23,915,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,625,000	0	0	0	0	4,625,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>0</b>	<b>787,051,000</b>	<b>714,869,476</b>	<b>0</b>	<b>714,869,476</b>	<b>90.83</b>	<b>72,181,524</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,476,934,000	1,498,920,000	1,219,951,000	76,000	1,219,875,000	81.39	279,045,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	3,896,000	2,397,000	0	2,397,000	61.52	1,499,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>1,476,934,000</b>	<b>1,502,816,000</b>	<b>1,222,348,000</b>	<b>76,000</b>	<b>1,222,272,000</b>	<b>81.34</b>	<b>280,544,000</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	174,670,840,000	176,658,429,000	176,141,564,636	43,031,950	176,098,532,686	99.71	559,896,314
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	613,340,000	520,514,212	0	520,514,212	84.87	92,825,788
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>174,670,840,000</b>	<b>177,271,769,000</b>	<b>176,662,078,848</b>	<b>43,031,950</b>	<b>176,619,046,898</b>	<b>99.66</b>	<b>652,722,102</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>367,401,398,000</b>	<b>356,489,232,000</b>	<b>347,228,115,192</b>	<b>361,118,132</b>	<b>346,866,997,060</b>	<b>97.4</b>	<b>9,622,234,940</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 13/05/24 8:19 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_ira\_bel\_akun\_kl --rekon17

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	47,254,482,000	46,557,180,000	46,135,321,221	3,085,459	46,132,235,762	99.09	424,944,238
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	667,180,000	666,764,000	664,770,400	0	664,770,400	99.7	1,993,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,216,254,000	447,409,000	428,633,930	0	428,633,930	95.8	18,775,070
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,269,916,000	3,410,838,000	3,388,061,190	2,514,600	3,385,546,590	99.33	25,291,410
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	754,398,000	949,911,000	899,336,443	0	899,336,443	94.68	50,574,557
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>53,162,230,000</b>	<b>52,032,102,000</b>	<b>51,516,123,184</b>	<b>5,600,059</b>	<b>51,510,523,125</b>	<b>99.01</b>	<b>521,578,875</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,647,061,000	21,789,780,000	20,219,950,268	16,072,352	20,203,877,916	92.8	1,585,902,084
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,523,858,000	18,329,828,000	17,120,896,000	32,159,000	17,088,737,000	93.4	1,241,091,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,908,090,000	1,281,707,000	1,272,011,000	1,836,000	1,270,175,000	99.24	11,532,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	217,445,000	3,073,370,000	2,930,551,347	0	2,930,551,347	95.35	142,818,653
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	81,878,000	34,405,000	34,404,500	0	34,404,500	100	500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>18,378,332,000</b>	<b>44,509,090,000</b>	<b>41,577,813,115</b>	<b>50,067,352</b>	<b>41,527,745,763</b>	<b>93.41</b>	<b>2,981,344,237</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,718,039,000	8,467,162,000	8,250,080,112	0	8,250,080,112	97.44	217,081,888
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	89,500,000	75,492,000	63,032,000	0	63,032,000	83.49	12,460,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000,000	21,400,000	21,317,550	0	21,317,550	99.61	82,450
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>10,857,539,000</b>	<b>8,564,054,000</b>	<b>8,334,429,662</b>	<b>0</b>	<b>8,334,429,662</b>	<b>97.32</b>	<b>229,624,338</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	16,626,312,000	18,269,022,000	18,243,917,685	6,500	18,243,911,185	99.86	25,110,815
522112	Belanja Langganan Telepon	668,840,000	489,845,000	435,296,388	0	435,296,388	88.86	54,548,612
522113	Belanja Langganan Air	613,952,000	436,050,000	427,903,228	0	427,903,228	98.13	8,146,772
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,131,570,000	4,051,968,000	4,042,894,600	0	4,042,894,600	99.78	9,073,400
522141	Belanja Sewa	9,871,345,000	316,614,243,000	309,720,853,032	0	309,720,853,032	97.82	6,893,389,968
522151	Belanja Jasa Profesi	3,586,310,000	2,535,199,000	2,245,284,550	5,428,480	2,239,856,070	88.56	295,342,930
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,307,802,000	7,793,070,000	7,728,962,463	0	7,728,962,463	99.18	64,107,537
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	563,874,000	994,132,000	973,940,449	0	973,940,449	97.97	20,191,551
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>44,370,005,000</b>	<b>351,183,529,000</b>	<b>343,819,052,395</b>	<b>5,434,980</b>	<b>343,813,617,415</b>	<b>97.9</b>	<b>7,369,911,585</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,027,132,000	10,612,340,000	10,548,048,282	5,215,118	10,542,833,164	99.39	69,506,836
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	355,302,000	465,578,000	465,123,866	0	465,123,866	99.9	454,134
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	0	63,000,000	62,396,955	0	62,396,955	99.04	603,045
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,030,706,000	897,136,000	844,713,722	0	844,713,722	94.16	52,422,278
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,864,335,000	13,859,649,000	13,504,860,735	424,184	13,504,436,551	97.44	355,212,449
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,930,000	246,363,000	219,037,308	428,800	218,608,508	88.91	27,754,492

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 13/05/24 8:19 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_ira\_bel\_akun\_kl --rekon17

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	22,883,000	22,881,000	0	22,881,000	99.99	2,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	135,272,000	33,700,000	25,626,164	0	25,626,164	76.04	8,073,836
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	3,000,000	0	0	0	0		0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,497,638,000	1,724,726,000	1,688,814,118	0	1,688,814,118	97.92	35,911,882
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>27,155,315,000</b>	<b>27,940,375,000</b>	<b>27,396,502,150</b>	<b>6,068,102</b>	<b>27,390,434,048</b>	<b>98.05</b>	<b>549,940,952</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,915,448,000	107,922,358,000	83,644,474,115	861,843,479	82,782,630,636	77.5	25,139,727,364
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	878,398,000	4,253,285,000	3,533,974,909	1,233,000	3,532,741,909	83.09	720,543,091
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,882,335,000	10,659,707,000	9,300,947,757	690,000	9,300,257,757	87.25	1,359,449,243
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,767,631,000	11,753,033,000	10,062,845,791	49,420,228	10,013,425,563	85.62	1,739,607,437
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>44,443,812,000</b>	<b>134,588,383,000</b>	<b>106,542,242,572</b>	<b>913,186,707</b>	<b>105,629,055,865</b>	<b>79.16</b>	<b>28,959,327,135</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	250,000,000	583,428,000	583,363,446	0	583,363,446	99.99	64,554
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>250,000,000</b>	<b>583,428,000</b>	<b>583,363,446</b>	<b>0</b>	<b>583,363,446</b>	<b>99.99</b>	<b>64,554</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>198,617,233,000</b>	<b>619,400,961,000</b>	<b>579,769,526,524</b>	<b>980,357,200</b>	<b>578,789,169,324</b>	<b>93.6</b>	<b>40,611,791,676</b>
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	337,330,000	196,181,000	196,181,000	0	196,181,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311</b>	<b>337,330,000</b>	<b>206,181,000</b>	<b>206,181,000</b>	<b>0</b>	<b>206,181,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,993,161,000	94,379,936,000	94,114,355,350	0	94,114,355,350	99.72	265,580,650
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	663,523,000	912,790,000	912,691,268	0	912,691,268	99.99	98,732
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>34,656,684,000</b>	<b>95,292,726,000</b>	<b>95,027,046,618</b>	<b>0</b>	<b>95,027,046,618</b>	<b>99.72</b>	<b>265,679,382</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	837,039,000	1,294,860,000	1,263,933,579	0	1,263,933,579	97.61	30,926,421
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,504,844,000	4,397,690,000	4,384,997,268	0	4,384,997,268	99.71	12,692,732
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>3,341,883,000</b>	<b>5,692,550,000</b>	<b>5,648,930,847</b>	<b>0</b>	<b>5,648,930,847</b>	<b>99.23</b>	<b>43,619,153</b>
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,907,641,000	198,000,000	191,475,000	0	191,475,000	96.7	6,525,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	2,110,175,000	1,947,520,000	1,947,508,760	0	1,947,508,760	100	11,240
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361</b>	<b>4,017,816,000</b>	<b>2,145,520,000</b>	<b>2,138,983,760</b>	<b>0</b>	<b>2,138,983,760</b>	<b>99.7</b>	<b>6,536,240</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>42,353,713,000</b>	<b>103,336,977,000</b>	<b>103,021,142,225</b>	<b>0</b>	<b>103,021,142,225</b>	<b>99.69</b>	<b>315,834,775</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
 Tanggal : 13/05/24 8:19 AM  
 Halaman : 4  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl --rekon17

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	608,372,344,000	1,079,227,170,000	1,030,018,783,941	1,341,475,332	1,028,677,308,609	95.44	50,549,861,391

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 13/05/24 8:20 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	825,000,000	668,250,000	668,032,455	0	668,032,455	99.97	217,545
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	2,000,000,000	480,891,876,000	443,759,144,562	694,165,860	443,064,978,702	1429.85	37,826,897,298
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	6,000,000,000	5,929,600,000	5,877,640,232	1,140,000	5,876,500,232	99.1	53,099,768
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3,544,000,000	2,881,930,000	2,880,134,235	4,886,000	2,875,248,235	99.77	6,681,765
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	8,825,000,000	8,320,401,000	8,328,336,818	37,518,177	8,290,818,641	99.64	29,582,359
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,053,182,000	5,822,537,000	5,722,420,710	14,670,420	5,707,750,290	1451.97	114,786,710
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	8,764,982,000	7,766,705,000	7,675,121,454	50,678,783	7,624,442,671	1476.48	142,262,329
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	12,410,769,000	8,762,243,000	8,737,797,425	114,736,147	8,623,061,278	1467.18	139,181,722
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CO</b>	<b>50,422,933,000</b>	<b>521,043,542,000</b>	<b>483,648,627,891</b>	<b>917,795,387</b>	<b>482,730,832,504</b>	<b>92.823</b>	<b>38,312,709,496</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2,138,682,000	2,098,746,000	2,068,460,972	547,500	2,067,913,472	1127.38	30,832,528
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	813,184,000	967,776,000	951,226,556	0	951,226,556	98.29	16,549,444
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	850,000,000	688,500,000	678,373,477	0	678,373,477	98.53	10,126,523
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	14,037,500,000	13,771,200,000	13,705,600,117	0	13,705,600,117	99.52	65,599,883
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	200,000,000	185,500,000	184,856,178	1,038,300	183,817,878	99.09	1,682,122
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6,948,096,000	6,671,093,000	6,597,865,941	1,160,000	6,596,705,941	1580.28	74,387,059
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	521,314,732,000	518,979,125,000	508,159,378,610	420,504,145	507,738,874,465	1574.67	11,240,250,535
4844	Legislasi dan Litigasi	750,831,000	595,790,000	586,986,028	0	586,986,028	98.52	8,803,972

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 13/05/24 8:20 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>547,053,025,000</b>	<b>543,957,730,000</b>	<b>532,932,747,879</b>	<b>423,249,945</b>	<b>532,509,497,934</b>	<b>97.973</b>	<b>11,448,232,066</b>
	<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>	<b>597,475,958,000</b>	<b>1,065,001,272,000</b>	<b>1,016,581,375,770</b>	<b>1,341,045,332</b>	<b>1,015,240,330,438</b>	<b>95.454</b>	<b>49,760,941,562</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	5,318,454,000	6,499,459,000	5,779,741,564	0	5,779,741,564	88.93	719,717,436
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	1,885,478,000	1,884,207,000	1,868,451,509	0	1,868,451,509	99.16	15,755,491
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	1,898,134,000	2,573,028,000	2,564,348,058	430,000	2,563,918,058	99.65	9,109,942
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CO</b>	<b>9,102,066,000</b>	<b>10,956,694,000</b>	<b>10,212,541,131</b>	<b>430,000</b>	<b>10,212,111,131</b>	<b>93.208</b>	<b>744,582,869</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,794,320,000	3,269,204,000	3,224,867,040	0	3,224,867,040	197.93	44,336,960
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>1,794,320,000</b>	<b>3,269,204,000</b>	<b>3,224,867,040</b>	<b>0</b>	<b>3,224,867,040</b>	<b>98.644</b>	<b>44,336,960</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PNPB</b>	<b>10,896,386,000</b>	<b>14,225,898,000</b>	<b>13,437,408,171</b>	<b>430,000</b>	<b>13,436,978,171</b>	<b>94.457</b>	<b>788,919,829</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>608,372,344,000</b>	<b>1,079,227,170,000</b>	<b>1,030,018,783,941</b>	<b>1,341,475,332</b>	<b>1,028,677,308,609</b>	<b>95.44</b>	<b>50,549,861,391</b>

# **LAMPIRAN II**

## **Neraca**

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak 13/05/24 8:19 AM

Halaman 1

lap\_neraca\_kl\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1	(1)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,587,816	823,727,649	(819,139,833)	(99.44)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	131,199,742	63,196,307	68,003,435	107.61
Piutang Bukan Pajak	2,747,393,181	8,102,750	2,739,290,431	33,806.92
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(13,736,966)	(33,755)	(13,703,211)	40,596.09
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>2,733,656,215</b>	<b>8,068,995</b>	<b>2,725,587,220</b>	<b>33,778.52</b>
Persediaan	7,106,175,160	7,837,731,684	(731,556,524)	(9.33)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>9,975,618,933</b>	<b>8,732,724,636</b>	<b>1,242,894,297</b>	<b>14.23</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,330,666,524,668	2,322,022,352,128	8,644,172,540	0.37
Peralatan dan Mesin	704,398,035,892	644,039,889,022	60,358,146,870	9.37
Gedung dan Bangunan	868,849,348,970	859,028,655,212	9,820,693,758	1.14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,716,999,940	24,589,544,940	127,455,000	0.52
Aset Tetap Lainnya	13,874,987,099	19,850,308,423	(5,975,321,324)	(30.10)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	168,877,064	160,452,975	8,424,089	5.25
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(746,282,602,430)</b>	<b>(703,556,040,854)</b>	<b>(42,726,561,576)</b>	<b>6.07</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3,196,392,171,203</b>	<b>3,166,135,161,846</b>	<b>30,257,009,357</b>	<b>0.96</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	125,741,319,487	142,021,610,016	(16,280,290,529)	(11.46)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	21,071,862,270	0	21,071,862,270	0.00
Aset Lain-lain	21,362,783,827	12,659,761,686	8,703,022,141	68.75
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(145,268,566,532)</b>	<b>(151,280,443,054)</b>	<b>6,011,876,522</b>	<b>(3.97)</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>22,907,399,052</b>	<b>3,400,928,648</b>	<b>19,506,470,404</b>	<b>573.56</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,229,275,189,188</b>	<b>3,178,268,815,130</b>	<b>51,006,374,058</b>	<b>1.60</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,629,558,217	4,023,347,005	15,606,211,212	387.89
Pendapatan Diterima Dimuka	1,091,528,298	914,314,432	177,213,866	19.38
Uang Muka dari KPPN	0	1	(1)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	4,236,316	5,556,249	(1,319,933)	(23.76)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20,725,322,831</b>	<b>4,943,217,687</b>	<b>15,782,105,144</b>	<b>319.27</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20,725,322,831</b>	<b>4,943,217,687</b>	<b>15,782,105,144</b>	<b>319.27</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	3,208,549,866,357	3,173,325,597,443	35,224,268,914	1.11
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,208,549,866,357</b>	<b>3,173,325,597,443</b>	<b>35,224,268,914</b>	<b>1.11</b>

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak 13/05/24 8:19 AM

Halaman 2

lap\_neraca\_kl\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,208,549,866,357</b>	<b>3,173,325,597,443</b>	<b>35,224,268,914</b>	<b>1.11</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3,229,275,189,188</b>	<b>3,178,268,815,130</b>	<b>51,006,374,058</b>	<b>1.60</b>

Keterangan :

FINAL

# **LAMPIRAN III**

## **Laporan Operasional**

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,670,868,321	18,717,242,822	4,953,625,499	26.466
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	23,670,868,321	18,717,242,822	4,953,625,499	26.466
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	23,670,868,321	18,717,242,822	4,953,625,499	26.466
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	345,122,172,386	325,097,041,001	20,025,131,385	6.16
Beban Persediaan	7,953,984,101	11,376,993,028	(3,423,008,927)	(30.087)
Beban Barang dan Jasa	436,964,717,186	136,707,875,959	300,256,841,227	219.634
Beban Pemeliharaan	27,841,739,788	25,634,007,494	2,207,732,294	8.613
Beban Perjalanan Dinas	104,054,816,105	67,929,757,287	36,125,058,818	53.18
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78,060,519,188	73,379,526,292	4,680,992,896	6.379
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13,703,211	33,755	13,669,456	40,496.092
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1,000,011,651,965</b>	<b>640,125,234,816</b>	<b>359,886,417,149</b>	<b>56.221</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(976,340,783,644)</b>	<b>(621,407,991,994)</b>	<b>(354,932,791,650)</b>	<b>57.118</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	547,206,678	496,024,925	51,181,753	10.318
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	568,247,120	904,442,551	(336,195,431)	(37.172)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21,040,442	408,417,626	(387,377,184)	(94.848)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	688,636,238	4,292,772,156	(3,604,135,918)	(83.958)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,227,446,601	4,989,560,690	(3,762,114,089)	(75.4)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	538,810,363	696,788,534	(157,978,171)	(22.672)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>1,235,842,916</b>	<b>4,788,797,081</b>	<b>(3,552,954,165)</b>	<b>(74.193)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(975,104,940,728)</b>	<b>(616,619,194,913)</b>	<b>(358,485,745,815)</b>	<b>58.137</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(975,104,940,728)</b>	<b>(616,619,194,913)</b>	<b>(358,485,745,815)</b>	<b>58.137</b>

Keterangan :

FINAL

# **LAMPIRAN IV**

## **Laporan Perubahan Ekuitas**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,173,325,597,443	3,166,883,637,818	6,441,959,625	0.203
SURPLUS/DEFISIT-LO	(975,104,940,728)	(616,619,194,913)	(358,485,745,815)	58.137
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,488,126,484)	(1,751,032,969)	(1,737,093,515)	99.204
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	433,260	(433,260)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,209,626,661)	(469,216,910)	(3,740,409,751)	797.16
LAIN-LAIN	721,500,177	(1,282,249,319)	2,003,749,496	(156.26 8)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,013,817,336,126	624,812,187,507	389,005,148,619	62.26
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	35,224,268,914	6,441,959,625	28,782,309,289	446.794
EKUITAS AKHIR	3,208,549,866,357	3,173,325,597,443	35,224,268,914	1.11

Keterangan :

FINAL

# **LAMPIRAN V**

## **Neraca Percobaan**

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 13/05/2024

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	823,727,649	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	63,196,307	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,102,750	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	33,755
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,468,125,581	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	313,613,087	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,247,700	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	51,745,316	0
0.0	131111	Tanah	2,322,022,352,128	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	644,039,889,022	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	859,028,655,212	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,341,511,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,980,446,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,267,586,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	18,029,872,298	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,820,436,125	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	160,452,975	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	544,799,857,443
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	138,646,866,145
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	15,260,802,198
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	669,059,656
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,210,344,889
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,969,110,523
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	141,786,451,166	0
0.0	162161	Lisensi	39,658,850	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7,722,632,436	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4,937,129,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	7,594,803,872
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	57,137
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	138,914,681,445
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	39,658,850
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	4,731,241,750
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,547,884,401
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,657,291,204
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	818,171,400
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	914,314,432

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

*Tgl. Cetak 13/05/2024*

*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua1\_kl --rekon17*

<b>KODE TRANS</b>	<b>KODE PERKIRAAN</b>	<b>NAMA PERKIRAAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	5,556,249
0.0	391111	Ekuitas	0	3,173,325,597,443
<b>JUMLAH</b>			<b>4,033,105,332,793</b>	<b>4,033,105,332,793</b>

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,587,816	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	131,199,742	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,747,393,181	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	13,736,966
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500	0
0.0	131111	Tanah	2,330,666,524,668	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,980,446,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,267,586,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	561,012,680,230
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	165,721,828,073
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	15,831,346,575
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	788,035,767
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,325,752,656
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	602,959,129
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	125,545,819,487	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	21,071,862,270	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	15,612,040,702	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,750,743,125	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	15,497,962,040
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	64,279
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	124,209,997,088
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	5,560,543,125
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	93,499,510
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,583,902,578
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	17,952,156,129
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,091,528,298
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,236,316
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,028,677,308,609
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,260,135,552	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313211	Transfer Keluar	27,612,255,754	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,612,255,754
0.0	391111	Ekuitas	0	3,173,325,597,443
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,209,626,661	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	721,500,177
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	3,512,637,669
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,887,525,400
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,738,508
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	509,122,616
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,385,996
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	913,125,397
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	1,278,300,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	432,110,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,133,238,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	14,927,901,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	6,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,986,193,924
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	378,738,730
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	833,910,371
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	7,797,500
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	112,810,391,237	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,811,054	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,099,636,436	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,828,487,450	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,247,757,700	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	14,849,075,675	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	696,183,847	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,803,455,450	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	16,840,473,310	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	696,375,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,005,413,900	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	478,122,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	11,106	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,478,610	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,704,960	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	68,360,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	27,157,500	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	108,205,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,211,730,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,397,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	175,791,430,539	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	520,514,212	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	46,093,599,159	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	656,372,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	422,907,330	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,385,546,590	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	890,761,693	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,181,115,785	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	17,051,188,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,270,175,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,931,780,347	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	34,404,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,195,673,327	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	433,715,059	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	418,003,623	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,042,879,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	309,692,337,950	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,238,326,070	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	8,051,990,304	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	973,940,449	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,492,615,169	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	62,396,955	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	781,112,733	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,502,149,553	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	22,881,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	28,123,664	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,691,646,618	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	80,771,971,991	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,496,674,909	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,300,257,757	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,902,548,002	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	583,363,446	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48,518,688,033	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,558,681,827	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	462,207,627	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	110,761,861	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	115,407,767	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60,285,834	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	2,202,631,082	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	15,687,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	16,160,515	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,953,984,101	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,240,758,396	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	5,055,700	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	33,755
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	13,736,966	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	21,040,442	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	538,810,363	0
JUMLAH			<b>5,179,493,649,608</b>	<b>5,179,493,649,608</b>

Keterangan :

FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,028,677,308,609
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,260,135,552	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,738,508
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	509,122,616
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,385,996
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,098,442,013
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	1,278,300,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	432,110,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,133,238,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	14,927,901,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	6,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,862,057,347
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	1,071,208,630
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	833,910,371
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	40,923,571
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	7,797,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	112,975,620,150	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,957,123
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	42,034
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,860,514	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,601,860
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,102,996,726	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,830,762,192	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	113,847,300
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,364,660,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	135,599,525
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,938,571,200	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	705,477,476	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,803,310,610	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	144,840
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	5,931,400
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	17,145,180,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	696,950,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,063,430,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	54,886,100
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	478,122,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,006	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,478,610	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,704,960	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	67,380,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27,157,500	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	107,015,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	76,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,219,951,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,397,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	43,031,950
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	176,141,564,636	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	520,514,212	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,085,459
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	46,135,321,221	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	664,770,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	428,633,930	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,388,061,190	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,514,600
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	899,336,443	0
3.0	521211	Belanja Bahan	20,219,950,268	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	16,072,352
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	32,159,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,120,896,000	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,836,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,272,011,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,930,551,347	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	34,404,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,250,080,112	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	63,032,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	21,317,550	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	6,500
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,243,917,685	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	435,296,388	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	427,903,228	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	4,042,894,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	309,720,853,032	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	5,428,480
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,245,284,550	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	7,728,962,463	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	973,940,449	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 088 ) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 8:19 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,548,048,282	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	5,215,118
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	465,123,866	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	62,396,955	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	844,713,722	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	424,184
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,504,860,735	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	219,037,308	0
3.1	523123	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	428,800
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	22,881,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	25,626,164	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,688,814,118	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,644,474,115	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	861,843,479
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,533,974,909	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,233,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,300,947,757	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	690,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,062,845,791	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	49,420,228
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	583,363,446	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	10,000,000	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	196,181,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94,114,355,350	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	912,691,268	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,263,933,579	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,384,997,268	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	191,475,000	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	1,947,508,760	0
JUMLAH			<b>1,056,278,919,493</b>	<b>1,056,278,919,493</b>

Keterangan :

FINAL

# **LAMPIRAN VI**

## **Laporan Realisasi Pendapatan**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,738,508	0	4,738,508	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	509,122,616	0	509,122,616	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,385,996	0	54,385,996	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	678,235,000	1,098,442,013	0	1,098,442,013	161.96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,278,300,000	1,278,300,000	0	1,278,300,000	100
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	432,110,000	432,110,000	0	432,110,000	100
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,117,770,000	3,133,238,000	0	3,133,238,000	100.5
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	13,890,111,000	14,927,901,000	0	14,927,901,000	107.47
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,000,000	0	6,000,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,862,057,347	0	2,862,057,347	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,071,208,630	0	1,071,208,630	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	833,910,371	0	833,910,371	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,923,571	0	40,923,571	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,797,500	0	7,797,500	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b>	<b>19,396,526,000</b>	<b>26,260,135,552</b>	<b>0</b>	<b>26,260,135,552</b>	<b>135.39</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>19,396,526,000</b>	<b>26,260,135,552</b>	<b>0</b>	<b>26,260,135,552</b>	<b>135.39</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
<b>01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b>					
088010100KD	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	0	62,709,505	0	62,709,505	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	0	62,709,505	0	62,709,505	
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	14,568,346,000	19,172,182,640	0	19,172,182,640	131.6
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	14,568,346,000	19,172,182,640	0	19,172,182,640	131.6
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	0	502,609,813	0	502,609,813	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	0	502,609,813	0	502,609,813	
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	0	272,256,196	0	272,256,196	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	0	272,256,196	0	272,256,196	
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	0	120,087,687	0	120,087,687	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	0	120,087,687	0	120,087,687	
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	108,000,834	0	108,000,834	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	108,000,834	0	108,000,834	
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	0	108,216,050	0	108,216,050	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	0	108,216,050	0	108,216,050	
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	0	53,505,240	0	53,505,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	0	53,505,240	0	53,505,240	
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN					
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	0	31,227,144	0	31,227,144	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	0	31,227,144	0	31,227,144	
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN					
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	0	285,362,151	0	285,362,151	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	0	285,362,151	0	285,362,151	
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA					
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	0	82,944,559	0	82,944,559	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	82,944,559	0	82,944,559	
088011900KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	0	298,333,817	0	298,333,817	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	298,333,817	0	298,333,817	
088012200KD	BA(088) ES1(01) BALI					
667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	0	53,322,794	0	53,322,794	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	0	53,322,794	0	53,322,794	
088012500KD	BA(088) ES1(01) PAPUA					
622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	0	110,458,295	0	110,458,295	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	0	110,458,295	0	110,458,295	
088013300KD	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT					
667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	0	25,560,773	0	25,560,773	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088013300KD BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	0	25,560,773	0	25,560,773	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	4,828,180,000	4,973,358,054	0	4,973,358,054	103.01
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	4,828,180,000	4,973,358,054	0	4,973,358,054	103.01
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19,396,526,000	26,260,135,552	0	26,260,135,552	135.39
	JUMLAH PENDAPATAN	19,396,526,000	26,260,135,552	0	26,260,135,552	135.39

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,738,508	0	4,738,508	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	509,122,616	0	509,122,616	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,385,996	0	54,385,996	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	678,235,000	1,098,442,013	0	1,098,442,013	161.96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,278,300,000	1,278,300,000	0	1,278,300,000	100
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>1,956,535,000</b>	<b>2,944,989,133</b>	<b>0</b>	<b>2,944,989,133</b>	<b>150.52</b>
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	432,110,000	432,110,000	0	432,110,000	100
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252</b>	<b>432,110,000</b>	<b>432,110,000</b>	<b>0</b>	<b>432,110,000</b>	<b>100</b>
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,117,770,000	3,133,238,000	0	3,133,238,000	100.5
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	13,890,111,000	14,927,901,000	0	14,927,901,000	107.47
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254</b>	<b>17,007,881,000</b>	<b>18,061,139,000</b>	<b>0</b>	<b>18,061,139,000</b>	<b>106.19</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,862,057,347	0	2,862,057,347	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258</b>	<b>0</b>	<b>2,862,057,347</b>	<b>0</b>	<b>2,862,057,347</b>	<b>0</b>
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,071,208,630	0	1,071,208,630	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	833,910,371	0	833,910,371	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 088**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 13/05/24 8:21 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,923,571	0	40,923,571	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,797,500	0	7,797,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,953,840,072	0	1,953,840,072	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	19,396,526,000	26,260,135,552	0	26,260,135,552	135.39
	JUMLAH PENDAPATAN	19,396,526,000	26,260,135,552	0	26,260,135,552	135.39

# **LAMPIRAN VII**

## **Laporan Posisi BMN di Neraca**

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL**  
**POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 088      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tanggal : 13/05/24 8:48 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	7,468,125,581
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	313,613,087
117114	Suku Cadang	4,247,700
117199	Persediaan Lainnya	51,745,316
131111	Tanah	2,322,022,352,128
132111	Peralatan dan Mesin	644,039,889,022
133111	Gedung dan Bangunan	859,028,655,212
134111	Jalan dan Jembatan	16,341,511,800
134112	Irigasi	2,980,446,163
134113	Jaringan	5,267,586,977
135111	Aset Tetap Renovasi	18,029,872,298
135121	Aset Tetap Lainnya	1,820,436,125
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	160,452,975
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(544,799,857,443)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(138,646,866,145)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(15,260,802,198)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(669,059,656)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,210,344,889)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,969,110,523)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	141,786,451,166
162161	Lisensi	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7,722,632,436
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4,937,129,250
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(7,594,803,872)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(57,137)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(138,914,681,445)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(39,658,850)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(4,731,241,750)
<b>J U M L A H</b>		<b>3,177,373,822,178</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 088      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl.Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:48 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500
131111	Tanah	2,330,666,524,668
132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892
133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,980,446,163
134113	Jaringan	5,267,586,977
135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974
135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(561,012,680,230)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(165,721,828,073)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(15,831,346,575)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(788,035,767)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,325,752,656)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(602,959,129)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	125,545,819,487
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,612,040,702
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,750,743,125
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(15,497,962,040)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(64,279)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(124,209,997,088)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(5,560,543,125)
<b>J U M L A H</b>		<b>3,205,333,883,145</b>

# **LAMPIRAN VIII**

## **Laporan Barang Kuasa Pengguna**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:48 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>537,313</b>	<b>2,322,022,352,128</b>	<b>38,448</b>	<b>9,362,617,540</b>	<b>5,323</b>	<b>718,445,000</b>	<b>570,438</b>	<b>2,330,666,524,668</b>
20101	TANAH PERSIL	537,313	2,322,022,352,128	38,448	9,362,617,540	5,323	718,445,000	570,438	2,330,666,524,668
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>62,658</b>	<b>644,039,889,022</b>	<b>10,048</b>	<b>123,305,435,063</b>	<b>5,472</b>	<b>62,947,288,193</b>	<b>67,234</b>	<b>704,398,035,892</b>
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	208	38,613,632,441	14	3,536,033,910	6	3,083,994,530	216	39,065,671,821
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	219	40,729,621,920	0	0	3	43,485,000	216	40,686,136,920
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	102	208,881,720	9	19,940,000	3	6,290,000	108	222,531,720
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	24	5,631,833,900	4	444,268,311	0	21,217,000	28	6,054,885,211
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	39	121,440,750	1	5,361,300	0	0	40	126,802,050
30303	ALAT UKUR	9	107,363,800	1	4,828,500	2	2,397,250	8	109,795,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	0	0	0	0	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	9,537	82,001,108,075	558	3,089,969,009	303	3,040,202,704	9,792	82,050,874,380
30502	ALAT RUMAH TANGGA	35,889	140,615,404,891	5,253	14,249,884,665	3,208	5,676,770,884	37,934	149,188,518,672
30601	ALAT STUDIO	1,059	27,538,290,033	168	24,293,533,359	77	11,264,557,735	1,150	40,567,265,657
30602	ALAT KOMUNIKASI	633	5,031,520,839	5	39,487,250	20	47,217,179	618	5,023,790,910
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	326	939,460,598	10	26,978,846	7	13,725,650	329	952,713,794
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	13	118,500,625	1	1,700,000	0	0	14	120,200,625
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	81	5,770,712,994	5	24,338,970	0	0	86	5,795,051,964
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	4,284,000	0	0	0	0	1	4,284,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	2	17,499,540	2	17,499,540	2	2,400,000
31001	KOMPUTER UNIT	8,729	114,674,276,771	3,670	61,867,482,380	1,529	21,342,782,022	10,870	155,198,977,129
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,647	177,681,349,002	322	15,456,463,829	294	18,195,079,849	5,675	174,942,732,982
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	0	0	0	0	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	8	186,709,970	22	223,915,194	18	192,068,850	12	218,556,314
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	0	0	0	0	8	54,978,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140,065,000	3	3,750,000	0	0	27	143,815,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7	102,758,000	0	0	0	0	7	102,758,000
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>486</b>	<b>859,028,655,212</b>	<b>17</b>	<b>11,627,371,673</b>	<b>9</b>	<b>1,806,677,915</b>	<b>494</b>	<b>868,849,348,970</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	161	739,636,372,824	15	10,619,769,194	8	1,631,110,984	168	748,625,031,034
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,658,085,777	0	148,309,235	0	7,741,306	297	104,798,653,706
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	27	14,688,627,611	2	859,293,244	1	167,825,625	28	15,380,095,230

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:48 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>134111</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>58,583</b>	<b>16,341,511,800</b>	<b>376</b>	<b>254,910,000</b>	<b>188</b>	<b>127,455,000</b>	<b>58,771</b>	<b>16,468,966,800</b>
50101	JALAN	58,573	16,339,351,800	376	254,910,000	188	127,455,000	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
<b>134112</b>	<b>Irigasi</b>	<b>27</b>	<b>2,980,446,163</b>	<b>1</b>	<b>16,428,500</b>	<b>1</b>	<b>16,428,500</b>	<b>27</b>	<b>2,980,446,163</b>
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	16,428,500	1	16,428,500	1	16,428,500	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
<b>134113</b>	<b>Jaringan</b>	<b>32</b>	<b>5,267,586,977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5,267,586,977</b>
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
<b>135111</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>	<b>28</b>	<b>18,029,872,298</b>	<b>5</b>	<b>2,011,472,989</b>	<b>8</b>	<b>7,980,968,313</b>	<b>25</b>	<b>12,060,376,974</b>
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	17,766,969,398	4	1,921,800,989	5	7,712,630,313	23	11,976,140,074
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	1	89,672,000	3	268,338,000	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11,846</b>	<b>1,820,436,125</b>	<b>210</b>	<b>13,631,000</b>	<b>410</b>	<b>19,457,000</b>	<b>11,646</b>	<b>1,814,610,125</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,603	957,262,025	210	13,631,000	410	19,457,000	11,403	951,436,025
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi</b>	<b>637</b>	<b>7,722,632,436</b>	<b>2,801</b>	<b>32,180,721,502</b>	<b>3,250</b>	<b>24,291,313,236</b>	<b>188</b>	<b>15,612,040,702</b>
30103	ALAT BANTU	0	0	5	2,491,537,330	5	2,491,537,330	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	502,140,800	3	43,485,000	7	545,625,800	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	3	6,290,000	3	6,290,000	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	2	2,397,250	2	2,397,250	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	21	283,730,520	188	2,234,572,010	206	2,509,421,510	3	8,881,020
30502	ALAT RUMAH TANGGA	290	726,257,851	1,263	2,046,195,642	1,487	2,383,093,761	66	389,359,732

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:48 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30601	ALAT STUDIO	23	973,826,597	47	1,000,868,110	60	1,027,837,110	10	946,857,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	546,987,800	20	47,217,179	20	52,236,369	5	541,968,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	230,000	6	6,755,650	8	6,985,650	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	0	0	0	0	3	436,185,894
31001	KOMPUTER UNIT	211	2,390,337,636	828	10,259,498,122	958	10,539,434,883	81	2,110,400,875
31002	PERALATAN KOMPUTER	75	1,718,761,338	236	14,036,079,209	294	4,720,627,573	17	11,034,212,974
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	0	0	0	0	3	144,174,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	200	5,826,000	200	5,826,000	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>3,877,253,382,161</b>		<b>178,772,588,267</b>		<b>97,908,033,157</b>		<b>3,958,117,937,271</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>570,438</b>	<b>2,330,666,524,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,330,666,524,668</b>
20101	TANAH PERSIL	570,438	2,330,666,524,668	0	0	0	0	2,330,666,524,668
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>67,234</b>	<b>704,398,035,892</b>	<b>(544,799,857,443)</b>	<b>(16,212,822,787)</b>	<b>0</b>	<b>(561,012,680,230)</b>	<b>143,385,355,662</b>
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	216	39,065,671,821	(29,493,324,600)	149,012,107	0	(29,344,312,493)	9,721,359,328
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	40,686,136,920	(27,797,037,557)	(2,946,194,419)	0	(30,743,231,976)	9,942,904,944
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108	222,531,720	(174,830,665)	(25,231,359)	0	(200,062,024)	22,469,696
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	28	6,054,885,211	(5,225,455,177)	(389,171,700)	0	(5,614,626,877)	440,258,334
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	126,802,050	(109,921,835)	(4,658,610)	0	(114,580,445)	12,221,605
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	(39,799,525)	(17,248,550)	0	(57,048,075)	52,746,975
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	(47,594,250)	(1,008,700)	0	(48,602,950)	504,350
30501	ALAT KANTOR	9,792	82,050,874,380	(79,015,677,651)	(86,830,658)	0	(79,102,508,309)	2,948,366,071
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,934	149,188,518,672	(127,319,509,905)	(4,089,552,257)	0	(131,409,062,162)	17,779,456,510
30601	ALAT STUDIO	1,150	40,567,265,657	(23,995,330,727)	(1,748,770,111)	0	(25,744,100,838)	14,823,164,819
30602	ALAT KOMUNIKASI	618	5,023,790,910	(4,852,769,545)	(55,521,447)	0	(4,908,290,992)	115,499,918
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	(972,646,149)	(138,681,300)	0	(1,111,327,449)	328,854,344
30701	ALAT KEDOKTERAN	329	952,713,794	(745,478,975)	(76,533,560)	0	(822,012,535)	130,701,259
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	(50,955,325)	(20,819,350)	0	(71,774,675)	48,425,950
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	86	5,795,051,964	(5,341,519,129)	(175,212,651)	0	(5,516,731,780)	278,320,184
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	(3,102,750)	(1,241,100)	0	(4,343,850)	14,272,650
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	(21,850,711)	(12,524,280)	0	(34,374,991)	53,295,009
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	4,284,000	(428,400)	(428,400)	0	(856,800)	3,427,200
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	(600,000)	(600,000)	0	(1,200,000)	1,200,000
31001	KOMPUTER UNIT	10,870	155,198,977,129	(82,665,978,316)	(9,003,577,258)	0	(91,669,555,574)	63,529,421,555
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,675	174,942,732,982	(154,497,414,839)	2,473,776,016	0	(152,023,638,823)	22,919,094,159
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	(2,169,719,500)	0	0	(2,169,719,500)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	(23,164,349)	(18,803,409)	0	(41,967,758)	176,588,556
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	(32,924,563)	(6,466,075)	0	(39,390,638)	15,587,962
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	(140,065,000)	(535,716)	0	(140,600,716)	3,214,284
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7	102,758,000	(62,758,000)	(16,000,000)	0	(78,758,000)	24,000,000
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>494</b>	<b>868,849,348,970</b>	<b>(138,646,866,145)</b>	<b>(27,074,961,928)</b>	<b>0</b>	<b>(165,721,828,073)</b>	<b>703,127,520,897</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	168	748,625,031,034	(121,327,670,033)	(23,533,245,830)	0	(144,860,915,863)	603,764,115,171
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,798,653,706	(15,512,491,636)	(3,038,848,458)	0	(18,551,340,094)	86,247,313,612
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	(5,007,530)	(1,001,516)	0	(6,009,096)	39,559,904
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	(1,801,696,896)	(501,866,124)	0	(2,303,563,020)	13,076,532,210
<b>134111</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>58,771</b>	<b>16,468,966,800</b>	<b>(15,260,802,198)</b>	<b>(570,544,377)</b>	<b>0</b>	<b>(15,831,346,575)</b>	<b>637,620,225</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 13/05/24 8:49 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	(15,260,497,586)	(570,488,993)	0	(15,830,986,579)	635,820,221
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	(304,612)	(55,384)	0	(359,996)	1,800,004
<b>134112</b>	<b>Irigasi</b>	<b>27</b>	<b>2,980,446,163</b>	<b>(669,059,656)</b>	<b>(118,976,111)</b>	<b>0</b>	<b>(788,035,767)</b>	<b>2,192,410,396</b>
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	(27,036,007)	(5,587,530)	0	(32,623,537)	224,453,063
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	(21,255,762)	(3,864,684)	0	(25,120,446)	133,899,554
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	(8,214,250)	(8,214,250)	0	(16,428,500)	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	(464,478,441)	(74,386,883)	0	(538,865,324)	1,218,433,739
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	(84,329,719)	(15,332,677)	0	(99,662,396)	341,051,604
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	(63,745,477)	(11,590,087)	0	(75,335,564)	274,572,436
<b>134113</b>	<b>Jaringan</b>	<b>32</b>	<b>5,267,586,977</b>	<b>(2,210,344,889)</b>	<b>(115,407,767)</b>	<b>0</b>	<b>(2,325,752,656)</b>	<b>2,941,834,321</b>
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	(192,358,414)	(11,185,751)	0	(203,544,165)	132,028,335
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	(210,217,787)	(46,802,865)	0	(257,020,652)	1,526,459,288
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	(951,173,820)	0	0	(951,173,820)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	(57,112,381)	(3,461,357)	0	(60,573,738)	43,266,962
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	(756,635,648)	(50,718,211)	0	(807,353,859)	1,221,374,508
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	(42,846,839)	(3,239,583)	0	(46,086,422)	18,705,228
<b>135111</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>	<b>25</b>	<b>12,060,376,974</b>	<b>(1,934,480,635)</b>	<b>1,375,811,169</b>	<b>0</b>	<b>(558,669,466)</b>	<b>11,501,707,508</b>
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	11,976,140,074	(1,844,808,635)	1,286,139,169	0	(558,669,466)	11,417,470,608
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	(89,672,000)	89,672,000	0	0	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11,646</b>	<b>1,814,610,125</b>	<b>(34,629,888)</b>	<b>(9,659,775)</b>	<b>0</b>	<b>(44,289,663)</b>	<b>1,770,320,462</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403	951,436,025	0	0	0	0	951,436,025
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	0	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	(34,629,888)	(9,659,775)	0	(44,289,663)	40,429,437
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>188</b>	<b>15,612,040,702</b>	<b>(7,594,803,872)</b>	<b>(7,903,158,168)</b>	<b>0</b>	<b>(15,497,962,040)</b>	<b>114,078,662</b>
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	(502,140,800)	502,140,800	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	3	8,881,020	(283,730,520)	274,849,500	0	(8,881,020)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66	389,359,732	(725,476,851)	336,117,119	0	(389,359,732)	0
30601	ALAT STUDIO	10	946,857,597	(973,826,597)	26,969,000	0	(946,857,597)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	541,968,610	(545,997,800)	4,029,190	0	(541,968,610)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
 Tanggal : 13/05/24 8:49 AM  
 Halaman : 3  
 Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	(230,000)	230,000	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	(436,185,894)	0	0	(436,185,894)	0
31001	KOMPUTER UNIT	81	2,110,400,875	(2,384,587,636)	274,186,761	0	(2,110,400,875)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	11,034,212,974	(1,717,162,488)	(9,317,050,486)	0	(11,034,212,974)	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	(25,465,286)	(4,630,052)	0	(30,095,338)	114,078,662
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>708,855</b>	<b>3,958,117,937,271</b>	<b>(711,150,844,726)</b>	<b>(50,629,719,744)</b>	<b>0</b>	<b>(761,780,564,470)</b>	<b>3,196,337,372,801</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>6,624</b>	<b>2,378,521,900</b>	<b>8,429</b>	<b>4,186,209,992</b>	<b>2,946</b>	<b>1,275,360,785</b>	<b>12,107</b>	<b>5,289,371,107</b>
30103	ALAT BANTU	11	9,242,100	7	5,878,300	0	0	18	15,120,400
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	10	8,332,960	3	1,924,900	0	0	13	10,257,860
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	1,014,189	1	699,900	0	0	3	1,714,089
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	9	4,598,078	3	1,958,734	0	0	12	6,556,812
30303	ALAT UKUR	7	3,202,400	4	2,983,400	0	0	11	6,185,800
30501	ALAT KANTOR	172	60,612,050	119	96,184,250	1	589,000	290	156,207,300
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,878	1,946,317,349	1,107	893,247,647	117	26,215,340	5,868	2,813,349,656
30601	ALAT STUDIO	55	43,360,000	514	324,726,210	180	114,511,560	389	253,574,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	314	87,798,229	83	52,729,000	27	5,709,000	370	134,818,229
30701	ALAT KEDOKTERAN	107	21,189,780	5	1,125,000	1	190,300	111	22,124,480
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	0	0	0	0	10	7,154,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	2	1,975,000	0	0	32	2,800,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	11	5,956,600	4	2,017,600	7	3,939,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,010	168,546,565	6,558	2,789,799,751	2,616	1,126,127,985	4,952	1,832,218,331
31503	ALAT SAR	2	1,455,800	3	1,949,800	0	0	5	3,405,600
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	7	3,741,000	0	0	7	3,741,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	12,900,000	1	435,900	0	0	3	13,335,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	1	894,600	0	0	1	894,600
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>5</b>	<b>24,331,300</b>	<b>1</b>	<b>4,939,500</b>	<b>1</b>	<b>4,939,500</b>	<b>5</b>	<b>24,331,300</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	1	4,939,500	1	4,939,500	1	18,481,300
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>34,404,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>34,404,500</b>
60501	TANAMAN	0	0	492	34,404,500	0	0	492	34,404,500
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>2</b>	<b>515,350</b>	<b>120</b>	<b>27,505,640</b>	<b>122</b>	<b>28,020,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2	515,350	92	21,606,340	94	22,121,690	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	27	5,709,000	27	5,709,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	1	190,300	1	190,300	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>2,403,368,550</b>		<b>4,253,059,632</b>		<b>1,308,321,275</b>		<b>5,348,106,907</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 13/05/24 8:50 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_kel\_kl

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>12,107</b>	<b>5,289,371,107</b>	<b>(1,686,868,337)</b>	<b>(606,481,812)</b>	<b>0</b>	<b>(2,293,350,149)</b>	<b>2,996,020,958</b>
30103	ALAT BANTU	18	15,120,400	(2,968,293)	(1,951,223)	0	(4,919,516)	10,200,884
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	13	10,257,860	(4,684,380)	(3,616,470)	0	(8,300,850)	1,957,010
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	1,714,089	(101,418)	(136,414)	0	(237,832)	1,476,257
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	6,556,812	(3,423,266)	(519,602)	0	(3,942,868)	2,613,944
30303	ALAT UKUR	11	6,185,800	(936,240)	(1,165,160)	0	(2,101,400)	4,084,400
30501	ALAT KANTOR	290	156,207,300	(37,927,025)	(18,468,855)	0	(56,395,880)	99,811,420
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,868	2,813,349,656	(1,385,877,888)	(311,210,093)	0	(1,697,087,981)	1,116,261,675
30601	ALAT STUDIO	389	253,574,650	(20,196,530)	(29,901,315)	0	(50,097,845)	203,476,805
30602	ALAT KOMUNIKASI	370	134,818,229	(70,976,710)	(5,972,097)	0	(76,948,807)	57,869,422
30701	ALAT KEDOKTERAN	111	22,124,480	(12,272,015)	(2,450,150)	0	(14,722,165)	7,402,315
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	(1,788,600)	(184,800)	0	(1,973,400)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	(2,392,376)	(835,250)	0	(3,227,626)	3,926,374
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	(825,000)	(98,750)	0	(923,750)	1,876,250
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	3,939,000	0	(739,875)	0	(739,875)	3,199,125
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,952	1,832,218,331	(129,234,646)	(226,886,861)	0	(356,121,507)	1,476,096,824
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	(363,950)	(1,702,800)	0	(2,066,750)	1,338,850
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	3,741,000	0	(281,625)	0	(281,625)	3,459,375
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	(12,900,000)	(62,272)	0	(12,962,272)	373,628
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	0	(298,200)	0	(298,200)	596,400
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>5</b>	<b>24,331,300</b>	<b>(1,215,313)</b>	<b>(486,626)</b>	<b>0</b>	<b>(1,701,939)</b>	<b>22,629,361</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	(184,813)	(369,626)	0	(554,439)	17,926,861
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	(1,030,500)	(117,000)	0	(1,147,500)	4,702,500
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>492</b>	<b>34,404,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,404,500</b>
60501	TANAMAN	492	34,404,500	0	0	0	0	34,404,500
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(515,350)</b>	<b>515,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	(515,350)	515,350	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>12,604</b>	<b>5,348,106,907</b>	<b>(1,688,599,000)</b>	<b>(606,453,088)</b>	<b>0</b>	<b>(2,295,052,088)</b>	<b>3,053,054,819</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>537,313</b>	<b>2,322,022,352,128</b>	<b>38,448</b>	<b>9,362,617,540</b>	<b>5,323</b>	<b>718,445,000</b>	<b>570,438</b>	<b>2,330,666,524,668</b>
20101	TANAH PERSIL	537,313	2,322,022,352,128	38,448	9,362,617,540	5,323	718,445,000	570,438	2,330,666,524,668
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>69,282</b>	<b>646,418,410,922</b>	<b>18,477</b>	<b>127,491,645,055</b>	<b>8,418</b>	<b>64,222,648,978</b>	<b>79,341</b>	<b>709,687,406,999</b>
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	219	38,622,874,541	21	3,541,912,210	6	3,083,994,530	234	39,080,792,221
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	219	40,729,621,920	0	0	3	43,485,000	216	40,686,136,920
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	112	217,214,680	12	21,864,900	3	6,290,000	121	232,789,580
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	26	5,632,848,089	5	444,968,211	0	21,217,000	31	6,056,599,300
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	48	126,038,828	4	7,320,034	0	0	52	133,358,862
30303	ALAT UKUR	16	110,566,200	5	7,811,900	2	2,397,250	19	115,980,850
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	0	0	0	0	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	9,709	82,061,720,125	677	3,186,153,259	304	3,040,791,704	10,082	82,207,081,680
30502	ALAT RUMAH TANGGA	40,767	142,561,722,240	6,360	15,143,132,312	3,325	5,702,986,224	43,802	152,001,868,328
30601	ALAT STUDIO	1,114	27,581,650,033	682	24,618,259,569	257	11,379,069,295	1,539	40,820,840,307
30602	ALAT KOMUNIKASI	947	5,119,319,068	88	92,216,250	47	52,926,179	988	5,158,609,139
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	433	960,650,378	15	28,103,846	8	13,915,950	440	974,838,274
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	18	120,474,025	1	1,700,000	0	0	19	122,174,025
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	91	5,777,866,994	5	24,338,970	0	0	96	5,802,205,964
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	31	5,109,000	2	1,975,000	0	0	33	7,084,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	13	23,456,140	6	19,517,140	9	6,339,000
31001	KOMPUTER UNIT	8,729	114,674,276,771	3,670	61,867,482,380	1,529	21,342,782,022	10,870	155,198,977,129
31002	PERALATAN KOMPUTER	6,657	177,849,895,567	6,880	18,246,263,580	2,910	19,321,207,834	10,627	176,774,951,313
31503	ALAT SAR	59	2,171,175,300	3	1,949,800	0	0	62	2,173,125,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	8	186,709,970	22	223,915,194	18	192,068,850	12	218,556,314
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	7	3,741,000	0	0	15	58,719,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	26	152,965,000	4	4,185,900	0	0	30	157,150,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7	102,758,000	1	894,600	0	0	8	103,652,600
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>491</b>	<b>859,052,986,512</b>	<b>18</b>	<b>11,632,311,173</b>	<b>10</b>	<b>1,811,617,415</b>	<b>499</b>	<b>868,873,680,270</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	162	739,654,854,124	16	10,624,708,694	9	1,636,050,484	169	748,643,512,334
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,658,085,777	0	148,309,235	0	7,741,306	297	104,798,653,706
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	0	0	0	0	5	51,419,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	27	14,688,627,611	2	859,293,244	1	167,825,625	28	15,380,095,230

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>134111</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>58,583</b>	<b>16,341,511,800</b>	<b>376</b>	<b>254,910,000</b>	<b>188</b>	<b>127,455,000</b>	<b>58,771</b>	<b>16,468,966,800</b>
50101	JALAN	58,573	16,339,351,800	376	254,910,000	188	127,455,000	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
<b>134112</b>	<b>Irigasi</b>	<b>27</b>	<b>2,980,446,163</b>	<b>1</b>	<b>16,428,500</b>	<b>1</b>	<b>16,428,500</b>	<b>27</b>	<b>2,980,446,163</b>
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	1	16,428,500	1	16,428,500	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
<b>134113</b>	<b>Jaringan</b>	<b>32</b>	<b>5,267,586,977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5,267,586,977</b>
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
<b>135111</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>	<b>28</b>	<b>18,029,872,298</b>	<b>5</b>	<b>2,011,472,989</b>	<b>8</b>	<b>7,980,968,313</b>	<b>25</b>	<b>12,060,376,974</b>
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	17,766,969,398	4	1,921,800,989	5	7,712,630,313	23	11,976,140,074
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	1	89,672,000	3	268,338,000	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11,846</b>	<b>1,820,436,125</b>	<b>702</b>	<b>48,035,500</b>	<b>410</b>	<b>19,457,000</b>	<b>12,138</b>	<b>1,849,014,625</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,603	957,262,025	210	13,631,000	410	19,457,000	11,403	951,436,025
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	0	0	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
60501	TANAMAN	0	0	492	34,404,500	0	0	492	34,404,500
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>639</b>	<b>7,723,147,786</b>	<b>2,921</b>	<b>32,208,227,142</b>	<b>3,372</b>	<b>24,319,334,226</b>	<b>188</b>	<b>15,612,040,702</b>
30103	ALAT BANTU	0	0	5	2,491,537,330	5	2,491,537,330	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	502,140,800	3	43,485,000	7	545,625,800	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	3	6,290,000	3	6,290,000	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	2	2,397,250	2	2,397,250	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	21	283,730,520	188	2,234,572,010	206	2,509,421,510	3	8,881,020

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30502	ALAT RUMAH TANGGA	292	726,773,201	1,355	2,067,801,982	1,581	2,405,215,451	66	389,359,732
30601	ALAT STUDIO	23	973,826,597	47	1,000,868,110	60	1,027,837,110	10	946,857,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	546,987,800	47	52,926,179	47	57,945,369	5	541,968,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	230,000	7	6,945,950	9	7,175,950	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	0	0	0	0	3	436,185,894
31001	KOMPUTER UNIT	211	2,390,337,636	828	10,259,498,122	958	10,539,434,883	81	2,110,400,875
31002	PERALATAN KOMPUTER	75	1,718,761,338	236	14,036,079,209	294	4,720,627,573	17	11,034,212,974
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	0	0	0	0	3	144,174,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	200	5,826,000	200	5,826,000	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>3,879,656,750,711</b>		<b>183,025,647,899</b>		<b>99,216,354,432</b>		<b>3,963,466,044,178</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:49 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_atb\_kel\_kl

**UAPB : 088                      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>162121</b>	<b>Hak Cipta</b>	<b>1</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>500,000</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
<b>162151</b>	<b>Software</b>	<b>277</b>	<b>141,786,451,166</b>	<b>3</b>	<b>1,091,685,620</b>	<b>69</b>	<b>17,332,317,299</b>	<b>211</b>	<b>125,545,819,487</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	277	141,786,451,166	3	1,091,685,620	69	17,332,317,299	211	125,545,819,487
<b>162161</b>	<b>Lisensi</b>	<b>1</b>	<b>39,658,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>39,658,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39,658,850	0	0	1	39,658,850	0	0
<b>162171</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>	<b>1</b>	<b>195,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>195,000,000</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	0	0	0	0	1	195,000,000
<b>166113</b>	<b>Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>	<b>25</b>	<b>4,937,129,250</b>	<b>70</b>	<b>17,371,976,149</b>	<b>67</b>	<b>16,558,362,274</b>	<b>28</b>	<b>5,750,743,125</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	25	4,937,129,250	70	17,371,976,149	67	16,558,362,274	28	5,750,743,125
<b>TOTAL</b>			<b>146,958,739,266</b>		<b>18,463,661,769</b>		<b>33,930,338,423</b>		<b>131,492,062,612</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL**  
**ASET TAK BERWUJUD**  
**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tanggal : 13/05/24 8:50 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_kel\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>162121</b>	<b>Hak Cipta</b>	<b>1</b>	<b>500,000</b>	<b>(57,137)</b>	<b>(7,142)</b>	<b>0</b>	<b>(64,279)</b>	<b>435,721</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	(57,137)	(7,142)	0	(64,279)	435,721
<b>162151</b>	<b>Software</b>	<b>211</b>	<b>125,545,819,487</b>	<b>(138,914,681,445)</b>	<b>14,704,684,357</b>	<b>0</b>	<b>(124,209,997,088)</b>	<b>1,335,822,399</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	211	125,545,819,487	(138,914,681,445)	14,704,684,357	0	(124,209,997,088)	1,335,822,399
<b>162161</b>	<b>Lisensi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(39,658,850)</b>	<b>39,658,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	(39,658,850)	39,658,850	0	0	0
<b>162171</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>	<b>1</b>	<b>195,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,000,000</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	0	0	0	0	195,000,000
<b>166113</b>	<b>Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>	<b>28</b>	<b>5,750,743,125</b>	<b>(4,731,241,750)</b>	<b>(829,301,375)</b>	<b>0</b>	<b>(5,560,543,125)</b>	<b>190,200,000</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	28	5,750,743,125	(4,731,241,750)	(829,301,375)	0	(5,560,543,125)	190,200,000
<b>JUMLAH</b>		<b>241</b>	<b>131,492,062,612</b>	<b>(143,685,639,182)</b>	<b>13,915,034,690</b>	<b>0</b>	<b>(129,770,604,492)</b>	<b>1,721,458,120</b>

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM KL : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KD KL : 088

TANGGAL : 13-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbrb\_kl  
HALAMAN : 1 dari 4

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
1	3.05.02.06.014	1	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
2	3.05.02.06.014	2	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
3	3.05.02.06.014	3	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
4	3.05.02.06.014	4	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
5	3.05.02.06.014	5	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
6	3.05.02.06.014	6	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
7	3.05.02.06.014	7	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
8	3.05.02.06.014	8	Microphone	BEHRIGER	-	21-06-2016	1,650,000
9	3.05.02.06.014	10	Microphone	KREZT	-	07-11-2016	2,300,000
10	3.06.01.01.002	1	Audio Mixing Portable	YAMAHA	-	10-10-2014	3,550,000
11	3.06.01.01.036	6	Microphone/Wireless MIC	VXT U689	-	01-08-2017	4,290,000
12	3.06.01.01.036	7	Microphone/Wireless MIC	Mikro	-	08-04-2018	7,275,000
13	3.06.01.01.037	1	Microphone/Boom Stand	-	-	15-09-2014	1,695,000
14	3.06.01.01.037	2	Microphone/Boom Stand	-	-	15-09-2014	1,695,000
15	3.06.01.01.037	3	Microphone/Boom Stand	-	-	11-05-2015	1,102,500
16	3.06.01.01.037	4	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
17	3.06.01.01.037	5	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
18	3.06.01.01.037	6	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
19	3.06.01.01.037	7	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
20	3.06.01.01.037	8	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
21	3.06.01.01.037	9	Microphone/Boom Stand	Kreps	-	08-04-2018	3,462,500
JUMLAH							55,882,500

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
1	3.06.01.01.048	9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPT Serang	-	09-06-2016	254,023,750
JUMLAH							309,906,250

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
1	3.10.01.02.001	51	P.C Unit	WORKSTATION	-	14-05-2012	17,414,174
2	3.10.01.02.001	52	P.C Unit	WORKSTATION	-	14-05-2012	17,414,174
3	3.10.01.02.001	53	P.C Unit	WORKSTATION	-	14-05-2012	17,414,174
4	3.10.01.02.001	64	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
5	3.10.01.02.001	65	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
6	3.10.01.02.001	66	P.C Unit	LENOVO 3554-	-	03-05-2013	9,515,000

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM KL : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KD KL : 088

TANGGAL : 13-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbrb\_kl  
HALAMAN : 2dari 4

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
			P.C Unit	CTO	-		
7	3.10.01.02.001	68	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
8	3.10.01.02.001	73	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
9	3.10.01.02.001	74	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
10	3.10.01.02.001	75	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
11	3.10.01.02.001	82	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
12	3.10.01.02.001	83	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
13	3.10.01.02.001	84	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
14	3.10.01.02.001	85	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
15	3.10.01.02.001	87	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
16	3.10.01.02.001	88	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
17	3.10.01.02.001	89	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
18	3.10.01.02.001	90	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
19	3.10.01.02.001	91	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
20	3.10.01.02.001	102	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
21	3.10.01.02.001	106	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
22	3.10.01.02.001	107	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
23	3.10.01.02.001	109	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
24	3.10.01.02.001	113	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
25	3.10.01.02.001	114	P.C Unit	LENOVO 3554-CTO	-	03-05-2013	9,515,000
26	3.10.01.02.001	115	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
27	3.10.01.02.001	117	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
28	3.10.01.02.001	118	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
29	3.10.01.02.001	119	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
30	3.10.01.02.001	120	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
31	3.10.01.02.001	121	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
32	3.10.01.02.001	122	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
33	3.10.01.02.001	123	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
34	3.10.01.02.001	124	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
35	3.10.01.02.001	125	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM KL : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KD KL : 088

TANGGAL : 13-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbrb\_kl  
HALAMAN : 3dari 4

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
36	3.10.01.02.001	126	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
37	3.10.01.02.001	128	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
38	3.10.01.02.001	130	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
39	3.10.01.02.001	131	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
40	3.10.01.02.001	132	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
41	3.10.01.02.001	133	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
42	3.10.01.02.001	135	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
43	3.10.01.02.001	136	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
44	3.10.01.02.001	141	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
45	3.10.01.02.001	142	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
46	3.10.01.02.001	144	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
47	3.10.01.02.001	145	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
48	3.10.01.02.001	147	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
49	3.10.01.02.001	150	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
50	3.10.01.02.001	151	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
51	3.10.01.02.001	153	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
52	3.10.01.02.001	154	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
53	3.10.01.02.001	156	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
54	3.10.01.02.001	158	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
55	3.10.01.02.001	159	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
56	3.10.01.02.001	161	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
57	3.10.01.02.001	164	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
58	3.10.01.02.001	165	P.C Unit	HP PAVILION	-	06-05-2014	10,896,600
59	3.10.02.03.003	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET 35A	-	16-09-2009	2,112,000
60	3.10.02.03.003	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER LQ 2180	-	20-11-2007	4,584,550
61	3.10.02.03.003	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER LQ 2180	-	20-11-2007	4,584,550
62	3.10.02.03.003	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER LQ 2180	-	20-11-2007	4,584,550
63	3.10.02.03.003	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER LQ 2180	-	20-11-2007	4,584,550
64	3.10.02.03.003	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	-	22-10-2010	7,205,000
65	3.10.02.03.003	34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP DOCUPRINT CM 205B	-	24-11-2011	4,250,000
66	3.10.02.03.003	35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP DOCUPRINT CM 205B	-	24-11-2011	4,250,000
67	3.10.02.03.003	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	-	08-11-2012	1,500,000

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM KL : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KD KL : 088

TANGGAL : 13-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbrb\_kl  
HALAMAN : 4 dari 4

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
68	3.10.02.03.003	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	-	08-11-2012	1,500,000
69	3.10.02.03.003	46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	-	08-11-2012	1,500,000
70	3.10.02.03.003	47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	-	08-11-2012	1,500,000
JUMLAH							973,221,772
NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
1	3.10.02.04.001	4	Server	Web Application Server Kanreg	-	14-05-2012	108,482,735
2	3.10.02.04.001	5	Server	Database Transaksi Server Kanreg	-	14-05-2012	298,297,236
3	3.10.02.04.002	3	Router	Firewall&VPN Cluster Appliance Kanreg	-	14-05-2012	154,456,155
JUMLAH							1,534,457,898

# **LAMPIRAN IX**

## **Laporan Persediaan**

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tanggal : 13/05/24 8:54 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_persediaan\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>117111</b>	<b>Barang Konsumsi</b>	
1010301001	Alat Tulis	237,728,204
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	18,194,319
1010301003	Penjepit Kertas	158,174,407
1010301004	Penghapus/Korektor	18,918,589
1010301005	Buku Tulis	51,621,549
1010301006	Ordner Dan Map	611,066,319
1010301007	Penggaris	8,992,238
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	18,939,261
1010301009	Pita Mesin Ketik	20,647,830
1010301010	Alat Perekat	71,296,809
1010301011	Stadler HD	849,755
1010301012	Staples	23,862,522
1010301013	Isi Staples	47,190,389
1010301014	Barang Cetak	225,586,622
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,057,332,441
1010302001	Kertas HVS	469,434,993
1010302002	Berbagai Kertas	102,966,131
1010302003	Kertas Cover	20,183,070
1010302004	Amplop	443,034,185
1010302005	Kop Surat	3,500,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	176,336,466
1010303002	Tinta Cetak	8,787,540
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	305,451,751
1010304002	Computer File/Tempat Disket	557,000
1010304003	Pita Printer	4,410,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,770,402,447
1010304005	Disket	1,148,400
1010304006	USB/Flash Disk	32,843,425
1010304010	Mouse	2,537,010
1010304011	CD/DVD	770,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	52,185,806
1010306001	Kabel Listrik	16,859,000
1010306002	Lampu Listrik	74,113,117
1010306003	Stop Kontak	7,589,570
1010306004	Saklar	6,705,960
1010306005	Stacker	1,769,200
1010306006	Balast	1,625,000
1010306007	Starter	924,940
1010306008	Vitting	1,131,500
1010306010	Batu Baterai	58,994,932
1010306999	Alat Listrik Lainnya	24,777,688
1010307002	Penutup Kepala	523,200
1010307005	Penutup Kaki	560,000
1010307007	Perlengkapan Lapangan	796,350

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tanggal : 13/05/24 8:54 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_persediaan\_kl

**UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1010309001	Meterai	4,040,000
1010309003	Stempel	250,700
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	3,417,000
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	1,361,656
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,909,900
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	39,953,644
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	643,000
1010312999	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan Lainnya	595,400
1010313001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	19,546,848
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	49,985,570
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	336,487,778
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	2,440,500
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	3,945,513
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	21,211,529
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	30,127,287
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44,022,400
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>6,722,383,660</b>
<b>117113</b>	<b>Bahan untuk Pemeliharaan</b>	
1010305001	Sapu Dan Sikat	25,544,418
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	35,628,050
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	14,999,800
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	21,974,051
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	58,746,553
1010305006	Alat Pengikat	9,246,535
1010305007	Peralatan Ledeng	1,714,318
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	97,355,710
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	1,228,500
1010305012	Pengharum Ruangan	21,645,997
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	95,707,568
<b>Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan</b>		<b>383,791,500</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7,106,175,160</b>

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 213,392,450 dalam kondisi usang.

**LAMPIRAN X**  
**BUKTI SETORAN**  
**PENERIMAAN NEGARA**



## BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

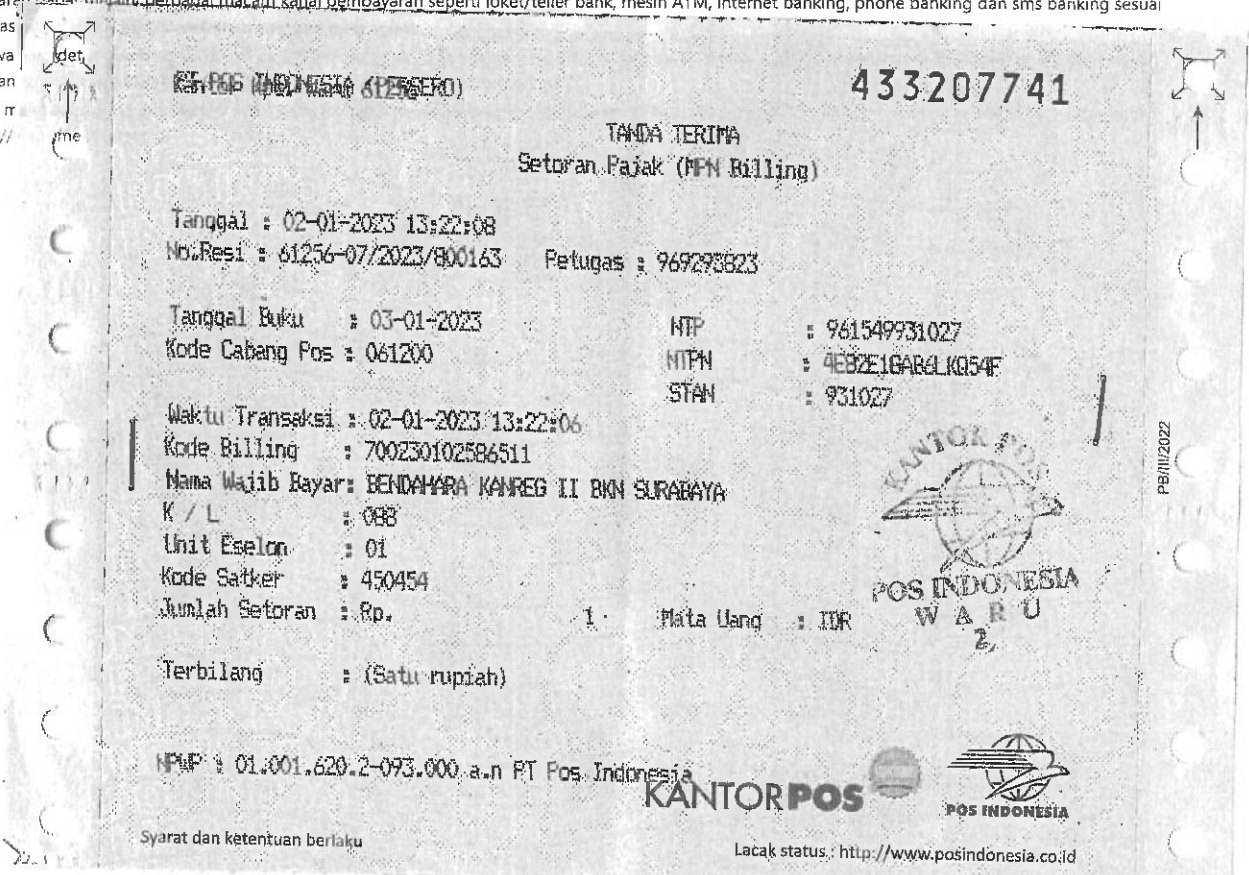
Kode Billing : 700230102586511  
 Tanggal Billing : 02-01-2023 13:05  
 Tanggal Kadaluarsa : 09-01-2023 23:59  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Penyetor : BENDAHARA KANREG II BKN SURABAYA  
 Kementerian / Lembaga : 088-BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Unit Eselon I : 01-BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Satuan Kerja : 450454-KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA  
 Total Disetor : 1 (IDR)  
 Terbilang : Satu Rupiah (IDR)  
 Status : BELUM TERBAYAR  
 NTPN : -  
 NTB : -  
 KPPN : SIDOARJO  
 Keterangan : Pengembalian TUP Kegiatan Pelaksanaan Seleksi CPPPK tahun Anggaran 2022

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : BENDAHARA KANREG II BKN SURABAYA  
 Uraian : Periode : 012023 s/d 012023  
 Akun : 815514 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 1 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas
- Pastikan bahwa ketidakcocokan
- Apabila Anda n melalui https://





Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 18/09/23 10:48:50 NTB : 000000133093  
Tanggal Buku : 18/09/23 NTPN :  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 671620  
Jl. PERTINTIS KEMERDEKAAN BDG

Data Setoran :

Kode Billing : 820230918581686  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL TTT RKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 435.000,00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX. : 1967 133093 95202 18/09/2023 10:48:50  
NO. R. :  
JML. A : 435.000  
PERTINTIS KEMERDEKAAN BDG



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230918581686  
Tanggal Billing : 18-09-2023 10:18:07  
Tanggal Kedaluwarsa : 25-09-2023 10:18:07  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 435.000 (IDR)  
Terbilang : *Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 435.000 (IDR)  
Keterangan : sewa tanah bangunan muararajeun bulan Januari s.d September 2022 a.n Lia Nurlianingsih

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawahlah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o0o---



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009042848  
Tanggal Billing : 09-10-2023 08:27:36  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 08:27:36  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 507.000 (IDR)  
Terbilang : *Lima Ratus Tujuh Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 507.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Rusli Darmawan

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

--000--



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

NO. TRX : 01967/512393 95202 09/10/2023 08:54:16  
NO. RASH : 007.000  
TIMULA : 007.000  
PRINTIS KEMERDEKAAN RDG

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 09/10/23 08:54:16	NTB	: 000000512393
Tanggal Buku	: 09/10/23	NTPN	: E255A7QLUG8230D0
Kode Cabang Bank	: 269	STAN	: 044182

JI. PERINTIS KEMERDEKAAN RDG

Data Setoran :

Kode Billing	: 820231009042R48	
Nama Wajah Bayar	: KANTOR REGIONAL ILL RKN	
Kementerian / Lembaga	: 088	
Unit Eselon I	: 01	
Satuan Kerja	: 017237	
Jumlah Setoran	: 507.000,00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: lima ratus tujuh ribu rupiah	

*This is a computer generated message and requires no signature*  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan  
 Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses.  
 Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009039683  
Tanggal Billing : 09-10-2023 08:06:30  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 08:06:30  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 1.352.000 (IDR)  
Terbilang : *Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 1.352.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari 2020 s.d Desember 2021 a.n  
Suhendar

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

--o00o--





Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 18/09/23 10:49:48 NTB : 000000161973  
Tanggal Buku : 18/09/23 NTPN : E032F8N3EANO7CS1  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 671983  
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN RDG

Data Setoran :

Kode Billing : 820230918583169  
Nama Wajah Bayar : KANTOR REGIONAL III RKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 017233

Jumlah Setoran : 785.250,00 -

Terbilang : tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230918583169  
Tanggal Billing : 18-09-2023 10:23:06  
Tanggal Kedaluwarsa : 25-09-2023 10:23:06  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 785.250 (IDR)  
Terbilang : *Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 785.250 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bangunan muararajeun bulan Januari s.d September 2022 a.n  
Sukarni

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---



Melayani Negeri, Kebangsaan Bangsa

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 09/10/23 08:56:35 NTB : 000000573024  
Tanggal Buku : 09/10/23 NTPN : B39400N9VRKUQSFO  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 045437  
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG

Data Setoran :  
Kode Billing : 820231009038840  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian / Lembaga : 098  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 374.250,00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*  
*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*  
*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX : 01967-573024-95202  
NO. BUKU : 174.250  
TIMELINE : 09/10/2023 08:56:35  
PERINTIS KEMERDEKAAN BDG



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009038840  
Tanggal Billing : 09-10-2023 07:59:33  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 07:59:33  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 374.250 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 374.250 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Taufik Ahmad Subagja

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

--o00o--



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

NO. TRX. : 8196 / 003853 95202  
NO. REF. : CASH  
Jumlah : 76.500  
0269 - Jl. PERTANTIS KEMERDEKAAN RDC  
02/10/2023 11:17:33

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 02/10/23 11:17:32 NTB : 000000003853  
Tanggal Buku : 02/10/23 NTPN : 22B460N9VRK09810  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 192680  
Jl. PERTANTIS KEMERDEKAAN RDC

Data Setoran :

Kode Billing : 820231002169400  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL ITI BKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 676.500,00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231002169400  
Tanggal Billing : 02-10-2023 10:22:20  
Tanggal Kedaluwarsa : 09-10-2023 10:22:20  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 676.500 (IDR)  
Terbilang : *Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 676.500 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Agustina Suswanti

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---



Melayani Negeri, Kebangsaan Bangsa

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 09/10/23 08:56:54 NTB : 000000582651  
Tanggal Buku : 09/10/23 NTPN : EA32D8N3EAQEFSE1  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 045585  
JI... PERINTIS KEMERDEKAAN BDG

Data Setoran :  
Kode Billing : R20231009038689  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL ITI RKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon T : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 664.500,00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*  
*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*  
*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX : 196758265195202  
NO. RKN : 196758265195202  
JMLAH : 664.500  
PERINTIS KEMERDEKAAN BDG  
09/10/2023 08:56:54



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



### BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009038689  
Tanggal Billing : 09-10-2023 07:58:13  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 07:58:13  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 664.500 (IDR)  
Terbilang : *Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 664.500 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Bambang Wijayanto

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 18/09/23 10:49:24  
Tanggal Buku : 18/09/23  
Kode Cabang Bank : 269  
Jl. PERTINTIS KEMERDEKAAN BDG

NTB : 000000149759  
NTPN : 01EC63CIFB9DPC1T  
STAN : 671R35

Data Setoran :

Kode Billing : 820230918582333  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL-TIT RKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 332.250,00  
Terbilang : tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil catatan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX : 18/07 149759 365202 18/09/2023 10:49:24  
NO. RASH : 132.250  
JMLA : 0269  
PRINTIS KEMERDEKAAN BDG



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230918582333  
Tanggal Billing : 18-09-2023 10:20:19  
Tanggal Kedaluwarsa : 25-09-2023 10:20:19  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 332.250 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 332.250 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bangunan muararajeun bulan Januari s..d September 2022 a.n Christina

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o0o---



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 18/09/23 10:50:23 NTB : 000000179164  
Tanggal Buku : 18/09/23 NTPN : 1F29955DF0E6JDCF  
Kode Cabang Bank : 269 STAN : 672129  
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN RDG

Data Setoran :

Kode Billing : 820230918583695  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL IIT RKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 435.000,00 Mata Uang : TDR  
Terbilang : empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX : 01967 179164 95202  
NO. RASH : 435.000  
TIMBA : 18/09/2023 10:50:23  
0269 - PERINTIS KEMERDEKAAN RDG



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230918583695  
Tanggal Billing : 18-09-2023 10:25:04  
Tanggal Kedaluwarsa : 25-09-2023 10:25:04  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 435.000 (IDR)  
Terbilang : *Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 435.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bangunan muararajeun bulan Januari s.d September 2022 a.n  
Cucun Sumiati

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009038280  
Tanggal Billing : 09-10-2023 07:55:31  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 07:55:31  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 531.000 (IDR)  
Terbilang : *Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 531.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Eko Widiyanto

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara



NO. TRK : 84906 580243 98202  
NO. REK. : CASH  
Jumlah : 597.750  
0269  
PT. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG  
11/09/2023 13:55:51

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 11/09/23 13:33:51  
Tanggal Buku : 11/09/23  
Kode Cabang Bank : 269  
NTB : 00000  
NTPN : 6FD573CIFB97CF9V  
STAN : 711045  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG

Data Setoran :  
Kode Billing : 820230911868223  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 597.750,00  
Terbilang : lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah  
Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*  
*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*  
*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230911868223  
Tanggal Billing : 11-09-2023 11:59:25  
Tanggal Kedaluwarsa : 18-09-2023 11:59:25  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 597.750 (IDR)  
Terbilang : Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 597.750 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bulan Januari s.d September 2022 a.n Enung Nurdjanah  
Hadidjah

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

--000--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara



NO. TRX. : 8490645135395202  
NO. REK. : CASH  
Jumlah : 265.500  
0269 - II  
PERINTIS KEMERDEKAAN BDG  
15/09/2023 10:23:17

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 15/09/23 10:23:17  
Tanggal Buku : 15/09/23  
Kode Cabang Bank : 269  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG

NTB : 00000  
NTPN : FD3403CIFB9ANOAR  
STAN : 399802

Data Setoran :  
Kode Billing : 820230915383643  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 265.500,00  
Terbilang : dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*  
*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*  
*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi!*





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230915383643  
Tanggal Billing : 15-09-2023 09:57:12  
Tanggal Kedaluwarsa : 22-09-2023 09:57:12  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 265.500 (IDR)  
Terbilang : *Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 265.500 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bangunan muararajeun bulan Januari s.d September 2022 a.n Herlina Tambunan

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o0o---



Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 11/09/23 13:34:43  
Tanggal Buku : 11/09/23  
Kode Cabang Bank : 269  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG

Data Setoran :  
Kode Billing : 820230911869131  
Nama Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian / Lembaga : 088  
Unit Eselon I : 01  
Satuan Kerja : 017237  
Jumlah Setoran : 760.500,00  
Terbilang : tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah

NTB : 00000  
NTPN : ADB071JNFM4EIG6B  
STAN : 711347

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses  
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRANSAKSI : 8110660404395202  
NO. REK. : CASH  
JUMLAH : 760.500  
0269 - JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG  
11/09/2023 13:34:43



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230911869131  
Tanggal Billing : 11-09-2023 12:03:45  
Tanggal Kedaluwarsa : 18-09-2023 12:03:45  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 760.500 (IDR)  
Terbilang : *Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 760.500 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah bulan Januari s.d September 2022 a.n Humphrey Novianto

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o0o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231009039187  
Tanggal Billing : 09-10-2023 08:03:47  
Tanggal Kedaluwarsa : 16-10-2023 08:03:47  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : KANTOR REGIONAL III BKN  
Kementerian/Lembaga : **088** - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Unit Eselon I : **01** - Badan Kepegawaian Negara  
Satuan Kerja : **017237** - KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
BANDUNG  
Total Disetor : 386.250 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 386.250 (IDR)  
Keterangan : Sewa tanah dan bangunan bulan Januari s.d September 2022 a.n Jujun Djunaesih

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawahlah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---

# **LAMPIRAN XI**

## **Telaah Laporan Keuangan**

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)  
SEMESTERAN / TAHUNAN TA 2023**

Kode dan Nama K/L : (088) Badan Kepegawaian Negara

**KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**

<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA Neraca LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada

**KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI**

<b>Kesesuaian Saldo</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Semua face laporan (LRA LO LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama

*Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama apabila ada yang tidak sama uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.*

**KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI**

<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit) LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

**PENGECEKAN PADA MONSAKTI**

<b>To Do List</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi ( <i>dalam hal masih terdapat anomali</i> )	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar (TK) Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di <i>Settle</i> Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a Pagu/DIPA		√	Tidak
	b Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c Belanja		√	Tidak
	d Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e Pendapatan		√	Tidak
	f Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g Kas BLU		√	Tidak
	h Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i Kas Hibah		√	Tidak
	j Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
<b>Rekon Internal</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
<b>Daftar MONSAKTI</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? ( <i>Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister</i> )		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? ( <i>selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada</i> )		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1xxxx bersaldo (D) ( <i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i> )	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) ( <i>kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu</i> )	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya

<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" ( <i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i> )		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41xxxx / 43xxxx (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan Pita Cukai Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
<b>Jika Bukan Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
<b>Terkait Satker BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" ( <i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i> )		√	Ada/Tidak
	<i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
<b>Hibah Langsung</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa? <i>Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak

2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211 Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133 Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah	-	-	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√		Ya
<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	√		Ya/Tidak
2	Jika ada apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	√		Ya/Tidak
<i>Jika ada konfirmasi kebenarannya Jelaskan dalam Calk</i>				
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20xx di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx) beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx) beban subsidi (55xxxx) beban hibah (56xxxx) dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset" Bila ada cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? <i>Akun ini hanya khusus dari IP</i>		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? <i>Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000 transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST</i>	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111 313121 313211 313221 391131 391132 391133 391141)	√		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? <i>(Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)</i>	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? <i>(Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)</i>	√		Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
Jika Jawaban awal "ADA" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA" sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512x pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	<i>Jika Ada apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?</i>	√		Ya
<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 526xxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 57xxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411x) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121xx) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
<b>TELAAH LK BLU</b>				
<b>LPSAL BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
<b>LAK BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx 111826 1133xx 165111 dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"*

- 1 Terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan per 31 Desember 2023 diantaranya sebagai berikut:
  - a No Dokumen 00037 dengan No SP2D 231361303003418 pencatatan Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) sebanyak 2 buah @Rp463.300- dengan kode barang 1010310999. Pembelian barang berupa barcode scanner yang seharusnya menggunakan kode barang PM (3090405012) pada Kanreg IV Makasar
  - b No Dokumen 00005/UP\_TUP/450454/2023 tanggal 20-06-2023 pencatatan Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) berupa Pengadaan pembelian Wifi Router tenda AC2100 sebanyak 2 unit senilai @Rp943.389- dengan menggunakan kode barang Persediaan 1010304999 pada Kantor Regional II BKN Surabaya dan sudah dilakukan Reklasifikasi dari Persediaan pada Modul Aset
  - c No Dokumen 5.24.1/BAST/PUSBANG-ASN/VI/2023 tanggal 22-06-2023 pencatatan Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (521111) berupa pengadaan taplak meja dan sarung kursi sebanyak 130 buah senilai @Rp220.000- dan sebanyak 26 buah senilai @Rp823.000,- dengan menggunakan kode barang Persediaan 1010305999 pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN
- 2 Terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per 31 Desember 2023 diantaranya sebagai
  - a No Dokumen 00081 dengan No SP2D 230141303001875 pencatatan Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) berupa Biaya Pembelian Harddisk External di Kantor Regional VII BKN Palembang senilai Rp1.960.000- dengan kode barang 3100203017 dan sudah dilakukan koreksi pencatatan
  - b No Dokumen 00035 tanggal 20-06-2023 pencatatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) berupa Pembelian Karpet anti stip (nota terlampir) sebanyak 10 unit senilai @Rp345.800- dengan menggunakan kode barang Peralatan dan Mesin 3050206056 pada Kantor Regional II BKN Surabaya dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan Reklasifikasi dari Aset pada Modul Persediaan
  - c No Dokumen 00619 tanggal 13-11-2023 pencatatan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) sebanyak 7 unit senilai @Rp35.500,- dan sebanyak 7 unit senilai Rp42.500,- berupa biaya keperluan sehari-hari perkantoran Kanreg untuk pembelian lampu dengan kode barang 3050206072 pada Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan sudah dilakukan Reklasifikasi ke Persediaan
- 3 Terdapat akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta berupa 2 buah Headphone yang berasal dari penerimaan hadiah dari Bank Mandiri atas keberhasilan Instansi dalam penggunaan KKP teraktif di Wilayah Kerja Yogyakarta

- 4 Telah dilakukan koreksi audit terhadap Laporan Keuangan BKN TA 2023 yang terdiri dari :
- a Pengakuan piutang dan pengurangan beban dan/atau aset atas pengembalian belanja tahun 2023 yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2024
  - b Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya karena kondisi sudah rusak berat atau sudah tidak digunakan kegiatan operasional
  - c Penghapusan terhadap Persediaan dalam kondisi usang/rusak

Mengetahui,  
Pejabat Penyusun LKKL  
Kepala Subbagian Akuntansi

  
Tegar Nake Hardriana  
NIP. 198907072015031004

Jakarta, 07 Mei 2024  
Penelaah  
Pranata Keuangan APBN Mahir

  
Eka Desi Lestari  
NIP 198812022010122001

# **LAMPIRAN XII**

## **CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**

**RECATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA  
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 *AUDITED***

**I. PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.231/PMK.05/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.291/PB/2023 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2023 tentang Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/ PMK.06/ 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
18. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (*outcome*) yang hendak dicapai oleh BKN adalah “Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional”. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

#### C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Badan Kepegawaian Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

### A. Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN. Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodefikasi BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KM.6/2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

## **B. Kapitalisasi Barang Milik Negara**

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar kapitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, disebutkan pada bagian Kedua (Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap) Pasal 40 ayat 4, bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:
  - a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk peralatan dan mesin; atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
  - b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk gedung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
2. Serta dengan memperhatikan lampiran 11.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan "pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang *memperpanjang masa manfaat* atau yang kemungkinan besar *memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja*, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".

## **C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara**

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018.

## **D. Penyusutan Barang Milik Negara**

### **1. Penyusutan**

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang bertujuan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

### **2. Nilai Penyusutan**

- a. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 01 Januari 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 01 Januari 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 01 Januari 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- d. Penyusutan aset tak berwujud (amortisasi) merupakan penghitungan dan pencatatan yang dilakukan pada dan oleh tingkat Kuasa Pengguna Barang, dilakukan pada setiap akhir semester dengan tidak memperhatikan nilai residu untuk setiap sub kelompok ATB. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- e. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2015 untuk aset tak berwujud yang diperoleh berdasarkan saldo sampai dengan 01 Januari 2016 sebesar nilai perolehan.

### **3. Metode Penyusutan Yang Digunakan**

- a. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- b. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

### **4. Masa Manfaat Yang Digunakan**

- a. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

- b. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum label masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kode Barang					Uraian	Tahun
1	8	01	01	01	001	Software Komputer	4
2	8	01	01	01	002	Lisensi	10
3	8	01	01	01	003	Franchise	5
4	8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
5	8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
6	8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	50
7	8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
12	8	01	01	01	014	Merk	10
13	8	01	01	01	015	Desain Industri	10
14	8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
15	8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	9	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	10	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Setahun	25

### E. Metode Penilaian Persediaan

Terkait Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, di dalam mencatat persediaan Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dalam hal metode *First In First Out* (FIFO) mulai diterapkan pada periode Tahunan Tahun 2023 ini dengan penjelasan berdasarkan surat edaran nomor S-3/PB/PB.6/2021 tgl 22 Januari 2021.

### I. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp4.102.233.159.014,00 (*Empat triliun seratus dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp4.034.613.674.636,00 (*Empat triliun tiga puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp189.839.508.260,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribuan Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*) nilai mutasi kurang sebesar Rp119.974.543.710,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Tujuh Ratus Sepuluh*

*Rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1 Satker Kantor Pusat BKN Jakarta (088.01.0199.017220) dan 15 Satker Kantor Daerah yang terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)
2. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
3. Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
4. Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
5. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)
6. Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
7. Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)
8. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
9. Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)
10. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)
11. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)
12. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
13. Kantor Regional XIII BKN Aceh (088.01.0600.667752)
14. Kantor Regional XIV BKN Manokari (088.01.3300.667652)
15. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)

Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).
6. Laporan Barang Bersejarah.
7. Laporan Kondisi Barang.
8. Laporan Penyusutan.
9. Laporan Barang Rusak Berat.
10. Laporan Barang Hilang.
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

(BPYBDS).

12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Badan Kepegawaian Negara.
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

## II. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

### 1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.034.613.674.636,00 (*empat triliun tiga puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp4.032.210.306.086,00 (*empat triliun tiga puluh dua miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu delapan puluh enam rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp2.403.368.550,00 (*dua miliar empat ratus tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2023 sebesar Rp7.106.175.160,00 (*tujuh milyar seratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2023 sebesar Rp7.837.731.684,00 (*Tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp731.556.524,00 (*tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Mutasi barang persediaan

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	7.468.125.581,00	(745.741.921,00)	6.722.383.660,00
117113	Bahan Pemeliharaan	313.613.087,00	70.178.413,00	383.791.500,00
117114	Suku Cadang	4.247.700,00	(4.247.700,00)	0,00
117131	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	51.745.316,00	(51.745.316,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.837.731.684,00</b>	<b>(731.556.524,00)</b>	<b>7.106.175.160,00</b>

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp213.392.450,00 (*dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh*

*rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp213.392.450,00 (*dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

**a. Tanah**

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 seluas 570.438 m<sup>2</sup> sebesar Rp2.330.666.524.668,00 (*Dua triliun tiga ratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 537.313 m<sup>2</sup> sebesar Rp2.322.022.352.128,00 (*Dua triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah*). Mutasi tambah seluas 38.448 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp9.362.617.540,00 (*Sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah*), mutasi kurang seluas 5.323 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp718.445.000,00 (*Tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	717.170.000	0,00	717.170.000,00
Reklasifikasi masuk	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Hibah masuk	8.437.991.540	0,00	8.437.991.540,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	206.181.000	0,00	206.181.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.362.617.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362.617.540,00</b>

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi keluar	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Koreksi pencatatan	717.170.000,00	0,00	717.170.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>718.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.445.000,00</b>

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Baik	570.438	2.330.666.524.668,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m<sup>2</sup>/ Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu:

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	9.493,96	Rp109.664.231.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut

1. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m<sup>2</sup> senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
  - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m<sup>2</sup> senilai Rp3.037.866.000,00.
  - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m<sup>2</sup> senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/ KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m<sup>2</sup> senilai Rp342.853.000,00
  - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m<sup>2</sup> senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya. Tanah milik BKN yang berlokasi di belakang kantor yaitu Desa Waru, Sidoarjo seluas 97,44 m<sup>2</sup> telah dibangun bangunan permanen dan difungsikan oleh pihak ketiga sebagai garasi mobil.  
Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m<sup>2</sup> atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
  - b. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m<sup>2</sup> atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
4. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m<sup>2</sup> atas tanah sertifikat Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.118 m<sup>2</sup> senilai Rp20.215.074.000,00 yang tidak dimanfaatkan oleh BKN, namun digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 570.438 m<sup>2</sup>, terdapat tanah yang belum bersertifikat yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
  - a. Perumahan Citra Gran Blok Q Nomor 5, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup> senilai Rp1.021.623.000,00.
  - b. Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah 244 m<sup>2</sup> senilai Rp9.385.290.000,00.
2. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Akhmad Sood Nomor 25 Pontianak dengan luas tanah 1.420 m<sup>2</sup> senilai Rp1.275.000,00.
3. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di:
  - a. Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tangah, Kota Padang. dengan luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> senilai Rp400.000.000,00
  - b. Jalan Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam dengan luas tanah 20.019 m<sup>2</sup> senilai Rp7.887.525.400,00

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan Tanah untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-Kab Sorong dengan luas 30.000 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp4.600.000.000,- (Empat milyar enam ratus juta rupiah) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1 (satu) sertifikat seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan No. 33.02.06.01.4.00033 dan 1 (satu) sertifikat seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan No.33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara.

**c. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 79.341 unit/buah sebesar Rp709.687.406.999,00 (*tujuh ratus sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 69.282 unit/buah sebesar Rp646.418.410.922,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 18.477 unit/buah sebesar Rp127.491.645.055,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 8.418 unit/buah sebesar Rp64.222.648.978,00 (*enam puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

**c.1. Alat Besar (3.01);**

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah 234 unit sebesar Rp39,080,792,221,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sejumlah 219 unit sebesar Rp38.622.874.541,00 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) mutasi tambah 21 unit dengan nilai sebesar Rp3.541.912.210,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*) dan mutasi kurang 6 unit dengan nilai sebesar Rp3,083,994,530,00 (*Tiga Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	592.457.200,00	0,00	592.457.200,00
Pembelian	1.044.960.860,00	5.331.800,00	1.050.292.660,00
Hibah masuk	195.550.000,00	0,00	195.550.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.701.315.850,00	0,00	1.701.315.850,00
Perolehan Lainnya	0,00	546.500,00	546.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.536.033.910,00</b>	<b>5.878.300,00</b>	<b>3.541.912.210,00</b>

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	195.550.000,00	0,00	195.550.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	396.907.200,00	0,00	396.907.200,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.491.537.330,00	0,00	2.491.537.330,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.083.994.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.994.530,00</b>

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	233	38.539.312.221,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	1	541.480.000,00

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 unit/buah dengan nilai sebesar Rp2.491.537.330,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

#### c.2. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 337 unit sebesar Rp40.918.926.500,00 (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sejumlah 331 unit sebesar Rp40.946.836.600,00 (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 12 unit alat angkutan darat bermotor dengan nilai sebesar Rp21.864.900,00 (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 6 unit alat angkutan darat

bermotor dengan nilai sebesar Rp49,775,000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	19.940.000,00	644.900,00	20.584.900,00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.940.000,00</b>	<b>1.924.900,00</b>	<b>21.864.900,00</b>

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	49,775,000.00	0,00	49,775,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>49,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,775,000.00</b>

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	335	40.570.026.500,00
Rusak Ringan	2	348.900.000,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 6 buah/unit dengan nilai sebesar Rp49.775.000,00 (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

### c.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 102 unit sebesar Rp6.305.939.012,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 90 unit sebesar Rp 5.869.453.117,00 (*lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah*), mutasi tambah sejumlah 14 unit dengan nilai sebesar Rp460.100.145,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta seratus Ribu seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 2

unit dengan nilai sebesar Rp23.614.250,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	194.817.876,00	5.642.034,00	200.459.910,00
Koreksi Pencatatan Nilai	21.217.000,00	0,00	21.217.000,00
Pengembangan Melalui KDP	238.423.235,00	0,00	238.423.235,00
<b>Jumlah</b>	<b>454.458.111,00</b>	<b>5.642.034,00</b>	<b>460.100.145,00</b>

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.397.250,00	0,00	2.397.250,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	21.217.000,00	0,00	21.217.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.614.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.614.250,00</b>

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	102	6.305.939.012 ,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah 2 unit/buah Rp2.397.250,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

#### c.4. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 6 buah sebesar Rp49.107.300,00 (*Empat puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 6 buah sebesar Rp49.107.300,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	49.107.300,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

#### c.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 53.884 buah sebesar Rp234.208.950.008,00 (*dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 50.476 buah sebesar Rp224.623.442.365,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 7.037 unit dengan nilai sebesar Rp18.329.285.571,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 3.629 buah dengan nilai sebesar Rp8.743.777.928,00 (*delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	282.301.769,00	0,00	282.301.769,00
Pembelian	11.687.033.716,00	979.385.897,00	12.666.419.613,00
Hibah masuk	276.185.994,00	605.000,00	276.790.994,00
Reklasifikasi masuk	293.747.850,00	589.000,00	294.336.850,00
Reklasifikasi masuk dari persediaan	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	814.034,00	0,00	814.034,00
Transfer Masuk	3.836.807.359,00	0,00	3.836.807.359,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	84.555.000,00	0,00	84.555.000,00
Perolehan Lainnya	270.237.500,00	4.412.000,00	274.649.500,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	29.659.644,00	0,00	29.659.644,00
Pengembangan Melalui KDP	578.510.808,00	0,00	578.510.808,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.339.853.674,00</b>	<b>989.431.897,00</b>	<b>18.329.285.571,00</b>

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	15.106.974,00		15.106.974,00
Hibah keluar	20.572.634,00	0,00	20.572.634,00
Reklasifikasi keluar	100.179.000,00	589.000,00	100.768.000,00
Koreksi pencatatan	463.539.969,00	605.000,00	464.144.969,00
Reklasifikasi keluar ke persediaan	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
Penghentian aset dari penggunaan	4.280.767.652,00	21.606.340,00	4.302.373.992,00
Transfer Keluar	3.836.807.359,00	0,00	3.836.807.359,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.716.973.588,00</b>	<b>26.804.340,00</b>	<b>8.743.777.928,00</b>

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	53,517	232.235.963.943,00
Rusak Ringan	135	181.118.747,00
Rusak Berat	239	1.820.675.758,00

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1.538 buah/unit sebesar Rp4.302.373.992,00 (*empat miliar tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

c.6. Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 2,539 unit/buah sebesar Rp47.419.631.239,00 (*empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebesar 2.073 unit/buah sebesar Rp34.141.150.894,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar seratus Empat Puluh Satu Juta seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 770 buah dengan nilai sebesar Rp24,710,475,819,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 304 buah dengan nilai sebesar Rp11.431.995.474,00 (*sebelas milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	13.764.621.444,00	258.941.050,00	14.023.562.494,00
Perolehan Lainnya	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
Transfer Masuk	10.263.689.625,00	114.511.560,00	10.378.201.185,00
Reklasifikasi Masuk	15.999.540,00	2.017.600,00	18.017.140,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	288.710.000,00	0,00	288.710.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.333.020.609,00</b>	<b>377.455.210,00</b>	<b>24.710.475.819,00</b>

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	1.048.085.289,00	5.709.000,00	1.053.794.289,00
Transfer Keluar	10.263.689.625,00	114.511.560,00	10.378.201.185,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.311.774.914,00</b>	<b>120.220.560,00</b>	<b>11.431.995.474,00</b>

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2.532	45.233.334.152,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	13	2.192.322.897,00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 88 buah senilai Rp1.053.794.289,00 (*satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

c.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 459 buah sebesar Rp1.097.012.299,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 451 buah sebesar Rp1.081.124.403,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 16 buah dengan nilai sebesar Rp29.803.846,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 8 buah dengan nilai sebesar Rp13.915.950,00 (*tiga belas juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00
Hibah masuk	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00
Pembelian	14.738.846,00	1.125.000,00	15.863.846,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.678.846,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>29.803.846,00</b>

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi pencatatan	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	6.755.650,00	190.300,00	6.945.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.725.650,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>13.915.950,00</b>

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	456	1.091.096.299,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	3	5.916.000,00

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 7 buah sebesar Rp6.945.950,00 (*Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

c.8. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 147 buah sebesar Rp5.915.576.464,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 140 buah sebesar Rp5.889.262.494,00 (*Lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 7 buah dengan nilai sebesar Rp26.313.970,00 (*Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	24,338,970.00	1,975,000.00	26,313,970.00
<b>Jumlah</b>	<b>24,338,970.00</b>	<b>1,975,000.00</b>	<b>26,313,970.00</b>

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	150	4.934.054.623,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	6	981.521.841,00

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c.9. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 9 buah sebesar Rp6.339.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang 2 unit sebesar Rp2.400.000,00 (*Dua juta empat ratus ribu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 13 buah dengan nilai sebesar Rp23.456.140,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu seratus Empat Puluh Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 6 buah dengan nilai sebesar Rp19.517.140,00 (*Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu seratus Empat Puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	17.499.540,00	5.030.000,00	22.529.540,00
Perolehan Lainnya	0,00	926.600,00	926.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.499.540,00</b>	<b>5.956.600,00</b>	<b>23.456.140,00</b>

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	17.499.540,00	2.017.600,00	19.517.140,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.499.540,00</b>	<b>2.017.600,00</b>	<b>19.517.140,00</b>

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	6.339.000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.10. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 21.497 buah sebesar Rp331.973.928.442,00 (*tiga ratus tiga puluh satu*

milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 15.386 buah sebesar Rp292.524.172.338,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 10.550 buah dengan nilai sebesar Rp80.113.745.960,00 (Delapan Puluh Milyar seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 4.439 buah dengan nilai sebesar Rp40.663.989.856,00 (empat puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	61,533,504,419.00	1,658,834,988.00	63,192,339,407.00
Perolehan Lainnya	4,260,000.00	1,970,000.00	6,230,000.00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	2,130,000.00	1,886,778.00	4,016,778.00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
Pengembangan nilai aset (langsung)	535,914,750.00	0.00	535,914,750.00
Koreksi Pencatatan nilai bertambah	149,785,000.00	0.00	149,785,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7,812,500.00	0.00	7,812,500.00
Transfer masuk	14,548,459,540.00	1,125,147,985.00	15,673,607,525.00
Reklasifikasi Masuk	542,080,000.00	0.00	542,080,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>77,323,946,209.00</b>	<b>2,789,799,751.00</b>	<b>80,113,745,960.00</b>

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi susulan	149.785.000,00	0,00	149.785.000,00
Koreksi pencatatan nilai berkurang	0,00	980.000,00	980.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	24.295.577.331,00	0,00	24.295.577.331,00
Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
Transfer Keluar	14.548.459.540,00	1.125.147.985,00	15.673.607.525,00
Reklasifikasi Keluar	542.080.000,00	0,00	542.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.537.861.871,00</b>	<b>1.126.127.985,00</b>	<b>40.663.989.856,00</b>

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai

sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	21.477	342,630,157,638
Rusak Ringan	2	23.279.550,00
Rusak Berat	69	1.682.903.858,00

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1.013 buah sebesar Rp24.295.577.331,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

c.11. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 74 buah sebesar Rp2.391.681.414,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 67 buah sebesar Rp2.357.885.270,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 25 buah dengan nilai sebesar Rp225.864.994,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 18 buah dengan nilai sebesar Rp192.068.850,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	223,915,194.00	1,949,800.00	225,864,994.00
<b>Jumlah</b>	<b>223,915,194.00</b>	<b>1,949,800.00</b>	<b>225,864,994.00</b>

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	192.068.850,00	0,00	192.068.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>192.068.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.068.850,00</b>

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya

adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	74	2.391.681.414,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.12. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 15 buah sebesar Rp58.719.600,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 8 buah sebesar Rp54.978.600,00 (*Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 7 buah dengan nilai sebesar Rp3.741.000,00 (*Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	0.00	3,741,000.00	3,741,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>3,741,000.00</b>	<b>3,741,000.00</b>

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	15	58.719.600,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah senilai Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.13. Rambu – Rambu (3.18)

Saldo Rambu - Rambu pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 30 unit sebesar Rp157.150.900,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebanyak 26 unit sebesar Rp152.965.000,00 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar Rp4.185.900,00 (*Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	3.750.000,00	435.900,00	4.185.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>4.185.900,00</b>

Mutasi Kurang Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	30	157.150.900,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Rambu - Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.14. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 sejumlah 8 buah sebesar Rp103.652.600,00 (*seratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 7 buah sebesar Rp102.758.000,00 (*Seratus dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 1

buah sebesar Rp894.600,00 (*delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	0,00	894.600,00	894.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>894.600,00</b>

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8	103.652.600,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.15. Akumulasi Penyusutan

Tabel 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		
		INTRAKOMPTABLE (Rp)	EKSTRAKOMPTABLE (Rp)	GABUNGAN (Rp)
30103	ALAT BANTU	29.344.312.493,00	4.919.516,00	29.349.232.009,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	30.743.231.976,00	-	30.743.231.976,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	200.062.024,00	8.300.850,00	208.362.874,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5.614.626.877,00	237.832,00	5.614.864.709,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	114.580.445,00	3.942.868,00	118.523.313,00
30303	ALAT UKUR	57.048.075,00	2.101.400,00	59.149.475,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	48.602.950,00	-	48.602.950,00
30501	ALAT KANTOR	79.102.508.309,00	56.395.880,00	79.158.904.189,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	131.409.062.162,00	1.697.087.981,00	133.106.150.143,00
30601	ALAT STUDIO	25.744.100.838,00	50.097.845,00	25.794.198.683,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	4.908.290.992,00	76.948.807,00	4.985.239.799,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.111.327.449,00	-	1.111.327.449,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	822.012.535,00	14.722.165,00	836.734.700,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	71.774.675,00	1.973.400,00	73.748.075,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5.516.731.780,00	3.227.626,00	5.519.959.406,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4.343.850,00	-	4.343.850,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	34.374.991,00	-	34.374.991,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	856.800,00	923.750,00	1.780.550,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.200.000,00	739.875,00	1.939.875,00
31001	KOMPUTER UNIT	91.669.555.574,00	-	91.669.555.574,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	152.023.638.823,00	356.121.507,00	152.379.760.330,00
31503	ALAT SAR	2.169.719.500,00	2.066.750,00	2.171.786.250,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	41.967.758,00	-	41.967.758,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	39.390.638,00	281.625,00	39.672.263,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	140.600.716,00	12.962.272,00	153.562.988,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	78.758.000,00	298.200,00	79.056.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>561.012.680.230,00</b>	<b>2.293.350.149,00</b>	<b>563.306.030.379,00</b>

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 499 unit sebesar Rp868.873.680.270,00 (*delapan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 491 unit sebesar Rp859.052.986.512,00 (*delapan ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah*), mutasi tambah 18 unit sebesar Rp 11.632.311.173,00 (*sebelas milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang 10 unit sebesar Rp 1.811.617.415,00 (*satu milyar delapan ratus*

sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

d.1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 466 unit sebesar Rp853.442.166.040,00 (*delapan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 459 unit sebesar Rp844.312.939.901,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 16 unit sebesar Rp10.773.017.929,00 (*sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang 9 unit sebesar Rp1.643.791.790,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*)

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	880.788.000,00	0,00	880.788.000,00
Pembelian	361.353.341,00	4.939.500,00	366.292.841,00
Hibah masuk	2.011.623.500,00	0,00	2.011.623.500,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	4.192.803.043,00	0,00	4.192.803.043,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.897.981.208,00		2.897.981.208,00
Reklasifikasi Masuk	143.528.000	0,00	143.528.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	234.429.780	0,00	234.429.780,00
Koreksi Susulan	45.571.557	0,00	45.571.557,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.768.078.429,00</b>	<b>4.939.500,00</b>	<b>10.773.017.929,00</b>

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	74.332.065,00	0,00	74.332.065,00
Koreksi Pencatatan	1.420.992.225,00	4.939.500,00	1.425.931.725,00
Reklasifikasi Keluar	143.528.000,00	0,00	143.528.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.638.852.290,00</b>	<b>4.939.500,00</b>	<b>1.643.791.790,00</b>

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	463	861.331.617.466,00
Rusak Ringan	10	5.067.193.000,00
Rusak Berat	26	1.969.763.000,00

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

d.2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Monumen di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	51.419.000,00
Rusak Ringan	0,00	0,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.3. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 28 unit sebesar Rp15.380.095.230,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 27 unit sebesar Rp14.688.627.611,00 (*Empat belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah*), mutasi tambah sejumlah 2 unit/buah dengan nilai sebesar Rp859.293.244,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit/buah dengan nilai sebesar Rp167.825.625,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo Awal	167.825.625,00	0,00	167.825.625,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	686.528.119,00	0,00	686.528.119,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	4.939.500,00	0,00	4.939.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>859.293.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.293.244,00</b>

Mutasi Kurang Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	167,825,625	0.00	167,825,625
<b>Jumlah</b>	<b>167,825,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,825,625.00</b>

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	14.520.801.986,00
Rusak Ringan	1	167.825.625,00
Rusak Berat	0,00	0,00

Kelompok barang Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

#### d.4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan		
		intrakomptable	ekstrakomptable	gabungan
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.860.915.863,00	554.439,00	144.861.470.302,00
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.551.340.094,00	0,00	18.551.340.094,00
4.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.009.096,00	1.147.500,00	7.156.596,00
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	2.303.563.020,00	0,00	2.303.563.020,00
<b>Jumlah</b>		<b>165.721.828.073,00</b>	<b>1.701.939,00</b>	<b>165.723.530.012,00</b>

#### e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 58.830 m<sup>2</sup> sebesar Rp24.716.999.940,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 58.642 m<sup>2</sup> sebesar Rp24.589.544.940,00 (*Dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), mutasi tambah 377 m<sup>2</sup> sebesar Rp271.338.500,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 189 m<sup>2</sup> sebesar Rp143.883.500,00 (*seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

##### e.1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 58.771 m<sup>2</sup> sebesar Rp16.468.966.800,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 58.583 m<sup>2</sup> sebesar Rp16.341.511.800,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 376 m<sup>2</sup> sebesar Rp254.910.000,00 (*dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 188 m<sup>2</sup> sebesar Rp127.455.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo awal	127.455.000,00	0,00	127.455.000,00
Hibah masuk	127.455.000,00	0,00	127.455.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>254.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.910.000,00</b>

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	127.455.000,00	0,00	127.455.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>127.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.455.000,00</b>

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	58.583	16.341.511.800,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m<sup>2</sup> sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

#### e.2. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 27 unit sebesar Rp2.980.446.163,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 27 unit sebesar Rp2.980.446.163,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 1 unit/buah nilai sebesar Rp16.428.500,00 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit/buah sejumlah Rp16.428.500,00 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Mutasi Tambah Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo Awal	16,428,500.00	0.00	16,428,500.00
<b>Jumlah</b>	<b>16,428,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,428,500.00</b>

Mutasi Kurang Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	16.428.500,00	0,00	16.428.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.428.500,00</b>

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	2.934.621.163,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	45.825.000,00

Kelompok barang irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

### e.3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.070.226.260,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.070.226.260,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	3.070.226.260,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	2.197.360.717,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>15.831.346.575,00</b>
5.01.01	Jalan	15.830.986.579,00
5.01.02	Jembatan	359.996,00
	<b>IRIGASI</b>	<b>788.035.767,00</b>
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	32.623.537,00
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	25.120.446,00
5.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	16.428.500,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	538.865.324,00
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	99.662.396,00
5.02.07	Bangunan Air Kotor	75.335.564,00
	<b>JARINGAN</b>	<b>2.325.752.656,00</b>
5.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	203.544.165,00
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	257.020.652,00
5.03.10	Instalasi Lain	951.173.820,00
5.04.01	Jaringan Air Minum	60.573.738,00
5.04.02	Jaringan Listrik	807.353.859,00
5.04.03	Jaringan Telepon	46.086.422,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.945.134.998,00</b>

**f. Aset Tetap Dalam Renovasi**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 25 unit/buah sebesar Rp12.060.376.974,00 (*dua belas milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak sebanyak 28 unit/buah sebesar Rp18.029.872.298,00 (*delapan belas milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah 5 unit/buah sebesar Rp2.011.472.989,00 (*Dua milyar sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 8 unit/buah sebesar Rp7.980.968.313,00 (*tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi per bidang barang adalah sebagai berikut:

**f.1. Peralatan dan Mesin dalam Renovasi (6.07)**

Saldo Peralatan dan Mesin dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	3.998.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Peralatan dan Mesin dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

#### f.2. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (6.07)

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 23 unit/buah sebesar Rp11.976.140.074,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 24 unit/buah sebesar Rp17.766.969.398,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 4 unit/buah sebesar Rp1.921.800.989,00 (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp7.712.630.313,00 (*tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah*).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	48.700.000	0	48.700.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.423.600.000	0	1.423.600.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	449.500.989	0	449.500.989,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.921.800.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.800.989,00</b>

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	3.978.091.902	0	3.978.091.902,00
Koreksi Pencatatan	2.511.476.983	0	2.511.476.983,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.489.568.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489.568.885,00</b>

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	24	13.199.201.502,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

### f.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi (6.03)

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp80.238.400,00 (*delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 3 unit/buah sebesar Rp258.904.400,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp89.672.000,00 (*Delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 3 unit/buah sebesar Rp268.338.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo Awal	89.672.000,00	-	89.672.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>89.672.000,00</b>	<b>-</b>	<b>89.672.000,00</b>

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	268.338.000,00		268.338.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>268.338.000,00</b>	-	<b>268.338.000,00</b>

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	258.904.400,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

#### f.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	-
6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	558.669.466,00
6.07.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	-
6.07.05	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	-
	<b>Jumlah</b>	<b>558.669.466,00</b>

#### g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 sejumlah 12.138 sebesar Rp1.849.014.625,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.846 sebesar Rp1.820.436.125,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 702 unit/buah sebesar Rp48.035.500,00 (*Empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 410 unit/buah sebesar Rp19.457.000,00 (*Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

g.1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 11.615 sebesar Rp1.649.891.025,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.815 unit/buah sebesar Rp1.655.717.025,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 210 unit/buah dengan nilai sebesar Rp13.631.000,00 (*Tiga belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 410 unit/buah sebesar Rp19.457.000,00 (*Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Masuk	13.631.000	-	13.631.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.631.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.631.000,00</b>

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	5.826.000,00	-	5.826.000,00
Reklasifikasi Keluar	13.631.000,00	-	13.631.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.457.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.457.000,00</b>

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11.615	1.649.891.025,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	200	5.826.000,00

Kelompok Bahan Perpustakaan Tercetak yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 200 unit/buah sebesar Rp5.826.000,00 (*lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

g.2. Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga (6.02);

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 31 unit/buah sebesar

Rp164.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah sejumlah 31 unit/buah sebesar Rp164.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	31	164.719.100,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

### g.3. Tanaman (6.05);

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 492 unit/buah sebesar Rp34.404.500,00 (*tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 492 unit/buah sebesar Rp34.404.500,00 (*Tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	34.404.500	34.404.500
<b>Jumlah</b>	-	<b>34.404.500,00</b>	<b>34.404.500,00</b>

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	492	34.404.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

#### g.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.01.01	Bahan Perpustakaan	0,00
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	44.289.663,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
6.05.01	Tanaman	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.289.663,00</b>

#### h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp168.877.064,00 (*Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp160.452.975,00 (*Seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp4.721.357.101,00 (*Empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus satu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp4.712.933.012,00 (*Empat milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua belas rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	503.323.224,00
Pengembangan KDP	4.036.190.677,00
Koreksi Nilai KDP Bertambah	181.843.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.721.357.101,00</b>

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	4.712.933.012,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.712.933.012,00</b>

#### i. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp128.315.944.862,00 (*seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp142.021.610.016,00 (*seratus empat puluh dua milyar dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu enam belas rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp666.683.760,00 (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp14.372.348.914,00 (*empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).

##### i.1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

##### i.2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 213 unit/buah sebesar Rp125.741.319.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 280 unit/buah sebesar Rp142.021.610.016,00 (*seratus empat puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu enam belas rupiah*), mutasi tambah sejumlah sejumlah 3 unit/buah sebesar Rp1.091.685.620,00 (*satu miliar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 70 unit/buah dengan nilai sebesar Rp17.371.976.149,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

i.2.1 Hak Cipta

Saldo Hak Cipta pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hak Cipta di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hak Cipta yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2.2 Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 211 unit/buah sebesar Rp125.545.819.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 277 unit/buah sebesar Rp141.786.451.166,00 (*seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3 unit/buah sebesar Rp1.091.685.620,00 (*satu miliar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 69 unit/buah dengan nilai sebesar Rp17.332.317.299,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	191.475.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	475.208.760
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	425.001.860
<b>Jumlah</b>	<b>1.091.685.620,00</b>

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	14.332.690.064
<b>Jumlah</b>	<b>14.332.690.064,00</b>

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 59 unit/buah dengan nilai sebesar Rp14.332.690.064,00 (*Empat belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah*).

### i.2.3 Lisensi

Saldo Lisensi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-

Mutasi Kurang Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	39.658.850
<b>Jumlah</b>	<b>39.658.850,00</b>

Dari jumlah Lisensi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Lisensi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)).

#### i.2.4 Hasil Kajian Penelitian

Saldo Hasil Kajian Penelitian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hasil Kajian Penelitian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hasil Kajian Penelitian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### i.3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 216 unit/buah sebesar Rp21.362.783.827,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 664 unit/buah sebesar Rp12.660.277.036,00 (*Dua belas milyar enam ratus enam puluh juta empat puluh*

*tujuh ribu tiga puluh enam rupiah), mutasi tambah sejumlah 2.991 buah/unit dengan nilai sebesar Rp49.580.203.291,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 3.439 buah/unit dengan nilai sebesar Rp40.877.696.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).*

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	34.161.007.002,00	27.505.640	34.188.512.642
<b>Jumlah</b>	<b>34.161.007.002,00</b>	<b>27.505.640,00</b>	<b>34.188.512.642,00</b>

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	7.812.500,00	-	7.812.500,00
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	40.416.861.150,00	28.020.990,00	40.444.882.140
<b>Jumlah</b>	<b>40.424.673.650,00</b>	<b>28.020.990,00</b>	<b>40.452.694.640,00</b>

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.075.803.288,00	12.392.063.414,00	15.467.866.702,00
Gedung dan Bangunan	144.174.000,00	-	144.174.000,00
Aset Tak Berwujud	3.176.117.750,00	-	3.176.117.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.396.095.038,00</b>	<b>12.392.063.414,00</b>	<b>18.788.158.452,00</b>

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah adalah:

Tabel 9. Akumulasi Penyusutan BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Kode	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
30103	ALAT BANTU	0,00	0,00	0,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0,00	0,00	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0,00	0,00	0,00
30303	ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	0,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	8.881.020	0,00	8.881.020,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	389.359.732	0,00	389.359.732,00
30601	ALAT STUDIO	946.857.597	0,00	946.857.597,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	541.968.610	0,00	541.968.610,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	436.185.894,00	0,00	436.185.894,00
31001	KOMPUTER UNIT	2.110.400.875	0,00	2.110.400.875,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	11.034.212.974	0,00	11.034.212.974,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30.095.338	0,00	30.095.338,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0,00	0,00	0,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0,00	0,00	0,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	5.560.543.125	0,00	5.560.543.125
	<b>Total</b>	<b>21.058.505.165,</b>	<b>-</b>	<b>21.058.505.165,</b>

Yg ATB yg dimaksud pak adilla itu nilai perolehan bukan akm amortisasinya (gue uda bener)

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023
  - a. Barang Milik Negara per Akun Neraca

Nilai BMN Intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.096.885.052.107,00 (*empat triliun sembilan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut

Tabel 10. Penyajian nilai BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan
		Rp	%	Rp	%	Rp
<b>I</b>	<b>ASET LANCAR</b>					
1	Persediaan	7.106.175.160,00	0,17	-	0,00	7.106.175.160,00
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>7.106.175.160,00</b>	0,17	-	0,00	<b>7.106.175.160,00</b>
<b>II</b>	<b>ASET TETAP</b>					
1	Tanah	2.330.666.524.668,00	56,89	-	0,00	2.330.666.524.668,00
2	Peralatan Mesin	704.398.035.892,00	17,19	5.289.371.107	98,90	709.687.406.999
3	Gedung & Bangunan	868.849.348.970,00	21,21	24.331.300	0,45	868.873.680.270
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.716.999.940,00	0,60	-	0,00	24.716.999.940
5	Aset Tetap Lainnya	1.814.610.125,00	0,04	34.404.500	0,00	1.849.014.625
6	ATR	12.060.376.974,00	0,29	-	0,00	12.060.376.974
7	KDP	168.877.064,00	0,00	-	0,00	168.877.064
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>3.942.674.773.633,00</b>	96,24	<b>5.348.106.907,00</b>	100,00	<b>3.948.022.880.540,00</b>
<b>III</b>	<b>ASET LAINNYA</b>					
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-
2	Aset Tak Berwujud	125.741.319.487,00	3,07	-	0,00	128.315.944.862,
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	2.136.278.382,00	0,52	-	0,00	2.136.278.382
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>147.104.103.314,00</b>	3,59	-	0,00	<b>147.104.103.314,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.096.885.052.107,00</b>	<b>100</b>	<b>5.348.106.907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.102.233.159.014,00</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyajian nilai Penyusutan BMN dalam Neraca

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>ASET TETAP</b>						
Peralatan Mesin	561.012.680.230,00	62,93	2.293.350.149,00	99,93	563.306.030.379,00	63,02
Gedung & Bangunan	165.721.828.073,00	18,59	1.701.939,00	0,07	165.723.530.012,00	18,54
Jalan, dan Jembatan	15.831.346.575,00	1,78	-	0,00	15.831.346.575,00	1,77
Irigasi	788.035.767,00	0,09	-	0,00	788.035.767,00	0,09
Jaringan	2.325.752.656,00	0,26	-	0,00	2.325.752.656,00	0,26
Aset Tetap dlm Renov.(ATR)	558.669.466,00	0,06	-	0,00	558.669.466,00	0,06
Aset Tetap Lainnya	44.289.663,00	0,00	-	0,00	44.289.663,00	0,00
<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>746.282.602.430,00</b>	<b>83,71</b>	<b>2.295.052.088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>748.577.654.518,00</b>	<b>83,75</b>
<b>ASET LAINNYA</b>						
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Aset Tak Berwujud (ATB)	124.210.061.367,00	13,93	-	0,00	124.210.061.367,00	13,90
Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional	15.497.962.040,00	1,74	-	0,00	15.497.962.040,00	1,73
ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	5.560.543.125,00	0,62	-	0,00	5.560.543.125,00	0,62
<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>145.268.566.532,00</b>	<b>16,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.268.566.532,00</b>	<b>16,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>891.551.168.962,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.295.052.088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>893.846.221.050,00</b>	<b>100,00</b>

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan nilai BMN Laporan Barang dan Laporan Keuangan

No.	Golongan Barang	Laporan Barang (Rp)	Laporan Keuangan (Rp)	Selisih
1	Persediaan	7.106.175.160,00	7.106.175.160,00	-
2	Tanah	2.330.666.524.668,00	2.330.666.524.668,00	-
3	Peralatan Mesin	709.687.406.999,00	709.687.406.999,00	-
4	Gedung & Bangunan	868.873.680.270,00	868.873.680.270,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.716.999.940,00	24.716.999.940,00	-
6	Aset Tetap dlm Renov (ATR)	12.060.376.974,00	12.060.376.974,00	-
7	Aset Tetap Lainnya	1.849.014.625,00	1.849.014.625,00	-
8	KDP	168.877.064,00	168.877.064,00	-
9	Aset Tak Berwujud	125.741.319.487,00	125.741.319.487,00	-
10	Aset Lain-lain *)	21.362.783.827,00	21.362.783.827,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.102.233.159.014,00</b>	<b>4.102.233.159.014,00</b>	-

\*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

## II. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2018	4.132.204.607.112,00	140.599.390.357,00	3,52
2	31 Desember 2019	4.187.534.481.904,00	55.329.874.792,00	1,34
3	31 Desember 2020	3.950.769.706.634,00	(236.764.775.270,00)	(5,65)
4	31 Desember 2021	4.014.796.075.085,00	64.026.368.451,00	1,62
5	31 Desember 2022	4.034.613.674.636,00	19.817.599.551,00	0,49
6	31 Desember 2023	4.102.233.159.014,00	67.619.484.378,00	0,02

### 2. Informasi Pengelola BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Golongan Barang	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (m <sup>2</sup> )	2,254,080,549,818.00	13,924,059,850.00
2	Peralatan dan Mesin	642,024,033,814.00	67,026,795,369.00
3	Gedung dan Bangunan	862,713,851,290.00	5,798,896,176.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,897,916,440.00	819,083,500.00
5	Aset Tetap Lainnya	1,772,339,108.00	76,675,517.00
6	Aset Tak Berwujud	131,300,587,612.00	191,475,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,915,789,278,082.00</b>	<b>87,836,985,412.00</b>

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	4	2	3	-	9
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/ Kuasa Pengguna	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	6	2	9	-	17
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	10	2	12	-	24
8	Selesai serah terima	-	-	12	-	12
9	Gagal/Batal Proses	-	-	-	-	-

Keterangan: \*) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 masih

mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
	Total			

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.773.219.404,00

(sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus empat rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.224.820.354,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	1.969.763.000,00	0,00
3	Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan	45.825.000,00	0,00
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	2.532.811.050,00	0,00
Total		11.773.219.404,00	0,00

b. Daftar barang hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku
1			
Total			

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1			0,00

Total		
-------	--	--

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kanreg III BKN Bandung	815.259.876,00	0,00
2	Kanreg XI BKN Manado	719.198.022,00	0,00
3	Kanreg XII BKN Pekanbaru	993.022.405,00	0,00
Total		2.527.480.303,00	0,00

9. BMN Berupa BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai (Rp)
1		
2		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan serta langkah-langkah strategis yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain:

1. Aset berupa gedung dan bangunan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
  - a. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat Nomor. S-4130/A/144/1992, tanggal 28 oktober 1992, Kantor Regional III BKN Bandung telah mengajukan permohonan peminjaman tanah tersebut. Departemen Keuangan telah menanggapi dengan surat Nomor: 432/I/1992 dan Surat Kepala PPDIA Bandung tanggal 22 September 1992 tentang Hak Guna Tanah. Akan tetapi, sampai sekarang permohonan pinjam pakai tersebut belum terealisasi.

11. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian adalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Badan Kepegawaian Negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN dan KPKNL sebagai pembina Penatausahaan BMN ;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan penatausahaan BMN kepada satker-satker dan stakeholder terkait;
- c. Melakukan penatausahaan pengelolaan BMN lebih cermat dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

### III. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- I. *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.”*
- II. *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan Penyajian BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan.
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi :
  - 1) jalan dan jembatan.
  - 2) bangunan air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022, terdapat temuan terkait Penatausahaan Persediaan dan Pengelolaan Aset tetap. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022

Pada Badan Kepegawaian Negara  
Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	<b>Tahun 2022:</b> - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II  <b>Tahun 2023:</b> - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Pemecahan sertifikat [belum]
2	Belanja Pemeliharaan dan Bahan Direalisasikan untuk Pembelian Aset Tetap Sebesar Rp273.267.03	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
3	Terdapat Kelebihan Pembayaran Enam Paket Pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp34.777.156	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
4	Terdapat Indikasi Kemahalan Harga 14 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN Sebesar Rp174.898.775	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
5	Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
6	Dua Paket Pekerjaan pada Biro Umum Dilaksanakan Mendahului Kontrak.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
7	Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN

8	Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan atas Dua Kegiatan Fisik di Kanreg VI Medan Belum Sesuai dengan Ketentuan	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
9	Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
10	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal pada Tiga Satuan Kerja sebesar Rp19.403.562.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
11	Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN
12	Pengelolaan Aset Tetap pada Tiga Satuan Kerja BKN Belum Tertib.	<b>Tahun 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN

Penanggungjawab

Laporan Pengguna Barang Tahunan

Per 31 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



*Haryomo Dwi Putranto*  
Haryomo Dwi Putranto

# **LAMPIRAN XIII**

## **Monitoring Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK**

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
1	2022	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	BPK merekomendasikan Pit. Kepala BKN agar menginstruksikan KPA pada Biro Umum Kantor Pusat BKN dan Kanreg II BKN Surabaya untuk: a. Menindaklanjuti permintaan dari pihak ketiga untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah yang telah dilunasi.	<b>Semester II 2022:</b> - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II <b>Semester II 2023:</b> - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Pemecahan sertifikat [belum]	Belum Sesuai		Melakukan pemecahan sertipikat.
2				b. Melakukan penertiban atas tanah milik BKN yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga.	<b>Semester II 2022:</b> - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II <b>Semester I 2023:</b> - Surat ke Warga untuk merenovasi Pagur Rumah; <b>Semester II 2023:</b> - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Penertiban lahan [belum]	Belum Sesuai		Melakukan penertiban.
3	2023	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai BKN Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama dan Kepala Biro Keuangan <b>Semester II 2023:</b> - Surat Penyampaian Progres oleh Kepala Biro Keuangan - Surat Sesma ke Kepala Biro Keuangan - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotongan tukin dalam form 1721-A2 [belum]	Belum Sesuai		Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.
4			Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia <b>Semester I 2024:</b> - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Penyesuaian Peraturan akan Dilakukan Ketika PP Gail dan Tujuan Berlaku - Peraturan pemberian dan pembayaran tukin [belum]	Belum Sesuai		Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
5				b. Menyusun kebijakan terkait batasan dan sanksi terhadap pegawai yang lupa mengisi daftar hadir	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia <b>Semester I 2024:</b> - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Kebijakan Sudah Berupa Draft dan Disampaikan Kepada Karo Humas untuk Disesuaikan Format Peraturan yang Berlaku - Kebijakan tentang batasan dan sanksi pegawai lupa mengisi daftar hadir [belum]	Belum Sesuai		b. Menyusun kebijakan terkait batasan dan sanksi terhadap pegawai yang lupa mengisi daftar hadir

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
6			Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan yang berlaku.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN)  <b>Semester II 2023:</b> - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kapusbang ke PPSPM - Surat KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Keuangan memerintahkan PPSPM, Kasubag, Belanja Pegawai, dan PPABP - Surat Perintah Karo Keuangan ke PPSPM [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Surat KPA Kantor Pusat dan KPA Kanreg Jogja ke PPSPM belum ada.(Hoven)	Kepala BKN menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan yang berlaku.
7				b. Memerintahkan Kepala Subbagian Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan PPABP Kanreg terkait agar cermat dalam menghitung besaran pembayaran kepada pegawai.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, dan Kantor Regional I BKN Yogyakarta)  <b>Semester II 2023:</b> - Surat Perintah Kakanreg I BKN Yogyakarta ke PPABP - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kapusbang ke PPABP - Surat KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Keuangan memerintahkan PPSPM, Kasubag, Belanja Pegawai, dan PPABP - Surat Perintah Karo Keuangan ke Kasubag Belanja Pegawai [belum] - Sampel bukti dukung perhitungan pembayaran [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai, belum ada perintah atau teguran KPA ke Kasubag Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan sampel bukti dukung perhitungan pembayaran	b. Memerintahkan Kepala Subbagian Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan PPABP Kanreg terkait agar cermat dalam menghitung besaran pembayaran kepada pegawai.
8			Pembayaran Uang Lembur Tidak Didukung dengan Bukti Kehadiran Real Time dari Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN: a. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN  <b>Semester II 2023:</b> - Surat Tanggapan Kepala PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kepala PusBangPeg ASN ke Kepala Biro SDM perihal Teknis Jam Kerja Lembur  <b>Semester I 2024:</b> - Surat Kakanreg Bandung ke Kepala Biro SDM perihal Penggunaan LBP untuk Lembur Pegawai  - Surat Tanggapan Karo SDM terhadap Surat Kepala PusBangPeg ASN [belum] - Surat Tanggapan Karo SDM terhadap Surat Kakanreg Bandung [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada tanggapan Biro SDM untuk penggunaan LBP lembur di hari libur	Kepala BKN menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk: a. Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.
9				b. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN - Bukti pelaksanaan lembur sabtu minggu di PusBangPeg ASN sudah menggunakan LBP dilengkapi dengan ST Lembur [belum] - Bukti pelaksanaan lembur sabtu minggu di Kanreg III BKN Bandung sudah menggunakan LBP dilengkapi dengan ST Lembur [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada bukti bahwa lembur hari sabtu minggu sudah pakai LBP (ST Lembur dan Printout LBP).	b. Mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPS	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
10			Belanja Pemeliharaan dan Bahan Drealisasikan untuk Pembelian Aset Tetap Sebesar Rp273.267.03	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIV BKN Manokwari, dan PPK Puspenkom ASN lebih cermat dalam menganggarkan belanja sesuai dengan klasifikasinya.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN, Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional VI BKN Medan, dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari) - Surat Perintah Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ke PPK <b>Semester II 2023:</b> - Surat Penyampaian Tanggapan oleh Kakanreg IV BKN Makassar bahwa telah menegur PPK Bahwa KPA Manokwari merangkap sebagai PPK - Surat Perintah dari PA ke KPA  - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Puspenkom - Surat Perintah Kepala BKN ke KPA Kanreg XIV BKN Manokwari merangkap sebagai PPK [belum]  - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Puspenkom [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada tindak lanjut agar PPK Kanreg Manokwari lebih cermat (surat perintah ke tindak lanjut bukan teguran agar lebih cermat), dan belum ada surat teguran KPA ke PPK Puspenkom ASN	Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIV BKN Manokwari, dan PPK Puspenkom ASN lebih cermat dalam menganggarkan belanja sesuai dengan klasifikasinya.
11			Terdapat Kelebihan Pembayaran Enam Paket Pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp34.777.156	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA pada satker terkait untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN lebih cermat dalam menyusun HPS.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum memerintahkan PPK Biro Umum - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada surat ke PPK Biro Umum	Kepala BKN menginstruksikan KPA pada satker terkait untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN lebih cermat dalam menyusun HPS.
12			Terdapat Indikasi Kemahalan Harga 14 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN Sebesar Rp174.898.775	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN selaku KPA untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN dan Direktorat PPU lebih cermat dalam membuat HPS dan mengendalikan pekerjaan.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Dir. PPU - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan PPK Dit. PPU [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada surat ke PPK Biro Umum dan PPK Dit. PPU	Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN selaku KPA untuk: a. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN dan Direktorat PPU lebih cermat dalam membuat HPS dan mengendalikan pekerjaan.
13				b. Memerintahkan PPK Direktorat INTI membuat HPS mengacu kepada SBM.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Dir. INTI - Surat Perintah Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Dit. INTI [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada surat ke PPK Dit. INTI	b. Memerintahkan PPK Direktorat INTI membuat HPS mengacu kepada SBM.

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPS	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
14			Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruang Hotel Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN memastikan: 1) Bendahara pengeluaran di masing-masing satker dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA <b>Semester II 2023:</b> - Bukti bahwa PPh23 telah disetor oleh Oemah Kecebong Yogyakarta atas kegiatan Fullday meeting Rakor Permasalahan Kepegawaian wilker Kanreg X Denpasar BKN bulan Mei 2022  - Bukti bahwa PPh23 telah disetor oleh Kanreg XI BKN Manado atas kegiatan paket meeting fullday - Surat Perintah KPA Kanreg V BKN Jakarta ke PPK dan Bendahara  - Surat Penyampaian Tanggapan oleh Kakanreg IV BKN Makassar bahwa telah menegur Bendahara Pengeluaran dan berkoordinasi dengan Pihak Hotel - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Bukti bahwa PPh23 telah disetor oleh PusBangPeg ASN atas kegiatan 2023 - Surat Perintah Sesma ke KPA terkait <b>Semester I 2024:</b> - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Bendahara Pengeluaran - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg XIV BKN Manokwari dengan KPP setempat (1 Paket Meeting) - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat BKN dengan KPP setempat (7 Paket Meeting PPSS) [belum] - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran PusBangPeg ASN dengan KPP setempat (5 Paket Meeting) [belum] - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg III BKN Bandung dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum] Tidak perlu bertanya karena temuan Kanreg Bandung berupa kelebihan potong. - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg IV BKN Makassar dengan KPP setempat (8 Paket Meeting) [belum] - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg V BKN Jakarta dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. belum didukung bukti setor yang memadai	Kepala BKN menginstruksikan : a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruang Hotel;
15				b. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang dimiliki BKN.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama  - Surat Perintah Sesma ke Kepala Biro Keuangan  - Bukti penyesuaian aplikasi SIAVA [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. belum ada penyesuaian aplikasi	b. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi SIAVA sebagai alat kontrol kelengkapan dokumen.

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
16			Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional III BKN Bandung)  - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum dan Kakanreg Bandung <b>Semester I 2024:</b> - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum [belum] - Bukti perbaikan oleh PPK Biro Umum yang menunjukkan pelaksanaan pengadaan sudah sesuai KAK [belum] - Surat Perintah KPA Kanreg III BKN Bandung ke PPK [belum] - Bukti perbaikan oleh PPK Kanreg III BKN Bandung yang menunjukkan penyusunan pengadaan melaksanakan tahap survei harga [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum ada surat ke PPK maupun bukti perbaikan perencanaan dan pengadaan seperti contoh KAK Pengadaan Belanja Modal (contoh di Biro Umum) dan HPS yang melampirkan referensi harga (Kanreg Bandung). Contoh yang terkini.	Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.
17			Dua Paket Pekerjaan pada Biro Umum Dilaksanakan Mendahului Kontrak	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Biro Umum - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK Biro Umum dan Pejabat Pengadaan Biro Umum [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum didukung teguran ke PPK dan Pejabat Pengadaan	Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan.
18			Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk: a. Menginstruksikan PPK PPSS lebih cermat dalam melakukan survei kewajaran harga, menentukan HPS, mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan memasukkan biaya pengiriman dalam kontrak pekerjaan.	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke PPK PPSS [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> belum sesuai. Belum ada surat perintah atau teguran ke PPK PPSS	Kepala BKN untuk: a. Menginstruksikan PPK PPSS lebih cermat dalam melakukan survei kewajaran harga, menentukan HPS, mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan memasukkan biaya pengiriman dalam kontrak pekerjaan.
19			b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.		<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS - Bukti oleh PPK PPSS bahwa telah melaporkan ke LKPP [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada laporan kepada LKPP atas permasalahan tersebut	b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.
20			Pengelolaan Kas Pada Tiga Satker BKN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada	<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - BA Cash Opname [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada BA Cash Opname.	Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.
21			b. Memerintahkan Kakanreg III BKN Bandung dan Kakanreg VI BKN Medan untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.		<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA (Kantor Regional III BKN Bandung dan Kantor Regional VI BKN Medan) <b>Semester I 2024:</b> - BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan - Lampiran BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan (Keadaan Brankas) - BA Cash Opname Kanreg III BKN Bandung [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada BA Cash Opname.	b. Memerintahkan Kakanreg III BKN Bandung dan Kakanreg VI BKN Medan untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.
22			c. Memerintahkan Kakanreg VI BKN Medan supaya Kepala Subbagian Keuangan pada Kanreg VI BKN Medan tertib dalam menggunakan brankas yang ditempatkan pada unit kerjanya.		<b>Semester I 2023:</b> - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Regional III BKN Medan - Surat Perintah Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ke Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan <b>Semester I 2024:</b> - BA Cash Opname Kanreg VI BKN Medan	Pengajuan Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada BA Cash Opname.	c. Memerintahkan Kakanreg VI BKN Medan supaya Kepala Subbagian Keuangan pada Kanreg VI BKN Medan tertib dalam menggunakan brankas yang ditempatkan pada unit kerjanya.

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPS	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanjnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
23			Keterlambatan Penyetoran Pajak yang Dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada Kanreg III BKN Bandung Sebesar Rp53.531.877	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama menginstruksikan Kakanreg III BKN Bandung: a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran secara cermat.	<u>Semester I 2023:</u> <u>- Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama</u> <u>- Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung</u> <u>- BA Cash Opname Kanreg III BKN Bandung [belum]</u>	Belum Sesuai	<u>Akhir Semester II 2023:</u> Belum ada BA Cash Opname.	Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama menginstruksikan Kakanreg III BKN Bandung: a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran secara cermat.
24				b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk cermat dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan perbendaharaan.	<u>Semester I 2023:</u> <u>- Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama</u> <u>- Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung</u> <u>- Sample bukti pajak yang disetor tepat waktu, kuitansi tanggal berapa dan setor pajaknya tanggal berapa (maksimal 1 bulan dari kuitansi) [belum]</u>	Belum Sesuai	<u>Akhir Semester II 2023:</u> Belum ada sample bukti pajak yang disetor tepat waktu, kuitansi tgl berapa dan setor pajaknya tanggal berapa (maksimal 1 bulan dari kuitansi).	b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk cermat dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan perbendaharaan.
25			Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar menginstruksikan: a. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Umum segera menyusun POS pengelolaan persediaan yang mengatur secara rinci terkait penggunaan barang pada level satker dan menyosialisasikan kepada pengelola persediaan serta mengelola persediaan sesuai dengan ketentuan.	<u>Semester I 2023:</u> <u>- Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama</u> <u>- Surat Perintah Sesma ke Kepala Biro Umum</u> <u>Semester I 2024:</u> <u>- POS Pengelolaan Persediaan</u>	Pengajuan Sesuai	<u>Akhir Semester II 2023:</u> Belum ada POS	Kepala BKN agar menginstruksikan: a. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Umum segera menyusun POS pengelolaan persediaan yang mengatur secara rinci terkait penggunaan barang pada level satker dan menyosialisasikan kepada pengelola persediaan serta mengelola persediaan sesuai dengan ketentuan.
26				b. Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	<u>Semester I 2023:</u> <u>- Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung</u> <u>- Surat Perintah Sesma ke Kakanreg Bandung</u> <u>Semester I 2024:</u> <u>- Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung ke Pengelola Barang Persediaan</u> <u>- Bukti Diklat yang Diikuti Penanggung Jawab Persediaan Obat [belum]</u>	Belum Sesuai	<u>Akhir Semester II 2023:</u> Belum ada kegiatan diklat kepada penanggung jawab persediaan obat	b. Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.
27				c. Kepala Pusbang ASN, Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Kepala Kanreg IV BKN Makassar melakukan pemantauan secara berkala pengelolaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.	<u>Semester I 2023:</u> <u>- Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, dan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar</u> <u>- Surat Perintah Sesma ke Kepala Pusbangpeg, Kakanreg Bandung dan Makassar (tambahan)</u> <u>- Laporan Stock Opname per Semester di Ttd Kepala Pusbang ASN [belum]</u> <u>- Laporan Stock Opname per Semester di Ttd Kakanreg III BKN Bandung [belum]</u> <u>- Laporan Stock Opname per Semester di Ttd Kakanreg IV BKN Makassar [belum]</u>	Belum Sesuai	<u>Akhir Semester II 2023:</u> Belum ada Laporan Stock Opname per semester dittd oleh Kepala Satker.	c. Kepala Pusbang ASN, Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Kepala Kanreg IV BKN Makassar melakukan pemantauan secara berkala pengelolaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
28			Pengelolaan Aset Tetap pada Tiga Satuan Kerja BKN Belum Tertib	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan kepada: a. Sekretaris Utama BKN untuk memerintahkan: 1) Kepala Biro Umum BKN supaya melakukan pengamanan bangunan dan gedung. 2) Kepala Bagian Barang Milik Negara BKN Pusat menyajikan informasi yang lengkap dalam Laporan BMN BKN Pusat.	<b>Semester I 2023:</b> - <u>Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Umum</u>  - Bukti Melakukan Pengamanan Fisik Bangunan [belum]  - Bukti Melakukan Pelaporan BMN Secara Memadai [belum]	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Belum ada bukti Kabiro Umum sudah melakukan pengamanan fisik bangunan dan pelaporan BMN secara memadai (kondisi barang pada Laporan BMN belum disajikan cek di LHP)	Kepala BKN menginstruksikan kepada: a. Sekretaris Utama BKN untuk memerintahkan: 1) Kepala Biro Umum BKN supaya melakukan pengamanan bangunan dan gedung. 2) Kepala Bagian Barang Milik Negara BKN Pusat menyajikan informasi yang lengkap dalam Laporan BMN BKN Pusat.
29			d. TPKN BKN untuk segera memproses kasus kehilangan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Kanreg VI BKN Medan.	<b>Semester I 2023:</b> - <u>Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama</u>	Belum Sesuai	Belum Sesuai	<b>Akhir Semester II 2023:</b> Terdapat selisih harga senilai 11jt antara harga perolehan aset (17jt) dan harga wajar (6jt). Untuk kerugian negara sudah sesuai namun untuk TL belum sesuai. Pada periode pemantauan berikutnya status akan dijadikan "Tidak Dapat Ditindaklanjuti"	d. TPKN BKN untuk segera memproses kasus kehilangan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Kanreg VI BKN Medan.
30		<b>Semester II 2023:</b> - <u>SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara</u>						
31		- <u>Bukti Penerimaan Negara TGR Medan 820231206179745 senilai Rp.6.000.000.-</u>						

Informasi:

Belum Sesuai 29

Pengajuan Sesuai 2

Belum diTL 0

31

Sisa Setoran: Rp0

Jakarta, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Inspektur

Ditandatangani Secara Elektronik  
Dedi Herdi



# **LAMPIRAN XIV**

## **LAPORAN HASIL REVIU (LHR) PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**LAPORAN HASIL REVIU  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**Nomor : 019/AI.02/LHR/H/2024**  
**Tanggal : 27 Februari 2024**

**INSPEKTORAT  
2024**

## LAPORAN HASIL REVIU

### A. Penugasan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan dilaksanakan penilaian PIPK secara mandiri (*control self-assessment*) oleh manajemen.

Reviu PIPK oleh APIP sebagai pihak eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian PIPK yang dilakukan oleh manajemen sebagai pihak internal bebas dari subjektivitas sehingga hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta dapat meningkatkan objektivitas penilaiannya. Penugasan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Reviu terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah (PIPK) pada Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas nomor: 003/A1.02/TU/H/ 2024 tanggal 8 Januari 2024.

### B. Proses Reviu

Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor APIP yang ditugaskan untuk melakukan reviu PIPK atas Penilaian oleh Tim Penilai, maka entitas akuntansi yang direviu dilakukan secara uji petik dengan penentuan Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebagai akun signifikan yang ditetapkan manajemen, berdasarkan hal tersebut uji petik dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Entitas akuntansi yang memiliki nilai realisasi tertinggi di Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
2. Entitas akuntansi yang pernah/ memiliki temuan pemeriksaan BPK pada akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

3. Entitas akuntansi yang belum pernah dijadikan sampel pada reviu PIPK sebelumnya.

Dari pertimbangan sebagaimana di atas maka untuk tingkat entitas akuntansi yang dilakukan reviu terdiri dari Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I BKN Yogyakarta, dan Kantor Regional III BKN Bandung.

Prosedur reviu dilakukan dengan:

1. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap kertas kerja penilaian dari tim penilai untuk menilai kecukupan identifikasi proses/transaksi utama pelaporan keuangan, kecukupan identifikasi risiko utama, dan melihat apakah seluruh risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama, reviu dokumen juga dilakukan untuk menilai pengujian pengendalian intern tingkat entitas (PITE) yang dilakukan, dan ketepatan pengambilan sampel pengujian atribut pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai.

2. Verifikasi dan Konfirmasi

Verifikasi dilakukan terhadap bukti dukung penilaian PITE, sampel pengujian atribut pengendalian serta dilakukan konfirmasi kepada tim penilai atas bukti – bukti dukung penilaian tersebut.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Tim Penilai untuk menilai identifikasi risiko, pengendalian dan perbaikannya, pengujian PITE, pengujian PUTIK, pengujian atribut pengendalian, pengujian pengendalian aplikasi, penilaian efektivitas implementasi pengendalian serta penilaian kelemahan pengendalian yang telah dilakukan oleh tim penilai.

4. Reperformance

*Reperformance* (reviu ulang suatu pekerjaan) dilakukan untuk pengujian atribut pengendalian untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal.

5. Analisis

Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian atau simpulan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

## C. Hasil Reviu

Berikut ini adalah hasil reviu yang dilakukan oleh APIP atas pelaksanaan penilaian pengendalian atas pelaporan keuangan oleh Tim Penilai di Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di 3 (tiga) satuan kerja yaitu sebagai berikut:

### 1. Penentuan Ruang Lingkup dan Materialitas

Penentuan ruang lingkup dan materialitas untuk tingkat entitas akuntansi telah dilakukan secara wajar yaitu :

- a) Tim Penilai telah ditetapkan untuk di tingkat UAKPA dan UAPA;
- b) Akun signifikan telah ditetapkan dan dituangkan pada Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan dengan diketahui pihak Tim Penilai UAPA dan Manajemen Pemilik Bisnis Proses;
- c) Dalam penentuan akun signifikan telah menggunakan beberapa pertimbangan yaitu salah satunya adanya temuan berulang dari BPK.

Namun, penentuan ruang lingkup dan materialitas yang dilakukan masih terdapat penyimpangan yaitu Anggota tim penilai yang disusun terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha beserta staffnya untuk yang di Kantor Regional serta Staf atau Pejabat Fungsional di Biro Keuangan yang merupakan bagian manajemen pemilik bisnis proses. Hal ini menyebabkan penilaian dapat dilakukan dengan tidak secara wajar dan terjadi *conflict of interest*.

### 2. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Berdasarkan hasil reviu, Tim Penilai telah melakukan pengujian Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi. Namun, Tim penilai melakukan penilaian belum secara wajar sehingga terdapat penyimpangan yang signifikan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- a) Kantor Pusat BKN
  - 1) Terdapat risiko utama pada transaksi utama yang belum diidentifikasi, yaitu:
    - (a) Pada transaksi utama Perencanaan dan Penetapan Anggaran masih terdapat risiko utama yang belum diidentifikasi yaitu terdapat potensi kesalahan penentuan jenis barang yang akan

dilakukan pemeliharaan dan Kesalahan Penentuan spesifikasi barang;

- (b) Pada transaksi utama Serah Terima Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) terdapat risiko utama yang belum diidentifikasi yaitu Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan dengan Kontrak.
- 2) Terdapat pengendalian utama yang belum diuraikan pada risiko utama yaitu:
- (a) Pada proses transaksi utama Penyiapan Berkas Pendukung (RAB, KAK, Nota Dinas, Analisa Riwayat HPS, Referensi Harga) untuk risiko potensi ketidak sesuaian volume dan harga terdapat pengendalian utama yang belum diuraikan seperti melakukan survei harga ke penyedia barang dan jasa atau marketplace;
  - (b) Pada proses transaksi utama Penyiapan Berkas Pendukung (RAB, KAK, Nota Dinas, Analisa Riwayat HPS, Referensi Harga) untuk risiko kesalahan MAK terdapat pengendalian utama yang belum diuraikan seperti melakukan koordinasi atau konsultasi dengan Biro Perencanaan Organisasi, Inspektorat dan DJA Kementerian Keuangan.
- 3) Belum memiliki Bisnis proses atau *flowchart* terkait Akun Signifikan Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin.
- b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta
- 1) Proses transaksi utama belum semua diidentifikasi dan di mitigasi;
  - 2) Risiko utama pada proses transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi dan dimitigasi;
  - 3) Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun tim penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;
  - 4) Belum terdapat *FlowChart/SOP* yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121).

- c) Kantor Regional III BKN Bandung
  - 1) Proses transaksi utama belum semua diidentifikasi dan dimitigasi;
  - 2) Risiko utama pada proses transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi dan dimitigasi;
  - 3) Pengendalian utama belum seluruhnya diuraikan secara jelas dan tepat dalam meminimalisir risiko;
  - 4) Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun tim penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;
  - 5) Belum ada flowchart/SOP yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121).

### **3. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya**

Berdasarkan hasil reviu atas pengujian Identifikasi Risiko dan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi UAKPA di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I BKN Yogyakarta, dan Kantor Regional III BKN Bandung, masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Dimana risiko utama yang dimasukkan ke Tabel A.1 seharusnya pengendalian utama yang dinilai tidak memadai atau pengendalian utama yang tidak teridentifikasi pada Tabel A. Namun, Tim Penilai pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung mencantumkan seluruh pengendalian utama yang memadai pada Tabel A ke Tabel A.1.

### **4. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)**

Berdasarkan hasil reviu atas Pengujian pengendalian intern tingkat entitas untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan yang signifikan. Tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar sesuai dengan penilaian table B1 pada PMK Nomor 17/PMK.02/2019 dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Kantor Pusat BKN
  - 1) Lingkungan pengendalian
    - Tidak terdapat bukti dokumen yang direviu, hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, dokumen profil resiko yang disampaikan bukan merupakan dokumen yang terbaru (Tahun 2023) dan belum terlampir bukti hasil wawancara.

3) Kegiatan Pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Pusat BKN memperoleh nilai 96% yang artinya 96% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 4% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun persentase skor faktor-faktor PITE hasil reviu memperoleh nilai 60% yang artinya 60% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 40% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta

1) Lingkungan pengendalian

Telah terdapat bukti survei namun jumlah responden belum sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bukti reviu dokumen maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Tidak terdapat dokumen mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja.

3) Kegiatan Pengendalian

Telah terdapat bukti survei namun jumlah responden belum sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bukti revidu dokumen maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Telah terdapat bukti survei namun jumlah responden belum sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bukti revidu dokumen maupun observasi.

5) Pemantauan

Telah terdapat bukti survei namun jumlah responden belum sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bukti revidu dokumen maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional I BKN Yogyakarta memperoleh nilai 100%. Namun sesuai hasil revidu berdasarkan bukti dokumen, survei, dan wawancara yang dilampirkan oleh tim penilai, persentase skor faktor-faktor PITE hasil revidu memperoleh nilai 48% yang artinya 48% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 52% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

c) Kantor Regional III BKN Bandung

1) Lingkungan Pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei.

2) Penilaian Risiko

(a) Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei.

(b) Tidak terdapat dokumen mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja.

3) Kegiatan Pengendalian

(a) Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei.

(b) Terdapat bukti dukung yang kurang memadai dalam hal :

- Apakah telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai?

- Apakah unit kerja telah mengatur pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki?
  - (c) Terdapat bukti dukung yang kurang relevan dalam hal “Apakah pimpinan unit kerja telah memperhatikan pemisahan tugas (*segregation of duties*) untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau tindakan yang tidak layak?”
  - (d) Tidak ada bukti dukung terlampir dalam hal “Apakah unit kerja telah memiliki mekanisme otorisasi dan persetujuan (*approval*) atas transaksi dan kejadian penting?”
- 4) Informasi dan Komunikasi
- (a) Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei.
  - (b) Terdapat bukti dukung yang kurang memadai dalam hal:
    - Apakah pegawai sebagai *end user* telah diminta masukan dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi?
    - Apakah unit kerja menindaklanjuti saran dan masukan dari pegawai terkait pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi?
  - (c) Tidak ada bukti dukung terlampir dalam hal “Apakah data yang penting dalam sistem informasi di-*backup* secara rutin?”
- 5) Pemantauan
- Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian yang terlampir

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional III BKN Bandung memperoleh nilai 94% yang artinya 94% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 6% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun, sesuai hasil revidasi berdasarkan bukti dokumen, survei, dan wawancara yang dilampirkan oleh tim penilai, persentase skor faktor-faktor PITE hasil revidasi memperoleh nilai 50% yang artinya 50% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 50% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

## **5. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikas (PUTIK)**

Berdasarkan hasil reuiu atas Pengujian PUTIK untuk tingkat entitas akuntansi di Satker Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I BKN Yogyakarta, dan Kantor Regional III BKN, Tim penilai telah menguji PUTIK. Namun, Tim Penilaian membuat penilaian belum secara wajar, dengan kondisi sebagai berikut :

- a) Pengujian yang dilakukan belum sesuai Area akses logical dan Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan pada PMK Nomor 17/PMK.02/2019.
- b) Pengujian PUTIK tidak didukung dengan dokumen dan hasil wawancara yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, maka belum cukup untuk memenuhi pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penilai.

## **6. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)**

Berdasarkan hasil reuiu atas Pengujian atribut pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi UAKPA di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung, diketahui terdapat beberapa kondisi yang berbeda pada Satuan Kerja tersebut. Adapun kondisi hasil reuiu atas pengujian tersebut sebagai berikut:

### **a) Kantor Pusat BKN**

Tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian secara wajar dengan kondisi, yaitu:

- 1) Pengujian atribut pengendalian telah dilakukan untuk seluruh pengendalian manual pada Tabel A dan A1;
- 2) Pengujian pengendalian telah didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai;
- 3) Pengujian Atribut Pengendalian sudah didukung dengan perhitungan sampel yang mencukupi, yaitu dengan metode sensus.

b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi, yaitu :

- 1) Terdapat pengujian pengendalian yang diuraikan pada Tabel C.1 tidak sesuai dengan uraian pada Tabel A dan A.1;
- 2) Terdapat pengujian pengendalian yang tidak didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai;
- 3) Pengujian Atribut Pengendalian tidak didukung dengan perhitungan sampel yang mencukupi.

c) Kantor Regional III BKN Bandung

Tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi, yaitu :

- 1) Pengujian pengendalian yang diuraikan pada Tabel C.1 tidak sesuai dengan uraian pada Tabel A dan A.1;
- 2) Pengujian pengendalian tidak didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai;
- 3) Pengujian Atribut Pengendalian tidak didukung dengan perhitungan sampel yang mencukupi.

## **7. Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2)**

Berdasarkan hasil revidu atas Pengujian Pengendalian Aplikasi untuk tingkat entitas akuntansi UAKPA Kantor Pusat BKN, Kanreg I BKN Yogyakarta, dan Kantor Regional III BKN Bandung, diketahui terdapat kondisi yang berbeda pada satuan kerja tersebut. Adapun rincian kondisi tersebut sebagai berikut

a) Kantor Pusat BKN

Tim Penilai tidak melakukan pengujian pengendalian aplikasi karena pemilik risiko tidak mempunyai pengendalian aplikasi di setiap risiko utama pada akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang dituangkan pada table A. Dalam hal ini tim penilai telah melakukan penilaian secara wajar dan tanpa penyimpangan.

b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Tim penilai telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta belum secara wajar. Hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk pengendalian akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) bukan merupakan aplikasi yang dibangun oleh BKN, sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada tabel C.2.

c) Kantor Regional III BKN Bandung

Tim penilai telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Regional III Bandung belum secara wajar. Hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk pengendalian akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) bukan merupakan aplikasi yang dibangun oleh BKN. Selain itu, berdasarkan Tabel A dan Tabel A.1, tidak terdapat pengendalian utama dengan tipe aplikasi, sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada tabel C.2.

## **8. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan**

Berdasarkan hasil revidi atas Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi UAKPA Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung, Tim Penilai telah melaksanakan penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

a) Kantor Pusat BKN

Pengendalian Utama yang dituangkan pada Tabel C.1 tidak seluruhnya dipindahkan pada Tabel D.

b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta

1) Pengendalian Utama berupa Pelaporan Inventaris BMN Peralatan dan Mesin disimpulkan efektif namun terdapat usulan koreksi berupa Laporan Kerusakan BMN PM dapat didukung dengan aplikasi internal untuk pengelolaan BMN yang lebih handal;

- 2) Pengendalian Utama berupa Perhitungan Biaya dalam Rencana Kertas Kerja Satker (RKAKL) disimpulkan efektif namun terdapat usulan koreksi berupa rekapitulasi daftar BMN PM yang disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan urgensi kebutuhan organisasi dan nilai manfaat/ cost and benefit analysis (apabila nilai manfaat ekonomis lebih kecil dari biaya pemeliharaannya dapat dijadikan pertimbangan untuk pengadaan BMN PM yang baru);
  - 3) Pengendalian utama berupa Inventaris BMN Peralatan dan Mesin disimpulkan efektif namun terdapat usulan koreksi berupa Updating Kondisi BMN PMN Secara berkala (untuk mendapatkan kelompok BMN PM yang rusak berat / usang dapat segera proses penghapusan).
- c) Kantor Regional III BKN Bandung
- 1) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada Tabel B.1 terkait pertanyaan “Apakah terdapat prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan?” “Kelemahan signifikan”, dan dituangkan pada tabel D “efektif”;
  - 2) Pengujian pada Tabel B.1 terkait pertanyaan “Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?” dan “Apakah telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai?” “Kelemahan signifikan”, dituangkan pada Tabel D “tidak efektif”, sehingga terdapat usulan koreksi namun tindak lanjutnya tidak diketahui sudah tuntas atau belum;
  - 3) Pengendalian utama yang dituangkan pada Tabel C.1 tidak seluruhnya dipindahkan pada Tabel D.

## **9. Penilaian Kelemahan Gabungan**

Berdasarkan hasil revidu atas penilaian kelemahan gabungan, Tim Penilaian UAPA telah melaksanakan penilaian kelemahan gabungan belum secara wajar dikarenakan terdapat kondisi sebagai berikut :

- a) Kriteria risiko utama yang memiliki kelemahan pengendalian utama pada tabel D di setiap Satuan Kerja tidak seluruhnya dituangkan pada tabel E, yaitu Di Satker Kantor Pusat, pada table D terdapat uraian kelemahan “Penyusunan Baseline ( verifikasi langsung terkait realisasi tahun lalu. Analisi ToR dan Rab, Perhitungan kebutuhan sesuai SBM, Validasi RKBMN, Cek Fisik) pada Perencanaan dan Penetapan Anggaran” dengan hasil penilaian “kelemahan tidak signifikan”. Namun, tidak dituangkan pada table E oleh Tim Penilai UAPA.
- b) Tim Penilai UAPA melakukan penilaian kelemahan gabungan hanya melakukan rekapitulasi data saja tanpa melakukan pengujian atas hasil penilaian kelemahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja/UAKPA. Hal ini dibuktikan bahwa dari hasil penilaian Tabel D yang disusun oleh Satuan Kerja masih terdapat penilaian yang belum sesuai dengan ketentuan. Namun, Tim Penilai UAPA hanya memasukkan data yang ada di tabel D saja tanpa melihat ke Tabel B1, C1 maupun C2 yang Satker susun

Dari kondisi tersebut, hasil penilaian kelemahan pengendalian gabungan yang dilakukan oleh Tim Penilai UAPA belum cukup diyakini.

#### **D. REKOMENDASI**

Saran perbaikan yang dapat diberikan oleh Tim Reviu untuk meningkatkan kualitas penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan di satuan kerja, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penentuan Ruang Lingkup dan Materialitas**

Atas hasil reviu pada penentuan ruang lingkup dan materialitas, Tim reviu **merekomendasikan** agar:

- a) Dalam penetapan Tim Penilai agar Tim diambil dari luar manajemen pemilik bisnis proses untuk menghindari terjadinya Conflict of Interest;
- b) Dalam penentuan akun signifikan agar manajemen dan tim penilai mempertimbangkan akun signifikan yang memungkinkan salah saji yang material dan akun yang sering terjadi Temuan Berulang, seperti akun Belanja Ekstrakomtable, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan.

## 2. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian

Atas hasil reviu pada pengujian identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung:

- a) Melakukan konfirmasi lebih mendalam kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan terkait dengan akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121);
- b) Melakukan pengujian atas identifikasi risiko utama dan rancangan pengendalian dengan tepat sesuai bisnis proses yang dilakukan pemilik pengendalian dan mempertimbangkan sebab dari risiko itu muncul;
- c) Membuat usulan koreksi pengendalian utama yang pengendaliannya dinilai tidak memadai pada Tabel A;
- d) Berkoordinasi dengan pemilik pengendalian untuk menyusun flowchart/SOP yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121).

## 3. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Atas hasil reviu pada perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung memberikan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya yang dinilai tidak memadai dan dituangkan pada Tabel A1.

## 4. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)

Atas hasil reviu pada Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung melakukan pengujian dan Penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan seperti bukti reviu dokumen, wawancara, survei maupun observasi. Selain itu, untuk jumlah responden pada saat pelaksanaan survei juga harus sesuai dengan ketentuan.

## 5. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikas (PUTIK)

Atas hasil reviu pada Pengujian PUTIK, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung melaksanakan pengujian pada dua area berdasarkan PMK No. 17/PMK.09/2019 dengan didukung dokumen dan hasil wawancara yang memadai. Adapun dua area yang dimaksud pada ketentuan tersebut, yaitu:

### a) Area Akses Logical :

- 1) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- 2) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;
- 3) Matrik akses pengguna (user access matrix /UAM) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- 4) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- 5) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- 6) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif.
- 7) Kata sandi default untuk akun-akun default di database, server dan aplikasi telah diubah;
- 8) Penetration testing/ vulnerability assessment dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui;
- 9) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

## **b) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan**

- 1) Implementasi prosedur *backup* dan *restore* secara konsisten;
- 2) Service Level Agreement (SLA) atau Operational Level Agreement (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- 3) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- 4) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa helpdesk, dll.);
- 5) Gangguan atau insiden operational TI diidentifikasi, ditangani, direviu, dan dianalisa dengan tepat waktu;
- 6) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data *center* dan fasilitas pemrosesan lainnya.

Selain itu, tim reviu merekomendasikan apabila terdapat pengendalian yang dimodifikasi, agar melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh tim penilai.

## **6. Pengujian Atribut Pengendalian**

Atas hasil reviu pada Pengujian Atribut Pengendalian, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK 17/PMK.09/2019, yaitu dalam hal metode pengujian atribut pengendalian menggunakan sensus atau sampling tergantung dari jumlah populasi yang diuji.

## **7. Pengujian Pengendalian Aplikasi**

Atas hasil reviu pada Pengujian Pengendalian Aplikasi, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung melaksanakan pengujian pengendalian aplikasi sesuai dengan ketentuan pada PMK No. 17/PMK.09/2019.

## 8. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan

Atas hasil reviu pada Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan, Tim reviu **merekomendasikan** agar Tim Penilai UAKPA Kantor Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional III BKN Bandung:

- a) melakukan pengujian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai.
- b) melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.02/2019.

## 9. Penilaian Kelemahan Gabungan

Atas hasil reviu pada Penilaian Kelemahan Gabungan, Tim reviu merekomendasikan agar Tim Penilai UAPA:

- a) Melakukan penilaian kelemahan gabungan dengan melakukan pengujian dan pengecekan pada tabel D untuk setiap Satker, tidak hanya sebatas melakukan rekapitulasi data.
- b) Melakukan penilaian kelemahan gabungan dengan teliti sesuai kriteria kelemahan yang dituangkan Satuan Kerja pada Tabel D.

## E. Tindak Lanjut

Terhadap Rekomendasi Reviu yang diberikan, Tim Penilai akan menindaklanjuti pada Penilaian PIPK di tahun berikutnya.

## F. Simpulan

Setelah mempertimbangkan hasil reviu dan penyajian pelaporan keuangan pada akun signifikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Entitas Badan Kepegawaian Negara adalah Pengendalian Intern efektif dengan pengecualian (PIEDP).

Jakarta, 27 Februari 2024  
Inspektur



**LAPORAN HASIL PENILAIAN**  
**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Badan Kepegawaian Negara. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif** / ~~efektif dengan pengecualian/ mengandung kelemahan material\*~~).

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai** / ~~tidak memadai\*\*~~).

Jakarta, 29 Januari 2024  
Ketua Tim Penilai PIPK UAPA BKN T.A. 2023

 Ditandatangani Secara Elektronik  
PUTRI HARTATI, SE, M.Si



*\*) Pilih salah satu*

*\*\*\*) Pilih salah satu, dengan ketentuan: memadai bila PIPK efektif atau efektif dengan pengecualian; dan tidak memadai bila PIPK mengandung kelemahan material.*

Lampiran I  
Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Akun Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
<b>A.</b>	<b>Kelemahan Material</b>			
	-			
<b>B.</b>	<b>Kelemahan Signifikan</b>			
	-			
<b>C.</b>	<b>Kelemahan yang Berdampak Rendah</b>			
<b>Kantor Pusat BKN</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional I BKN Yogyakarta</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional II BKN Surabaya</b>				
	<b>Uraian</b>	<b>Sebab</b>	<b>Akibat</b>	<b>Rekomendasi</b>
1.	Belum dilakukan Inventarisasi BMN berupa Peralatan dan Mesin	Penyebabnya adalah belum dilakukan pemutakhiran data terhadap kondisi Peralatan dan Mesin yang dicatat dalam aplikasi SAKTI	Akibatnya adalah perencanaan atas pemeliharaan dan perbaikan atas Peralatan dan Mesin yang rusak tidak tepat	Direkomendasikan Pengelola BMN melakukan sampling sensus kondisi Peralatan dan Mesin minimal 1 bulan sekali
<b>Kantor Regional III BKN Bandung</b>				
	<b>Uraian</b>	<b>Sebab</b>	<b>Akibat</b>	<b>Rekomendasi</b>
1.	Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	Masih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh 1 orang	Hasil pekerjaan menjadi tidak optimal	Melakukan usulan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung
2.	Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang	Beberapa pegawai memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya	Target rencana kerja tidak tercapai maksimal	Pelaksanaan diklat teknis untuk

	dicapai setiap pegawai tidak efektif.			peningkatan kinerja pegawai.
<b>Kantor Regional IV BKN Makassar</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional V BKN DKI Jakarta</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional VI BKN Medan</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional VII BKN Palembang</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional IX BKN Jayapura</b>				
	<b>Uraian</b>	<b>Sebab</b>	<b>Akibat</b>	<b>Rekomendasi</b>
1.	Belum dilakukan Inventarisasi BMN berupa Peralatan dan Mesin	Penyebabnya adalah belum dilakukan pemutakhiran data terhadap kondisi Peralatan dan Mesin yang dicatat dalam aplikasi SAKTI	Akibatnya adalah perencanaan atas pemeliharaan dan perbaikan atas Peralatan dan Mesin yang rusak tidak tepat	Direkomendasikan Pengelola BMN melakukan sampling sensus kondisi Peralatan dan Mesin minimal 1 bulan sekali
<b>Kantor Regional X BKN Denpasar</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional XI BKN Manado</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional XII BKN Pekanbaru</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				
<b>Kantor Regional XIV BKN Manokwari</b>				
- Kelemahan tidak dapat terdeteksi dari Laporan hasil penilaian, karena ada elemen Laporan yang tidak lengkap				
<b>Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN</b>				
- Tidak Ada Kelemahan pada Laporan Hasil Penilaian				

Tabel E. Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama Entitas Akuntansi/Laporan : UAPA Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia  
 Akun Signifikan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Uraian Kelemahan	Pusat	Kanreg I	Kanreg II	Kanreg III	Kanreg IV	Kanreg V	Kanreg VI	Kanreg VII	Kanreg VIII	Kanreg IX	Kanreg X	Kanreg XI	Kanreg XII	Kanreg XIII	Pusbang ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
		Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Makassar	DKI Jakarta	Medan	Palembang	Banjarnegara	Jayapura	Denpasar	Manado	Pekabaru	Banda Aceh					
Inventarisasi BMN Peralatan dan Mesin tidak efektif	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai tidak efektif	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1

\* Keterangan

Sesuai dengan perhitungan kertas kerja penyesuaian

\*\*Total Salah Saji Teridentifikasi

\*\*\*Simpulan PPK Gabungan

**Pengendalian Internal Memadai**

**LAMPIRAN XV**

**NOTA KESEPAKATAN FINAL**

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL  
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088) TAHUN 2023  
YANG DIMASUKKAN DALAM  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023 (AUDITED)**

Nomor : NKF-050/088/PB.6/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara *Online* untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2023, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2023 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2023 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Badan Kepegawaian Negara (BA 088) menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) paling lambat tanggal 13 Mei 2024.

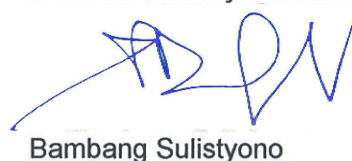
PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Badan Kepegawaian Negara



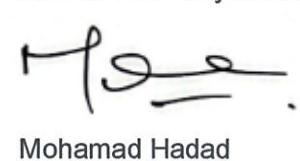
Putri Hartati

Kementerian Keuangan RI,  
Ditjen Kekayaan Negara  
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,  
Ditjen Perbendaharaan  
Selaku Tim Penyusun LKPP



Mohamad Hadad

MENGETAHUI  
Tim Auditor BPK



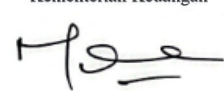

Adila Amri Pratama

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Kepegawaian Negara  
BA : 088

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	26,260,135,552	2,881,983	2,881,983	26,260,135,552
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNPB Lainnya	26,260,135,552	2,881,983	2,881,983	26,260,135,552
Pendapatan Hibah	-			-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>26,260,135,552</b>	<b>2,881,983</b>	<b>2,881,983</b>	<b>26,260,135,552</b>
Belanja Pegawai	346,866,997,060		-	346,866,997,060
Belanja Barang dan Jasa	578,789,169,324			578,789,169,324
Belanja Modal	103,021,142,225			103,021,142,225
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,028,677,308,609</b>	-	-	<b>1,028,677,308,609</b>
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			-
Insentif Fiskal	-			-
<b>TOTAL TKD</b>	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-

Jakarta, Mei 2024  
Badan Kepegawaian Negara  
  
Putri Hartati  
Ditjen Kekayaan Negara  
  
Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan  
  
Mohamad Hadad  
Badan Pemeriksa Keuangan  
  
Adila Amri Pratama

LAPORAN OPERASIONAL  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Kepegawaian Negara  
 BA : 088

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,546,731,744		124,136,577	23,670,868,321
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>23,546,731,744</b>	-	<b>124,136,577</b>	<b>23,670,868,321</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah	-			-
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>23,546,731,744</b>	-	<b>124,136,577</b>	<b>23,670,868,321</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	345,432,805,221		310,632,835	345,122,172,386
Beban Persediaan	7,965,602,101	5,513,850	17,131,850	7,953,984,101
Beban Barang dan Jasa	437,059,002,579	400	94,285,793	436,964,717,186
Beban Pemeliharaan	27,851,882,982	1,927,440	12,070,634	27,841,739,788
Beban Perjalanan Dinas	106,212,869,311		2,158,053,206	104,054,816,105
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-			-
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78,338,662,413	11,089,320	289,232,545	78,060,519,188
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(33,755)	13,736,966		13,703,211
Beban Lain-lain	-			-
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>1,002,860,790,852</b>	<b>32,267,976</b>	<b>2,881,406,863</b>	<b>1,000,011,651,965</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(979,314,059,108)</b>	<b>(32,267,976)</b>	<b>(2,757,270,286)</b>	<b>(976,340,783,644)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	568,247,120			568,247,120
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21,040,442			21,040,442
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>547,206,678</b>	-	-	<b>547,206,678</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,919,916,501	695,351,883	2,881,983	1,227,446,601
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	403,354,363	135,456,000		538,810,363
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1,516,562,138</b>	<b>559,895,883</b>	<b>2,881,983</b>	<b>688,636,238</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>2,063,768,816</b>	<b>559,895,883</b>	<b>2,881,983</b>	<b>1,235,842,916</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa	-			-
Beban Luar Biasa	-			-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>(977,250,290,292)</b>	<b>527,627,907</b>	<b>(2,754,388,303)</b>	<b>(975,104,940,728)</b>

Jakarta, Mei 2024  
 Badan Kepegawaian Negara  
  
 Ratri Hartati  
 Ditjen Kekayaan Negara  
  
 Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan  
  
 Mohamad Hadad  
 Badan Pemeriksa Keuangan  
  
 Adila Amri Pratama

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Kepegawaian Negara  
BA : 088

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	3,173,325,597,443			3,173,325,597,443
SURPLUS/DEFISIT LO	(977,250,290,292)	527,627,907	(2,754,388,303)	(975,104,940,728)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS</b>				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Penyesuaian SILPA	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(4,131,426,522)	31,411,826,282	31,333,626,143	(4,209,626,661)
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	-			-
Koreksi atas Transaksi BMN Lainnya	-			-
Koreksi Lain-lain	29,030,277		692,469,900	721,500,177
<b>JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>(4,102,396,245)</b>	<b>31,411,826,282</b>	<b>32,026,096,043</b>	<b>(3,488,126,484)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,013,817,336,126			1,013,817,336,126
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	32,464,649,589	31,939,454,189	29,271,707,740	35,224,268,914
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3,205,790,247,032</b>	<b>31,939,454,189</b>	<b>29,271,707,740</b>	<b>3,208,549,866,357</b>

Jakarta, Mei 2024  
Badan Kepegawaian Negara  
  
Puuri Hartati

Ditjen Kekayaan Negara



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan



Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan



Adila Amri Pratama

**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**K/L : Badan Kepegawaian Negara**  
**BA : 088**

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	351,500	4,236,316		4,587,816
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	131,199,742			131,199,742
Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> )	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Perpajakan	-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	2,747,393,181		2,747,393,181
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-		13,736,966	(13,736,966)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	2,747,393,181	13,736,966	2,733,656,215
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	7,225,612,100	23,460,350	142,897,290	7,106,175,160
Persediaan yang Belum Diregister	-			-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>7,357,163,342</b>	<b>2,775,089,847</b>	<b>156,634,256</b>	<b>9,975,618,933</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,330,666,524,668			2,330,666,524,668
Peralatan dan Mesin	716,795,282,746		12,397,246,854	704,398,035,892
Gedung dan Bangunan	868,344,242,166	554,466,000	49,359,196	868,849,348,970
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24,716,999,940			24,716,999,940
Aset Tetap Lainnya	15,276,714,527		1,401,727,428	13,874,987,099
Konstruksi Dalam Pengerjaan	168,877,064			168,877,064
Aset Konsesi Jasa	-			-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(573,405,261,973)	12,392,581,743		(561,012,680,230)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(165,689,393,329)	833,216	33,267,960	(165,721,828,073)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(18,945,134,998)			(18,945,134,998)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,682,080,058)	1,079,120,929		(602,959,129)
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-			-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3,196,246,770,753</b>	<b>14,027,001,888</b>	<b>13,881,601,438</b>	<b>3,196,392,171,203</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>				
Properti Investasi	-			-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			-
<b>Jumlah Properti Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>	-	-	-	-
<b>ASET LAINNYA</b>				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	128,315,944,862		2,574,625,375	125,741,319,487
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-			-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	21,071,862,270			21,071,862,270
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	6,396,095,038	14,966,688,789		21,362,783,827
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ketiga	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(3,105,898,626)		12,392,063,414	(15,497,962,040)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(126,784,686,742)	2,574,625,375		(124,210,061,367)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(2,985,917,750)		2,574,625,375	(5,560,543,125)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>22,907,399,052</b>	<b>17,541,314,164</b>	<b>17,541,314,164</b>	<b>22,907,399,052</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,226,511,333,147</b>	<b>34,343,405,899</b>	<b>31,579,549,858</b>	<b>3,229,275,189,188</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,629,557,817		400	19,629,558,217
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,091,528,298			1,091,528,298
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KPPN	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-		4,236,316	4,236,316
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>20,721,086,115</b>	<b>-</b>	<b>4,236,716</b>	<b>20,725,322,831</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Kewajiban Konsesi Jasa	-			-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20,721,086,115</b>	<b>-</b>	<b>4,236,716</b>	<b>20,725,322,831</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>3,205,790,247,032</b>	<b>31,939,454,189</b>	<b>29,271,707,740</b>	<b>3,208,549,866,357</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3,226,511,333,147</b>	<b>31,939,454,189</b>	<b>29,275,944,456</b>	<b>3,229,275,189,188</b>



Ditjen Kekayaan Negara

Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan

Mohamad Hadad

Badan Pemeriksa Keuangan

Adila Amri Pratama

**Usulan Jurnal Koreksi**  
**Laporan Keuangan BKN TA 2023**

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian	
1	017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	115212	Piutang Lainnya	465,600.00		Piutang atas kelebihan pembayaran gaji pokok (SPM 002 dan SPM 00060) yang sudah disetor di TA 2024	
			511111	Beban Gaji Pokok PNS		465,600.00		
			115212	Piutang Lainnya	602,400.00		Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan istri karena meninggal dunia (SPM 002 dan SPM 00060) yang sudah disetor di TA 2024	
			511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS		602,400.00		
			115212	Piutang Lainnya	545,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional umum (SPM 002 dan SPM 00060) yang sudah disetor di TA 2024	
			511151	Beban Tunjangan Umum PNS		545,000.00		
			115212	Piutang Lainnya	6,438,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional umum (SPM 002 dan SPM 00060) yang sudah disetor di TA 2024	
			511124	Beban Tunj. Fungsional PNS		6,438,000.00		
			115212	Piutang Lainnya	17,928,721.00		Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2023 yang sudah disetor di TA 2024	
			512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		17,928,721.00		
			115212	Piutang Lainnya	244,475,700.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024	
			511129	Beban Uang Makan PNS		244,475,700.00		
			115212	Piutang Lainnya	4,021,300.00		Piutang atas pengembalian belanja gaji pokok bulan Agustus 2023 karena diberhentikan yang sudah dikembalikan di TA 2024	
			511111	Beban Gaji Pokok PNS		4,021,300.00		
			115212	Piutang Lainnya	19,080,749.00		Piutang atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Tahun 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024	
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		19,080,749.00		
			115212	Piutang Lainnya	4,275,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran belanja honorarium tim kegiatan yang sudah dikembalikan di TA 2024	
			521213	Beban Honor Output Kegiatan		4,275,000.00		
			115212	Piutang Lainnya	124,136,577.00		Piutang atas denda penyelesaian pekerjaan jasa dukungan sarpras seleksi CASN yang sudah dikembalikan di TA 2024	
			425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			124,136,577.00	
			115212	Piutang Lainnya	11,504,339.00		Piutang atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan Raised Floor dan Instalasi yang sudah disetor di TA 2024	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			11,504,339.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		11,504,339.00		
			133111	Gedung dan Bangunan			11,504,339.00	
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		244,774.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			244,774.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		2,167,367.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya			2,167,367.00	
			593111	Beban Persediaan konsumsi		5,513,850.00		Koreksi pencatatan atas nilai <i>Stock Opname</i> barang persediaan di Gudang
			117111	Barang Konsumsi			5,513,850.00	
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan		6,328,500.00		
			593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			6,328,500.00	
			593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		1,927,440.00		

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian	
	017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	117113	Bahan untuk Pemeliharaan		1,927,440.00	Koreksi pencatatan atas nilai <i>Stock Opname</i> barang persediaan di Gudang	
			117111	Barang Konsumsi	572,500.00			
			593111	Beban Persediaan konsumsi			572,500.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12,308,357,764.00			Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain
			132111	Peralatan dan Mesin			12,308,357,764.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	12,308,357,764.00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			12,308,357,764.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12,308,357,764.00			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			12,308,357,764.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12,308,357,764.00			
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan			12,308,357,764.00	
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2,574,625,375.00			Koreksi pencatatan aset tak berwujud dengan kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain
			162151	Software			2,574,625,375.00	
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	2,574,625,375.00			
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi			2,574,625,375.00	
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2,574,625,375.00			
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi			2,574,625,375.00	
			391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2,574,625,375.00			
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan			2,574,625,375.00	
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	143,642,200.00			Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024
391119	Koreksi Lainnya			143,642,200.00				
2	017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	115212	Piutang Lainnya	1,368,040.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024	
			511129	Beban Uang Makan PNS		1,368,040.00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	6,840.00			Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		6,840.00		
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	143,281,000.00			Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024
			391119	Koreksi Lainnya			143,281,000.00	
3	450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	115212	Piutang Lainnya	2,600,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Tahun 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024	
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		2,600,000.00		
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	13,000.00			Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		13,000.00		
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	77,760,000.00			Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024
			391119	Koreksi Lainnya			77,760,000.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
4	560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	115212	Piutang Lainnya	2,523,150.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Mei-Juli 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511129	Beban Uang Makan PNS		2,523,150.00	
			115212	Piutang Lainnya	2,580,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan anak pegawai yang sudah meninggal Tahun 2023 dan baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511122	Beban Tunj. Anak PNS		2,580,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,847,579,731.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1,847,579,731.00	
			115212	Piutang Lainnya	36,067,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalain dalam kota yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		36,067,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	110,877,561.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas fullboard Rakor Palu dan disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		110,877,561.00	
			115212	Piutang Lainnya	31,061,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran honor petugas CAT dan disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			521213	Beban Honor Output Kegiatan		31,061,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,030,400.00		Piutang atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1,030,400.00	
			115212	Piutang Lainnya	2,365,993.00		Piutang atas kelebihan pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran dan disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			521111	Beban Keperluan Perkantoran		2,365,993.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	10,170,424.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		10,170,424.00	
			111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,236,316.00		Utang pajak yang baru disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2024
			219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor		4,236,316.00	
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	25,920,000.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024
			391119	Koreksi Lainnya		25,920,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,401,727,428.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap Renovasi (NUP 5, 6, 9) atas ATR Gedung UPT Donggala yang dikapitalisasi ke nilai Gedung dan Bangunan karena sudah dihibahkan ke BKN
			135111	Aset Tetap Renovasi		1,401,727,428.00	
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	791,239,929.00		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		791,239,929.00	
			137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	287,881,000.00		Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
			591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		287,881,000.00	
			133111	Gedung dan Bangunan	554,466,000.00		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		554,466,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22,178,640.00		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		22,178,640.00	
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11,089,320.00		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		11,089,320.00				

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian			
5	606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	115212	Piutang Lainnya	1,455,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024			
			511129	Beban Uang Makan PNS		1,455,000.00				
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	7,275.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di Tahun 2024			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		7,275.00				
6	606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	115212	Piutang Lainnya	1,191,200.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024			
			511129	Beban Uang Makan PNS		1,191,200.00				
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	5,956.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di Tahun 2024			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		5,956.00				
			522111	Beban Langganan Listrik	400.00		Koreksi atas kesalahan penginputan nilai akrual listrik pada LK Unaudited yang terinput sebesar Rp52.822.248 seharusnya Rp52.822.648 (48.988.755+3.833.893)			
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		400.00				
7	622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	115212	Piutang Lainnya	12,566,900.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024			
			511129	Beban Uang Makan PNS		12,566,900.00				
			115212	Piutang Lainnya	1,130,000.00		Piutang atas kelebihan tunjangan fungsional yang baru disetor Tahun 2024 (Potongan SPM No 7 TA 2024)			
			511124	Beban Tunj. Fungsional PNS		1,130,000.00				
			115212	Piutang Lainnya	355,000.00		Piutang atas kelebihan tunjangan jabatan struktural yang baru disetor Tahun 2024 (Potongan SPM No 7 TA 2024)			
			511123	Beban Tunj. Struktural PNS		355,000.00				
			115212	Piutang Lainnya	17,513,986.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai yang baru disetor Tahun 2024			
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		17,513,986.00				
			115212	Piutang Lainnya	13,884,755.00		Piutang atas kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang kerja yang baru disetor Tahun 2024			
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		13,884,755.00				
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	13,884,755.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan			
			133111	Gedung dan Bangunan		13,884,755.00				
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	231,413.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan			
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		231,413.00				
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	227,253.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024			
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		227,253.00				
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	193,865,900.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024			
			391119	Koreksi Lainnya		193,865,900.00				
			8	622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	115212	Piutang Lainnya	3,330,000.00		Piutang atas kelebihan umum yang baru disetor Tahun 2024 (Potongan SPM No 5 TA 2024)
						511151	Beban Tunjangan Umum PNS		3,330,000.00	
115212	Piutang Lainnya	1,524.00								
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					1,524.00	Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai yang baru disetor Tahun 2024			
115212	Piutang Lainnya	91,147,452.00								
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa					91,147,452.00				

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
	622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	115212	Piutang Lainnya	2,213,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan CASN yang baru disetor Tahun 2024
			521213	Beban Honor Output Kegiatan		2,213,000.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	483,460.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		483,460.00	
9	667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	115212	Piutang Lainnya	30,799,200.00		Piutang atas kelebihan pembayaran 2 paket pekerjaan sewa sarpras CPPP dan CASN yang disetor di TA 2024
			522141	Beban Sewa		30,799,200.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	153,996.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		153,996.00	
			117111	Barang Konsumsi	16,559,350.00		Koreksi pencatatan atas nilai <i>Stock Opname</i> barang persediaan di Gudang
			593111	Beban Persediaan konsumsi		16,559,350.00	
10	667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	115212	Piutang Lainnya	25,194,262.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai TA 2023 yang disetor di TA 2024
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		25,194,262.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	125,971.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		125,971.00	
			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2,881,983.00		Koreksi pencatatan atas kesalahan penggunaan akun atas pengembalian belanja modal TAYL seharusnya pengembalian belanja barang TAYL sesuai Nota Perbaikan transaksi penerimaan negara nomor 149/12/2023
			425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		2,881,983.00	
11	667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	115212	Piutang Lainnya	1,681,500.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511129	Beban Uang Makan PNS		1,681,500.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	8,408.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		8,408.00	
12	667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	115212	Piutang Lainnya	7,113,600.00		Piutang atas kelebihan pembayaran pengadaan sewa tenda CASN Tahun 2023 yang disetor TA 2024
			522141	Beban Sewa		7,113,600.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	68,218.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		68,218.00	
			115212	Piutang Lainnya	6,530,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran pembelian belanja bahan ATK dan Bahan Komputer CASN Tahun 2023
			521211	Beban Bahan		6,530,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	83,705,650.00		Koreksi pencatatan aset dengan kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain
			132111	Peralatan dan Mesin		83,705,650.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	83,705,650.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		83,705,650.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	83,705,650.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		83,705,650.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	83,705,650.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		83,705,650.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
	667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	135,456,000.00		Koreksi pencatatan atas persediaan usang
			117111	Barang Konsumsi		135,456,000.00	
			425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	108,000,800.00		Koreksi pencatatan atas penyesuaian pengembalian belanja atas koreksi beban kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 yang disetor ke kas Negara Tahun 2024
			391119	Koreksi Lainnya		108,000,800.00	
13	667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	115212	Piutang Lainnya	3,828,350.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511129	Beban Uang Makan PNS		3,828,350.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,600,000.00		Piutang atas kelebihan tunjangan fungsional atas nama yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511124	Beban Tunj. Fungsional PNS		1,600,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,260,000.00		Piutang atas kelebihan tunjangan jabatan struktural yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511123	Beban Tunj. Struktural PNS		1,260,000.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	33,442.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		33,442.00	
14	020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	115212	Piutang Lainnya	1,285,450.00		Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			511129	Beban Uang Makan PNS		1,285,450.00	
			115212	Piutang Lainnya	7,992,465.00		Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai TA 2023 yang disetor di TA 2024
			524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		7,992,465.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,530,000.00		Piutang atas kelebihan pembayaran honor narasumber yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			522151	Beban Jasa Profesi		1,530,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	806,598.00		Piutang atas kelebihan pembelian BBM yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		806,598.00	
			115212	Piutang Lainnya	8,398,000.00		Piutang atas kelebihan pembelian penambah daya tahan tubuh yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		8,398,000.00	
			115212	Piutang Lainnya	3,905,136.00		Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan ruang makan yang baru disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		3,905,136.00	
			115212	Piutang Lainnya	11,732,834.00		Piutang atas kekurangan volume pekerjaan pembuatan kanopi parkir yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		11,732,834.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11,732,834.00		
			133111	Gedung dan Bangunan		11,732,834.00	
			115212	Piutang Lainnya	12,237,268.00		Piutang atas kekurangan volume pekerjaan pembuatan kanopi masjid yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		12,237,268.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12,237,268.00		
			133111	Gedung dan Bangunan		12,237,268.00	
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		357,029.00	Koreksi penyusutan atas penyesuaian nilai aset tetap gedung dan bangunan			
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	357,029.00					

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
	020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	115212	Piutang Lainnya	5,183,440.00		Piutang atas kelebihan pembayaran biaya pengiriman atas pengadaan mcubculair yang disetor Tahun 2024
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		5,183,440.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,183,440.00		
			132111	Peralatan dan Mesin		5,183,440.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	518,329.00		Koreksi penyusutan atas penyesuaian nilai aset tetap peralatan dan mesin
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		518,329.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	265,356.00		Penyisihan atas pengakuan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja TA 2023 yang disetor di TA 2024
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		265,356.00	







Badan Pemeriksa Keuangan

Adila Amri Pratama



# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan,  
Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur  
Telp. (021) 8092423 / 80930008 - Fax. (021)  
8010301

 @BKNgoid   @BKNgoidofficial  [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id)